

ORIENTASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM

ORIENTASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM



(Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tanjungpinang)



Adji S. Muhammad, et al.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-264-2



9 786024 512642



Tim Penyusun:
Adji Suradji Muhammad;
Pery Rahendra Sucipta;
Gusrizal;
Rodi Wahyudi.



ORIENTASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM

(Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tanjungpinang)

Tim Penyusun:
Adji Suradji Muhammad;
Pery Rahendra Sucipta;
Gusrizal;
Rodi Wahyudi.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2018

**ORIENTASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM
(Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tanjungpinang)**

xiv + 143 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-284-2

Penulis : Adji Suradji Muhammad; Pery Rahendra Sucipta;
Gusrizal; Rodi Wahyudi.

Tata Letak : Nur Huda A

Desain Sampul : Nur Huda A

Cetakan : Oktober 2018

Copyright © 2018 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur selayaknya kami panjatkan kehadirat Illahi Robi atas segala curahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian khususnya kepada Tim Peneliti sehingga tim mampu menyelesaikan kajian “Orientasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum” tahun 2014 dengan mengambil locus di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tepat pada waktunya. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarganya sembari kita berharap dan berdoa agar kelak kita dapat berkumpul di *yaimul akhir*.

Perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam berbagai sisi kehidupan termasuk dalam tatanan sosial politik. Begitu istimewanya perempuan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan politik khususnya Partai Politik sebesar 30%. Bukan hanya itu, keterwakilan perempuan juga diperhatikan dalam komposisi penyelenggara pemilihan umum mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius pasca reformasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau memiliki atensi yang cukup besar dalam upaya memberdayakan potensi perempuan. Melalui kajian “Orientasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum” ini maka perempuan khususnya pemilih perempuan dapat serta mampu berfikir kritis dan objektif dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum.

Melalui kesempatan ini Tim Peneliti juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti dalam melakukan kajian ini. Akhir kata “tiada gading yang tak retak” tiada kesempurnaan yang hakiki, oleh karenanya kritik dan saran akan sangat

berguna bagi penyempurnaan dan pengembangan kajian dengan tema terkait dimasa yang akan datang.

Tertanda,
Tim Penyusun

Adji Suradji Muhammad;
Pery Rahendra Sucipta;
Gusrizal; Rodi Wahyudi.

SAMBUTAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penelitian mengenai *Orientasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum* di Provinsi Kepulauan Riau telah selesai dilaksanakan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak serta Pusat Studi Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang telah membantu melakukan kajian dengan tema tersebut diatas dan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Karena keterbatasan anggaran-lah maka kajian ini mengambil lokus di Kota Tanjungpinang dengan tidak menafikan daerah-daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat, serta telah menetapkan bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan sebagaimana bunyi Pasal 173 ayat 2 huruf e. Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Secara keseluruhan komposisi pemilih di Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang lalu sebanyak 49% adalah pemilih laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 51% (BPS Kota Tanjungpinang, 2017). Akan tetapi, jumlah pemilih perempuan tidak sebanding dengan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik ditingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun di tingkat Kota Tanjungpinang. Untuk anggota legislatif Kota Tanjungpinang periode 2014-2019 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa hanya 26,7%

dari wakil rakyat adalah perempuan, sedangkan 73,3% adalah laki-laki (BPS Kota Tanjungpinang, 2017). Sedangkan untuk perwakilan di DPRD Provinsi Kepri, baru sebanyak 17% dari wakil rakyat adalah perempuan (BPS Kepulauan Riau,2017).

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai beberapa hal diantaranya; 1. pengaruh demografi terhadap orientasi politik perempuan, 2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesukaan pemilih perempuan terhadap partai politik dan calon legislatif, 3. preferensi pemilih perempuan terhadap media dan event penyampai pesan Pemilu, dan 4. faktor faktor kepemimpinan serta orientasi pembangunan bagi pemilih perempuan.

Hasil kajian ini nantinya akan sangat berguna dalam membantu Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran politik perempuan yang lebih bermartabat.

Tanjungpinang, Agustus 2018
Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (P3AP2LB) Provinsi
Kepulauan Riau

dto

MISNI, SKM, M.Si
NIP: 19730516 199903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Metodologi Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN LITERATUR REVIEW	4
2.1. Orientasi Politik.....	4
2.1.1. Klasifikasi Orientasi Politik	8
2.1.2. Faktor Penyebab Orientasi Politik.....	10
2.2. Pemilih, Perilaku Pemilih dan Tipologi Pemilih.....	11
2.2.1. Definisi Pemilih	11
2.2.2. Perilaku Pemilih.....	11
2.2.3. Tipologi Pemilih	13
2.3. Perempuan dan Gender.....	16
2.4. Urgensi Perempuan Dalam Politik.....	20
2.5. Orientasi politik perempuan.....	22
2.6. Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Islam.....	24

BAB III	KONDISI EXISTING POLITIK PEREMPUAN	
	DI KOTA TANJUNGPINANG	30
3.1.	Demografi Tanjungpinang	30
3.2.	Komposisi Pemilih Kota Tanjungpinang.....	32
3.3.	Peta Politik Untuk DPRD Provinsi.....	35
3.4.	Peta Politik Untuk DPRD Kota Tanjungpinang	36
BAB IV	METODELOGI PENELITIAN	38
4.1.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
4.2.	Jenis Penelitian dan Sumber Data	38
4.3.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
4.4.	Teknik Pengumpulan Data	39
4.5.	Pengujian Instrumen Pengumpulan Data.....	40
4.5.1	Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan.	41
4.5.2	Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Prioritas Program Pembangunan.	43
4.5.3	Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Kriteria Calon Pemimpin	45
4.6.	Teknik Analisa Data.....	46
BAB V	TEMUAN DAN ANALISIS	48
5.1.	Karakteristik Responden	48
5.1.1	Domisili Responden Berdasarkan Lokasi Kecamatan	48
5.1.2	Domisili Responden Berdasarkan Kelurahan	49
5.1.3	Pekerjaan Responden.....	51
5.1.4	Agama Responden.....	52
5.1.5	Distribusi Umur Responden.....	53
5.1.6	Distribusi Suku Responden.....	54
5.1.7	Tingkat Pendidikan Responden	55
5.1.8	Tingkat Penghasilan Responden	56
5.1.9	Status Pernikahan Responden	57

5.1.10	Status Kepemilikan Rumah Responden	58
5.2.	Pertanyaan Mengenai Sikap Pemilih Perempuan Dalam Pemilu	58
5.2.1	Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Caleg Perempuan	58
5.2.2	Efektivitas Media Informasi dalam Pemilu Tahun 2014	71
5.2.3	Sikap Pemilih Perempuan Terhadap Politik Uang	71
5.2.4	Partai Yang Di Pilih Pada Pemilu 2014	78
5.2.5	Partai Yang Disukai Saat Ini	78
5.2.6	Partai Yang Akan Dipilih Pada Pemilu 2019	78
5.3.	Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Partai Oleh Pemilih Perempuan	89
5.3.1	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pekerjaan	92
5.3.2	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Agama	94
5.3.3	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Umur	95
5.3.4	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Suku	96
5.3.5	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendidikan	97
5.3.6	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendapatan	98
5.3.7	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pernikahan	99
5.3.8	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Perumahan	100
5.3.9	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Sosial	101
5.4.	Kegiatan Sosialisasi Partai Yang Disukai Pemilih Perempuan	102
5.5.	Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan	105
5.6.	Analisa Prioritas Pembangunan	105
5.7.	Analisa Kriteria Calon Pemimpin	106

5.8. Pembahasan.....	111
5.8.1 Ketidaktahuan Terhadap Caleg Perempuan Ditinjau dari Demografi.....	111
5.8.2 Efektivitas Media Info Pemilu	116
5.8.3 Politik Uang.....	118
5.8.4 Preferensi Partai.....	120
5.8.5 Faktor yang mempengaruhi pemilihan partai oleh pemilih perempuan	121
5.8.6 Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan.....	125
5.8.7 Analisa Prioritas Pembangunan	129
5.8.8 Analisa Kriteria Calon Pemimpin	132
BAB VI PENUTUP.....	136
6.1. Simpulan	136
6.2. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BIODATA TIM PENULIS.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Demografi Kota Tanjungpinang 2018	30
Tabel 2	Komposisi penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	31
Tabel 3	Alokasi dan Distribusi Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2014.....	33
Tabel 4	Daftar Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang Hasil Pemilu 2014.....	35
Tabel 5	Daftar Calon Legeslatif Terpilih Pemilu Kota Tanjungpinang 2014.....	36
Tabel 6	Nilai Alpha Cronbach dan Kebolehpercayaan Instrument.....	40
Tabel 7	Uji Reliabilitas Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan	41
Tabel 8	Uji Validitas Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan	42
Tabel 9	Uji Reliabilitas Prioritas Program Pembangunan.....	44
Tabel 10	Uji Validitas Prioritas Program Pembangunan	44
Tabel 11	Uji Reliabilitas Kriteria Calon Pemimpin	45
Tabel 12	Uji Validitas Kriteria Calon Pemimpin.....	45
Tabel 13	Pengetahuan Responden Terkait Ada Tidaknya Caleg Perempuan Pada PEMILU 2014 di Tanjungpinang	59
Tabel 16	Partai yang Dipilih pada PEMILU 2014 di Kota Tanjungpinang	80
Tabel 17	Partai yang Disukai Saat Ini.....	83
Tabel 18	Partai yang Akan Dipilih pada PEMILU 2019	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Nama dan Logo Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tanjungpinang	34
Gambar 2	Peta Ketidaktahuan Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Pada Pemilu Tanjungpinang 2014.....	60
Gambar 3	Peta Efektivitas Media Pemilu Per-Kelurahan di Tanjungpinang	75
Gambar 4	Peta Sikap Pemilih Perempuan Per- Kelurahan Terhadap Politik Uang	77
Gambar 5	Peta Dominasi Partai Pilihan Pemilih Perempuan pada PEMILU 2014	82
Gambar 6	Peta Partai yang Disukai Pemilih Perempuan Saat Ini	85
Gambar 7	Peta Partai yang Kemungkinan Dipilih Pemilih Perempuan pada PEMILU 2019	88
Gambar 8	Peta Dominasi Faktor Keterpilihan Partai di Kelurahan Kota Tanjungpinang	91
Gambar 9	Kegiatan Partai Politik yang Disukai oleh Pemilih Perempuan	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Penduduk Kota Tanjungpinang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Grafik 2	Komposisi Gender Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hasil Pemilu 2014.....	36
Grafik 3	Domisili Responden Berdasarkan Kecamatan	49
Grafik 4	Komposisi Pekerjaan Responden.....	50
Grafik 5	Komposisi Pekerjaan Responden.....	51
Grafik 6	Komposisi agama responden	52
Grafik 7	Distribusi Umur Responden.....	53
Grafik 8	Distribusi Suku Responden.....	54
Grafik 9	Tingkat Pendidikan Responden	55
Grafik 10	Tingkat Penghasilan Responden setiap bulan.	56
Grafik 11	Status Perkawinan Responden	57
Grafik 12	Status Kepemilikan Rumah Responden	58
Grafik 13	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Umur	62
Grafik 14	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Suku	63
Grafik 15	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Pendidikan.....	64
Grafik 16	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Pendapatan	66
Grafik 17	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Pernikahan	67
Grafik 18	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Perumahan.....	69
Grafik 19	Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Sosial	70
Grafik 21	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pekerjaan	93
Grafik 22	Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Agama	94

Grafik 23 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Umur	95
Grafik 24 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Suku	96
Grafik 25 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendidikan.....	97
Grafik 23 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Pernikahan.....	99
Grafik 24 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Perumahan.....	100
Grafik 26 Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan	107
Grafik 27 Prioritas Pembangunan.....	109
Grafik 28 Kriteria Calon Pemimpin.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan (Gaffar, 2013). Dalam pemilihan umum, partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting, dimana sekelompok warga negara ikut terlibat dalam proses politik dalam memilih pemimpin negara, anggota legislatif dan pemimpin daerah (Surbakti, 1992)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat serta telah menetapkan bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan (Pasal 55 ayat 2). Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Ada anggapan bahwa, besarnya jumlah pemilih perempuan seharusnya *linier* dengan keterwakilan perempuan khususnya

di lembaga legislatif. Sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan anggota dewan sedangkan dilihat dari kuantitas jumlah laki-laki lebih sedikit dengan perempuan. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan/legislatif, pemerintah telah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang yang mengharuskan adanya 30% keterwakilan perempuan. Namun harapan ini masih belum sebagaimana yang diharapkan (Hilman, 2017)

Secara keseluruhan jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang lalu sebanyak 144.693 pemilih. Komposisi pemilih jika dilihat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dirinci sebagai berikut; pemilih laki-laki sebanyak 72.162 orang dan pemilih perempuan sebanyak 73.531 orang (KPU, 2018).

Jumlah pemilih perempuan tidak sebanding dengan jumlah keterwakilan di lembaga legislatif baik ditingkat Daerah, tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang periode 2014-2019 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa hanya 8 orang (26,7%) dari perwakilan perempuan, sedangkan 22 orang (73,3%) adalah laki-laki (BPS Kota Tanjungpinang, 2017). Sedangkan untuk perwakilan di DPRD Provinsi sebanyak 17% dari 5 (lima kursi) daerah pemilihan Kota Tanjungpinang.

Mencermati secara seksama permasalahan tersebut diatas maka peneliti melihat bahwa persoalan utama yang kemudian menjadi fokus penelitian ini adalah mengapa dengan jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tetapi yang terpilih perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kriteria utama yang dinilai oleh pemilih perempuan dalam menentukan pilihan pada pemilu/pilkada?
2. Mengapa pemilih perempuan tidak tertarik terhadap calon perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui orientasi pemilih perempuan terhadap kandidat perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemilih perempuan tidak memilih kandidat perempuan.

1.4. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan riset dengan tema orientasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum ini, tim melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Menyusun draft angket yang akan dilakukan sebagai dasar analisis
2. Melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap angket
3. Memperbaiki angket yang telah diuji validitas dan reabilitasnya
4. Mendistribusikan angket sesuai dengan komposisi setiap wilayah
5. Melakukan tabulasi angket dan
6. Menganalisis data serta mendiskusikannya/membahasnya

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN LITERATUR REVIEW

2.1. Orientasi Politik

Orientasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kecenderungan akan satu arah tertentu, atau keinginan ke depan yang hendak dicapai. Sedangkan kata politik dalam KBBI adalah ilmu tata negara dan ilmu tentang kekuasaan. Namun dalam lingkup yang lebih khusus politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu¹. Secara sederhana “orientasi politik” merupakan sebuah keinginan yang hendak dicapai melalui suatu pilihan politik yang menjadi bagian dari sistem politik Indonesia.

Orientasi politik berkaitan dengan upaya menafsirkan tindakan politik atau peristiwa politik melalui suatu pencarian kebijakan yang tepat dalam mengatasi persoalan politik yang dihadapi. Orientasi ini menekankan pada alternatif-alternatif kebijakan beserta segala dampaknya, tujuan/sasaran kebijakannya, dan situasi/kondisi ketika kebijakan itu dikeluarkan. Pilihan politik merupakan faktor-faktor yang menentukan alternatif keputusan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan².

Setiap masyarakat khususnya perempuan yang mengikuti perkembangan politik sudah pasti memiliki orientasi politik. Orientasi

¹ Ramlan Surbakti.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

² Ibid, Hal. 131

politik merupakan suatu sikap dan cara pandang seseorang atau masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik. Dari berbagai aspek itu sendiri akan muncul berbagai faktor yang akan mempengaruhi orientasi politik perempuan, baik yang berasal dari dalam atau pun dari luar diri perempuan itu sendiri.

Memajukan partisipasi politik perempuan bukan hanya kepentingan kaum perempuan, partisipasi politik mereka dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dapat mencapai potensinya yang maksimal. Suara perempuan dalam pemilu sangat berarti dalam pelaksanaan proses demokrasi. Mengapa tidak, dari segi kuantitatif, perempuan merupakan basis pemilih terbesar yang dapat mendulang suara yang menguntungkan bagi salah satu partai politik, karena itu tidak mengherankan apabila pada proses persiapan pemilu tahun 2004 maupun pada pemilu tahun 2009 banyak partai yang berupaya menggambarkan bahwa partainya peduli akan hak-hak perempuan. Tetapi sebagai basis pemilih terbesar pada umumnya “perempuan memandang pemilu sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat mampu membawa kehidupan rakyat kearah yang lebih baik. (Maya R, 2004 : 8)

Faktor-faktor yang berasal dari dalam (internal) seperti faktor pendidikan, pengetahuan yang dimiliki, dan kepercayaan/agama. Sedangkan faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan tim sukses.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut memilih, memiliki pola perilaku politik tertentu. Tindakan, sikap, dan juga perilaku politik seseorang, merupakan bentuk dari bangunan kognitif dan pemahaman yang terbentuk melalui proses yang panjang. Komponen orientasi kognitif berasal dari tingkat pengetahuan pemilih perempuan mengenai tokoh-tokoh, atau aktor-aktor pemerintah, simbol-simbol negara, simbol-simbol politik, jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil mereka. Orientasi afektif berbicara tentang perasaan perempuan terhadap aspek-aspek politik. Sedangkan komponen evaluatif berbicara tentang penilaian terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Untuk melihat orientasi politik perempuan dalam memilih seorang kepala daerah terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi yaitu perempuan memilih kepala daerah dilihat dari faktor yang berasal dari dalam (internal) berupa pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki atau kepercayaan yang dianut dan faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang berasal dari keluarga atau lingkungan masyarakat.

Berbagai faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi orientasi politik perempuan akan cenderung ke arah kognitif, afektif, atau evaluatif. Pada prinsipnya, partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan kepemiluan bukanlah sesuatu yang penyelenggara pemilu harus mencapainya hanya karena itu adalah hak asasi dasar; namun, melibatkan perempuan memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur.

Secara umum orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. Tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu perempuan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih calon-calon legislatif .

Orientasi politik ini merupakan perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pemilih perempuan dalam memilih (Ramlan Surbakti, 1992:141).

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang

akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya (Sjamsudin, 1993:8).

Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpolo oleh mereka yang memandang suatu objek politik (Gueltom dalam Mesdiastutie, 2006:15)

Orientasi politik masyarakat dapat berubah melalui dua cara yaitu dengan cara pemaksaan dan dengan cara persuasif. Jika orientasi politik masyarakat dilakukan dengan cara pemaksaan maka masalah yang akan timbul adalah:

1. Sikap menentang. Suatu ciri yang menonjol yang melekat pada segala bentuk paksaan ialah bahwa tindakan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh yang menjadi sasaran pemaksaan. Reaksi yang lazim ditemui adalah sikap menentang. Penentangan terhadap suatu paksaan dapat saja mengambil bentuk yang keras ataupun lunak, tergantung pada karakter daripada objek pemaksaan, di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan aksi keras yang diberikan terhadap upaya pemaksaan itu dapat berkembang menjadi faktor yang mengancam stabilitas sistem politik.
2. Perubahan sesaat. Berapa lama perubahan yang dilaksanakan itu dapat bertahan dalam masyarakat. Jelas bahwa sesuatu yang dipaksakan itu merupakan hal yang tidak disukai sehingga masyarakat tidak akan mampu memelihara atau melestarikan

orientasi yang dipaksakan itu, dan dapat memberikan orientasi politiknya kepada penguasa pemerintah, hal ini berarti bahwa orientasi politik akan hidup selama penguasa mampu menunjang kehadirannya kepada masyarakat (Nazarudin Sjamsuddin, 1993:10).

2.1.1. Klasifikasi Orientasi Politik

Definisi tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi politik adalah mengikuti rumusan Parsons dan shills yaitu Orientasi politik mengacu pada aspek-aspek dan obyek yang dibakukan serta berhubungan antar keduanya dengan menggunakan tiga komponen orientasi politik, yakni:

1. Orientasi Politik Kognitif. Pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya dan juga untuk menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik.
2. Orientasi Politik Afektif. Perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik.
3. Orientasi Politik Evaluative. Keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang dan juga berkaitan dengan evolusi normatif, moral politik dan etika politik (Gabriel A. Almond and Sidney Verba, 1990:16).

Setidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang menyebabkan orientasi seseorang berbeda dengan orang lain.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Orientasi seseorang dapat dibuka secara sistematis jika memperlihatkan hal-hal berikut:

- a. Pengetahuan apa yang dimiliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat “konstitusionalnya” dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu?
- b. Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat “*upward*”? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap suatu struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan itu?
- c. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang “*downward*”, struktur-struktur, individu-individu keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?
- d. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh?. Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuannya norma-norma partisipasi atau penampilan apa yang diketahui dan dipergunakan dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya? (Gabriel A. Almond and Sidney Verba, 1990:19-20).

2.1.2. Faktor Penyebab Orientasi Politik

Pola perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti pendidikan, pengetahuan yang orientasinya berkisar pada kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa yang dimilikinya (Mar'at, 1992: 25-26).

Orientasi pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sedangkan secara eksternal merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya (Nur Umi Pelitawati: 2014: 24).

Terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab orientasi politik seseorang dalam menggunakan hak pilih yaitu :

- a. Faktor (internal) struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu obyek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap obyek tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan.
- b. Faktor (eksternal) lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan

pengalaman-pengalaman hidup (Sastroatmodjo, 1995:14-15).

2.2. Pemilih, Perilaku Pemilih dan Tipologi Pemilih

2.2.1. Definisi Pemilih

Pemilih adalah semua pihak sebagai tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mereka mendukung dan kemudian dapat memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik. (Joko J. Prihatmoko dalam Puspasari, 2012:16).

Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok, dan terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan pada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan suatu program politik yang dapat menawarkan program kerja terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih. (Joko J. Prihatmoko dalam Puspasari, 2012:16)

2.2.2. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih atau *Voting Behaviour* menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, 1985:280). Bone dan Raney (1971:2-3) sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Asfar (2005), menjelaskan

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

perilaku pemilih diartikan dengan pernyataan sebagai “perilaku pemilih adalah tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara dalam penyelenggaraan pemilu serta latar belakang seseorang melakukan tindakan tersebut. Tingkah laku atau tindakan individu dalam proses pemberian suara itu meliputi tiga aspek yaitu preferensi (orientasi terhadap isu, orientasi terhadap kualitas personal kandidat, identifikasi partai), aktivitas (keterlibatan dalam partai politik tertentu, keterlibatan dalam setiap kampanye, kehadiran dalam pemungutan suara) dan pilihan terhadap salah satu partai politik tertentu”.

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan” (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Puspasari, 2012:11).

Pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok

informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jenis kelamin juga merupakan variabel sosiologis yang berhubungan dengan perilaku pemilih.

Masih berkaitan dengan perilaku pemilih, menurut Afan Gaffar yang dikutip oleh Muhammad Asfar (2005:47) menyatakan bahwa selama ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang voting behavior didasarkan pada tiga model/pendekatan yaitu model/pendekatan sosiologis, model/pendekatan psikologis dan model/pendekatan politik rasional.

2.2.3. Tipologi Pemilih

Penting untuk mempelajari aspek-aspek yang melatarbelakangi bagaimana dan mengapa pemilih menyuarakan pendapatnya. (Quist dan Crano dalam Puspasari, 2012:17). Secara psikologis, untuk menganalisa rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya dapat digunakan model kesamaan (*similarity*) dan ketertarikan (*attraction*). Dasar penggunaan model tersebut karena setiap individu akan tertarik pada suatu hal atau seseorang bila memiliki sistem nilai dan keyakinan yang sama (Byrne dalam Puspasari, 2012:17). Maksudnya adalah bila dua pihak memiliki karakteristik yang sama (*similarity*) maka akan semakin meningkatkan ketertarikan (*attraction*) antara satu dengan yang lain. Demikian halnya di dalam dunia politik, dikenal dengan model kedekatan (*proximity*) atau model "patial" (Downs dalam Puspasari, 2012:17). Model ini menjelaskan bahwa pemilih yang memiliki kedekatan dan kesamaan sistem nilai dan keyakinan dengan salah satu

kandidat atau partai maka akan mengelompok pada kandidat maupun partai tersebut.

Terdapat dua jenis kesamaan yang digunakan dalam menilai kedekatan dengan seorang kontestan politik (Firmanzah, 2008:99-109), yaitu : (1) Kesamaan akan hasil akhir yang ingin dicapai (*Policy-Problem-Solving*), dan (2) kesamaan akan faham dan nilai dasar ideologi (*ideology*) dengan salah satu kontestan politik tersebut. Kesamaan pertama berkaitan dengan kemampuan kontestan dalam menawarkan solusi masalah. Perspektif akan menjadi sangat penting di saat kampanye pemilu, karena kontestan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemilih akan program kerja partai politik dan kontestan melalui penyediaan informasi dan komunikasi yang efektif. (Pattie dan Johnston dalam Puspasari, 2012:17). Selanjutnya adalah kesamaan ideologi. Mengacu pada pengertian ideologi, terdapat batasan tentang ideologi sebagai sebuah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai suatu fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok. (Sargent dalam Puspasari, 2012:18).

Karakteristik pemilih yang didasarkan pada kesamaan ideologi lebih menekankan pada aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Maksudnya adalah pemilih cenderung berkelompok kepada kontestan yang memiliki kedekatan ideologi yang sama dengan pemilihnya. (Firmanzah, 2008:99-109). Kedua model tersebut dapat memudahkan kontestan dan pemilih dalam memetakan kategori pemilih dan kontestan berdasarkan karakteristik kesamaan atau kedekatan. Sehingga bagi kontestan dapat menjadi dasar dan pemberi arah bagi para pemilihnya. Selain itu, di dalam keputusan untuk memilih, pemilih memiliki “*judgement*” yang mendasari pemilihan suatu kontestan.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Atas dasar model kesamaan dan kedekatan *ideology* dan *Policy-Problem-Solving*, terdapat empat jenis tipologi pemilih (Firmanzah, 2008:99-109). Empat tipologi tersebut terdiri atas :

1. Pemilih Rasional. Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “*Policy-Problem-Solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada salah seorang kontestan maupun partai. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga tetapi bukan merupakan suatu hal signifikan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh seorang kontestan atau sebuah partai, dari pada paham dan nilai kontestan atau partai. (Firmanzah, 2008:99-109)
2. Pemilih Kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap seorang kontestan atau sebuah partai politik cukup tinggi dan tidak semudah “*rational voter*” untuk berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini harus di “*manage*” sebaik mungkin oleh seorang kontestan maupun partai politik. Pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan

pembuatan partai politik tandingan juga besar. (Firmanzah, 2008:99-109)

3. Pemilih Tradisional. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat pada kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan *figure* dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis dari sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. (Rohrchenieder dalam Puspasari, 2012:21). Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling terlihat bagi pemilih tradisional.
4. Pemilih Skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan seorang kontestan atau sebuah partai politik, juga sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memperdulikan program kerja atau "*platform*" dan kebijakan sebuah partai politik. (Firmanzah, 2008:99-109)

2.3. Perempuan dan Gender

Fakih (2006:71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-

sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

Selanjutnya Santrock (2003:365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004:19).

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Abdullah, 2003:19 mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh Para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan

kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Tidak terkecuali pula pada proses pemilihan umum, yaitu bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai warga Negara yang wajib menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Terdapat perbedaan mendasar tentang gender yang meliputi kapasitas biologis, lingkungan sosial perempuan dan laki-laki tinggal, serta interaksi antara biologi dan budaya. Menurut beberapa ahli, tiga perspektif umum tentang asal-usul pola gender didasarkan pada faktor-faktor berikut:

Pertama, Faktor Biologi. Perbedaan gender yang paling mendasar adalah dipengaruhi oleh faktor biologis. Secara biologis jelas ada perbedaan fisik yang mencolok, seperti dalam perkembangan otot dan tinggi badan, dalam hal kemampuan mengasuh anak dan memberi ASI, dan perempuan memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Sejak awal perempuan secara alamiah dianggap memiliki peranan dan tugas sebagai pengatur rumah tangga. Sementara laki-laki karena memiliki otot yang lebih besar maka mereka mempunyai tugas untuk berburu dan mencari nafkah untuk keluarga (Budiman, 1985:73). Pembagian semacam ini sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu karena memang pada dasarnya itu berasal dari organisasi kemasyarakatan di setiap budaya manusia. (Bem dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53)

Kedua, Faktor Sosialisasi. Perspektif sosialisasi menekankan pada banyaknya cara orang mempelajari tentang gender dan mendapatkan perilaku “sesuai jenis kelamin” sejak awal masa anak-anak (Eckes & Trautner dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53) Gagasan yang penting disini adalah masyarakat mempunyai ekspektasi dan standar yang berbeda-beda untuk perilaku laki-laki dan perempuan. Menurut perspektif sosialisasi, beragam pengalaman sosial yang dialami anak

perempuan dan anak laki-laki akan menguatkan adanya perbedaan gender dalam sikap, minat, keahlian, dan personalitas, bahkan hingga terbawa ke masa dewasa. (Eckes & Trautner dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53)

Ketiga, Faktor Peran Sosial. Kehidupan orang dewasa ditata berdasarkan berbagai peran, seperti anggota keluarga, pekerja, dan anggota komunitas atau masyarakat. Ide utamanya adalah bahwa banyak peran sosial yang penting yang didefinisikan secara berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Dalam keluarga misalnya, orang biasanya punya ekspektasi berbeda untuk ibu dan ayah, untuk suami dan istri, serta anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam dunia kerja, peran okupasional sering didasarkan pada jenis kelamin. Seperti perawat, juru ketik, dan guru TK atau SD biasanya adalah wilayah perempuan dan guru olah raga, pengobatan, konstruksi adalah wilayah laki-laki. Dalam organisasi bisnis, pekerjaan perempuan sering berada pada status rendah (Taylor, E., S., dkk. Dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53).

Secara tradisi, perbedaan peran sosial mempengaruhi perilaku perempuan dan laki-laki dalam beberapa hal. Perbedaan peran ini semakin melanggengkan pembagian kerja berdasarkan gender; perempuan bekerja di rumah mengasuh anak sedangkan laki-laki bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah. Peran juga dapat mempengaruhi keahlian dan minat seseorang yang muncul sejak masa kecil kemudian dikembangkan di masa dewasa. Efek peran berbasis gender ini mungkin pada akhirnya akan melebar ke situasi lain. (Eagly dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53).

Perbedaan pembagian peran gender sejak awal dipelajari dari lingkungan keluarga, ajaran agama, atau dari pengalaman kerja yang menekankan bahwa laki-laki lebih memiliki status lebih tinggi dan otoritatif daripada perempuan. Ketika bertemu orang baru, seseorang akan menggunakan jenis kelaminnya sebagai petunjuk awal, misalnya dengan

mengasumsikan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang percaya diri dan perempuan adalah pengikut (Eagly dalam Rahmaturrizqi, 2012:52-53).

Perilaku politik dan juga pilihan politik pemilih perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, struktur sosial budaya dan juga sistem politik yang ada. Seperti halnya perempuan, terdapat konteks yang melatar belakangnya. Menurut beberapa ahli, terdapat pelabelan terhadap perempuan, bahwa perempuan lebih bersifat irasional, emosional sehingga tidak bisa menjadi pemimpin. Hal ini yang membuat perempuan menjadi makhluk nomor dua dalam masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. (Rahmaturrizqi, 2012:52-53)

Berdasarkan uraian mengenai perbedaan peran jenis perempuan dan laki-laki di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa aspek yang dinilai sebagai pembeda peran jenis perempuan dan laki-laki, yaitu aspek perilaku dan aspek sifat. Aspek sifat dibagi ke dalam sifat feminim pada perempuan dan maskulin pada laki-laki. Perempuan memiliki sifat hangat, emosional, lemah lembut dan pasif sebagai sifat feminim. Sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kompetitif, dominan, tidak bergantung dan penuh percaya diri sebagai sifat maskulin (Rahmaturrizqi, 2012:52-53). Dari adanya perbedaan-perbedaan mengenai perilaku dan sifat antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka akan berdampak pula pada perilaku pemilih antara keduanya.

2.4. Urgensi Perempuan Dalam Politik

Sangatlah penting bahwa perempuan dan laki-laki terlibat secara penuh dan aktif dalam proses dan pengambilan keputusan politik sebuah negara. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta nondiskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang sangat penting. Ini adalah hak-hak yang diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang

menyatakan dari awal di Pasal 1, bahwa “semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara.”

Mentaati prinsip hak asasi manusia bukanlah satu-satunya alasan perempuan harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam politik; terdapat alasan-alasan praktis yang penting mengapa perempuan harus terlibat. **Pertama**, perempuan adalah setengah dari populasi sebuah negara dan jika mereka termarginalisasi dari partisipasi penuh dan setara dalam proses dan pengambilan keputusan politik, sebuah negara tidak dapat dikatakan sepenuhnya demokratis. Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip 4 Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh Persatuan Antar Parlemen, “Pencapaian demokrasi memerlukan adanya kemitraan yang tulus antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan urusan masyarakat di mana mereka bekerja secara setara dan saling melengkapi, sedangkan perbedaan yang mereka miliki saling memperkaya satu sama lain.” (*International Foundation for Electoral Systems*, 2014 : 6).

Kedua, Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan sebuah negara sangatlah penting untuk menjaga kehidupan masyarakat. Perempuan seringkali mengikutsertakan kebutuhan keluarga sebagai pertimbangan, sehingga cakupan perspektifnya lebih luas. Perempuan memiliki beragam pengalaman, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dengan perbedaan-perbedaan tersebut membantu memastikan tercapainya masyarakat yang lebih representatif, di mana kebutuhan perempuan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan program. Lebih jauh, masyarakat yang inklusif terhadap perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas dan perempuan dari kelompok yang terpinggirkan, cenderung tidak melakukan kekerasan dan lebih toleran. Hal ini memiliki dampak positif terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak. (*International Foundation for Electoral Systems*, 2014 : 6)

Ketiga, melibatkan perempuan masuk akal secara ekonomi. Institusi besar seperti Forum Ekonomi Dunia, Komisi Sosial Ekonomi Asia dan Pasifik, dan McKinsey & Company, sebuah firma konsultan manajemen global yang terdepan, semuanya menyimpulkan bahwa kesetaraan gender

menghasilkan masyarakat yang lebih makmur di mana roda bisnis berjalan lebih baik. (Lewis, K. (2011). *The Gender Dividend: A Business Case for Gender Equality*. New York: Persatuan Bangsa-Bangsa). Penyelenggara pemilu tidak termasuk salah satu aktor bisnis, namun mereka sama dalam hal menangani anggaran jutaan dolar dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebuah negara untuk mengelola dan membelanjakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin. Melibatkan perempuan di seluruh tingkat organisasi akan membantu tercapainya hal ini. (*International Foundation for Electoral Systems*, 2014:7)

2.5. Orientasi politik perempuan

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak (Mery G.Tan 1992:1)

Orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang diteliti terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih, dikarenakan banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti: memiliki rasa suka dan tidak suka karena penampilan caleg tersebut, berfikir bahwa perempuan tidak pantas masuk kedalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional. (Winda Meilian: 2009).

Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosok kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik. **Hambatan eksternal** antara lain terbentuk dari birokrasi yang *paternalistic* baik dari luar maupun dari dalam lingkungan perempuan itu sendiri (Affan Gafar, 1999).

Terdapat dua proses yang mempengaruhi pilihan politik perempuan. Kedua proses tersebut adalah :

1. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang waktu. Dalam proses sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi, ide dan nilai-nilai yang menjadi pengetahuan dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau individu untuk menajutkan pilihan-pilihan politiknya.

Proses transmisi inilah yang diterima perempuan yang berasal dari keluarga, lingkungan, keluarga dan media massa. Nilai yang berasal dari keluarga adalah nilai yang paling mempengaruhi persepsi perempuan terhadap fenomena politik. Suami selalu mendominasi perempuan untuk memperoleh informasi tentang partai politik dan caleg caleg yang akan dipilihnya. (Nawal El Saadawi, 2001:34)

2. Kelompok sosial. Secara sosiologis, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik masyarakat. Proses sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih perempuan mengidentifikasi dirinya berdasarkan kelompok sosialnya.

Pilihan politik perempuan cenderung mengikuti orang terdekatnya, entah itu bapaknya, kakaknya, atau suaminya, atau

kerabat lain yang mungkin memiliki jabatan atau dianggap sebagai tokoh ditempat tinggalnya. Hal ini karena mungkin lebih percaya dengan orang terdekatnya.

Sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda. Hal ini juga melibatkan proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dalam nilai-nilai dalam kelompok sosial tersebut. Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial melibatkan proses transmisi nilai-nilai yang terpahami oleh kelompok tersebut terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya akan sangat terpengaruhi dengan proses sosialisasi dan perolehan pengetahuan dari kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan dimensi psikologis perempuan (Cice Verawati: 2009).

Proses sosialisasi yang panjang, akan membuat seseorang untuk membentuk ikatan yang kuat dengan kelompok sosial ataupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politiknya kelak.

Pemilih perempuan yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu akan menerima proses internalisasi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, perilakunya secara umum akan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang secara psikologis sangat mempengaruhi perempuan. Begitupun dengan pilihan politiknya yang secara psikologis akan berkaitan dengan preferensi anggota kelompoknya (Adnan Nursal, 2004:60).

2.6. Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Islam

Salah satu isu klasik yang selalu aktual dan sering menjadi perdebatan akademik dalam studi keislaman adalah diskursus kepemimpinan perempuan di dunia publik, khususnya kepemimpinan di bidang politik. Perdebatan seputar wacana tersebut melahirkan pro dan kontra dengan sederet argumentasi yang diajukan oleh masing-masing

kelompok untuk mendukung pendiriannya, baik dari sudut teologis, sosiologis, maupun historis.

Realitas teks dan sosiologis menempatkan perempuan, baik pada dunia teks maupun praksis pada posisi diskriminatif, terutama pada hal-hal sebagai berikut; *pertama*, ada stereotipe bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. *Kedua*, kualitas ke-diri-an perempuan adalah separoh dari laki-laki. *Ketiga*, perempuan tidak layak menjadi pemimpin Negara karena dinilai tidak cakap mengurus masalah-masalah sosial yang berat dan pelik³.

Citra diri perempuan dalam khazanah tafsir klasik masih bias dengan titik sentuh penafsiran yang bias gender dengan memosisikan perempuan sebagai makhluk yang inferior, lemah, dan mewarisi kejahatan. Pandangan Amina Wadud menyebutkan, para penafsir lebih melihat perbedaan esensial laki-laki dan perempuan dari segi penciptaannya, kapasitas, dan fungsinya dalam masyarakat, dan ganjaran yang harus diterima olehnya di hari akhir nanti. Konsekuensi logis dari interpretasi yang bias ini menghasilkan satu stigma bahwa perempuan tidak pantas memikul tugas-tugas tertentu atau peranan dalam berbagai bidang di masyarakat (*public domain*) seperti dalam hal kepemimpinan politik⁴.

Meskipun dikatakan bahwa pada umumnya pakar hukum Islam era klasik tidak memberi peluang kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam mengatur masyarakat atau dalam kancah politik, tetapi tidak menutup kemungkinan ide semacam itu juga masih dijumpai dalam masyarakat kontemporer. Di antara ulama kontemporer yang tidak membolehkan perempuan diangkat sebagai pemimpin adalah Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutnya, klausa ayat yang terdapat dalam QS. 4 :

³ Beberapa stigma dan pencitraan negatif terhadap perempuan secara ideologis mengesahkan sekaligus akan melanggengkan ideologi patriarkhal yang dijustifikasi antara lain oleh interpretasi teks keagamaan yang dibaca secara naratif, skripturalis, dan legalistik. Lihat, Lukman S. Thahir, *Studi Islam Multidisipliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, dan Sejarah* (Yogyakarta: Qirtas, 2003) hal. 125-126.

⁴ Amina Wadud Muhsin, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman (Ed.) *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 193.

34 menunjukkan kelebihan jenis laki-laki atas jenis perempuan secara umum, bukan secara perorangan. Karenanya, bila ada seorang perempuan melebihi kemampuan kebanyakan laki-laki, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan argumen untuk membenarkan alasan perempuan boleh menjadi pemimpin atas laki-laki secara umum, misalnya menjadi pemimpin pemerintahan atau negara⁵.

Apa yang digambarkan dalam al-Qur'an terhadap perempuan jelas sekali menggambarkan berbagai citra positif. *Pertama*, perempuan adalah pribadi yang mempunyai kemandirian politik (*istiqlal al-siyasi*) seperti profil Ratu Balqis, sebagaimana yang disampaikan dalam Q.S. an-Naml ayat 23. *Kedua*, perempuan adalah manusia yang mempunyai kebebasan pribadi (*istiqlal al-syakhsyi*) seperti disebutkan dalam Q.S. at-Tahrim: 12. *Ketiga*, perempuan adalah pribadi yang bebas mengeluarkan pendapat di hadapan orang banyak⁶. Legalitas kepemimpinan perempuan dalam teks Hadis antara lain didasarkan pada Hadis, "Setiap kamu adalah pemimpin..."⁷. Nabi dalam hal ini jelas memberi ruang kepemimpinan kepada siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan, tertera dalam surah al-Taubah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 34, "Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-

⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 68-69

⁶ Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam (Jakarta: Depag RI, 2001), hal. 41-42.

⁷ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam* (Jakarta: El-Kahfi, 2001), hal. 164.

perempuan...”, sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kata mereka kepemimpinan berada di tangan lelaki sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat al-Nisa: 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.

Menurut padangan K.H. Husein Muhammad, surat an-Nisa ayat 34 di atas sebagai legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogi utama (*qiyas aulawi*)⁸. Hal itu kemudian terkait dengan penafsiran literal teks Hadis riwayat Abi Bakrah (tidak akan bahagia suatu kaum/bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan)⁹, melahirkan polemik di kalangan ulama terkait dengan makna dari Hadis tersebut.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali ibn Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala

⁸ K.H. Husein Muhammad, Tafsir Gender, hal. 106-107.

⁹ Hadis ini terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan banyak kitab Hadis lainnya yang tersebar dalam kitab-kitab Hadis serta beberapa kitab tafsir. Lihat, Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 4 (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1987), hal. 1610. Lihat pula Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Baari juz 13 (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1379), hal. 56. Lihat juga, al-Qurtubi Abi Abdillah, Tafsir al-Qurtubi, hal. 355.

Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah, Utsman RA¹⁰.

Penggambaran perempuan dengan citra positif di atas sangat berlawanan dengan sebagian ulama lain yang membangun citra negatif terhadap perempuan, khususnya dalam kepemimpinan politik. Beberapa bangunan argumentasi yang diajukan juga bermuara pada dalil yang sama antara lain al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34, sebagaimana dikutip di atas. Hanya saja pendekatan penafsirannya yang berbeda sehingga melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Misalnya, dalam beberapa kitab tafsir klasik disebutkan bahwa, "Para laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan karena mereka mempunyai kelebihan akal (intelektualitas) dan mempunyai kemampuan mengatur (*leadership*), sementara perempuan sebaliknya lemah akal dan agamanya."¹¹ Hal yang senada juga dinyatakan dalam kitab tafsir lain bahwa kepemimpinan laki-laki karena ia diberi kelebihan oleh Allah untuk mengatur, mendidik, dan menjaga perempuan, yaitu kekuatan akal pikirannya.¹²

Masih dalam kaitan dengan status hukum kepemimpinan perempuan menanggapi Hadis di atas para ulama berbeda. Ismail al-Shan'ani memetakan dua pendapat hukum yang berbeda. *Pertama*, pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) yang menyatakan haram hukumnya mengangkat perempuan menjadi imam/kepala negara. *Kedua*, pendapat Ibn Jarir At-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan¹³.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 137.

¹¹ Al-Qurtubi Abi Abdillah, *Tafsir al-Qurtubi* juz 5 (Kairo: Dar al-Syu'bi, 1372), hal. 169.

¹² Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir* juz 1 (Beirut: Daar al-Fikr, TT), hal. 421.

¹³ Ash-Shan'ani mengomentari hadits di atas menyatakan: (Hadis ini menjadi dalil bagi keharaman perempuan menjadi pemimpin/diserahi urusan hukum yang menyangkut masalah publik kaum muslimin meskipun pembuat syari'at (Rasulullah) menetapkan kepemimpinan mereka di rumah suaminya). Lebih lanjut lihat, Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam* juz 4 (Beirut: Darul Ihya al-Turats, 1379), hal. 123. Bandingkan pula dengan Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Baari* juz 13 (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 1379), hal. 56., lihat pula, Ibn Katsir al-Dimasqi, *Tafsir Ibn Katsir* juz 13 (Beirut: Daar al-Fikr, 1401), hal. 492.

Pendapat at-Thabari mewakili ulama klasik merupakan pendapat minoritas di tengah hegemoni pendapat mainstream yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun demikian, peta pendapat ulama yang berbeda dalam masalah krusial ini mengandaikan telah terjadi perdebatan akademik yang produktif dan toleran, tanpa harus memunculkan sikap *truth claim* dengan semangat fanatisme yang parsial dan penuh kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Dari perbedaan pendapat ini juga menginformasikan bahwa kontroversi tentang kepemimpinan perempuan adalah isu klasik, tetapi selalu aktual.

Para ulama yang mentolerir kebolehan wanita diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah Ushul Fiqh, suatu nash baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni :

- a. Secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
- b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahy*.
- c. Nash mengandung ancaman (*uqubah*).
- d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan¹⁴.

¹⁴ Tajuddin Abd. Wahhab bin al-Subkiy, *Matn Jam' al-Jawami'* dalam *Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1982 M), h. 80; Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1406)

BAB III

KONDISI EXISTING POLITIK PEREMPUAN DI KOTA TANJUNGPINANG

3.1. Demografi Tanjungpinang

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 sebanyak 207.057 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dari 4 (empat) Kecamatan yang ada jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur diikuti Kecamatan Bukit Bestari.

Tabel 1
Demografi Kota Tanjungpinang 2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2015	2016
Bukit Bestari	58978	59811
Tanjungpinang Timur	79513	80984
Tanjungpinang Kota	17561	17648
Tanjungpinang Barat	46163	46292
Kota Tanjungpinang	202215	204735

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2018.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Berikut adalah tabel yang menunjukkan komposisi penduduk Kota Tanjungpinang dilihat berdasarkan dari Jenis Kelamin;

Tabel 2

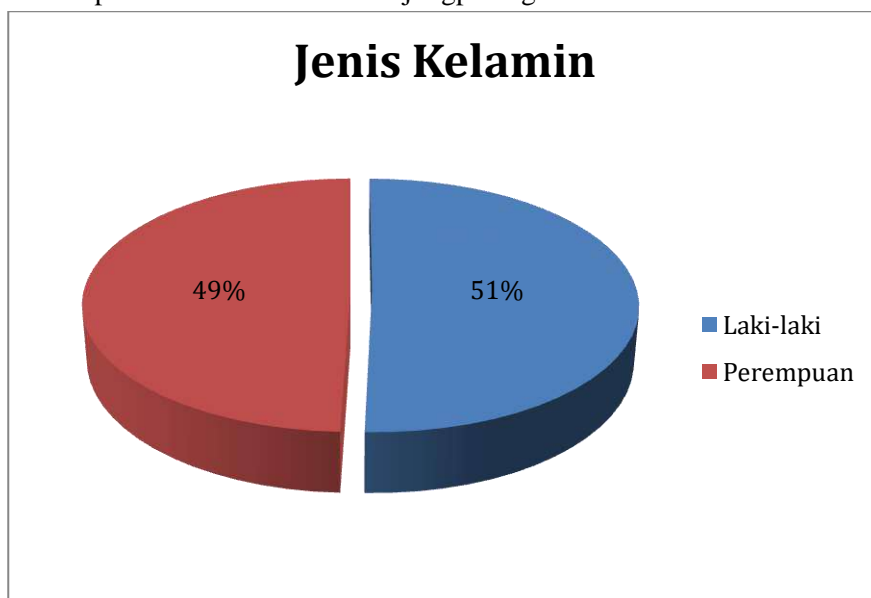
Komposisi penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur <i>Age Goup</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 - 4	10.090	9.535	19.625
2	5 - 9	10.936	10.395	21.331
3	10 - 14	9.881	9.627	19.508
4	15 - 19	7.957	7.502	15.459
5	20 - 24	6.237	6.151	12.388
6	25 - 29	8.459	9.537	17.996
7	30 - 34	9.559	10.063	19.622
8	35 - 39	9.663	9.500	19.163
9	40 - 44	8.484	8.076	16.560
10	45 - 49	7.037	6.391	13.428
11	50 - 54	5.340	4.672	10.012
12	55 - 59	3.740	3.642	7.382
13	60 - 64	2.530	2.440	4.970
14	65 +	3.852	3.709	7.291
Jumlah / Total		103.495	101.24	204.735

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Tanjungpinang sebanyak **102.331** jiwa atau sebesar 51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak **99.884** jiwa atau sebesar 49%.

Grafik 1
Komposisi Penduduk Kota Tanjungpinang Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data diolah, 2018.

3.2. Komposisi Pemilih Kota Tanjungpinang

Guna memberikan gambaran atas kondisi politik di Kota Tanjungpinang, terlebih dahulu kami informasikan jumlah pemilih secara keseluruhan sebanyak 144.693 pemilih. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 72.162 pemilih laki-laki dan sebanyak 72.531 pemilih perempuan. Sedangkan untuk Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) bagi anggota DPRD Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2014 sebesar 3065.

Sebelum kita melihat peta politik perempuan di Kota Tanjungpinang, khususnya untuk pengisian posisi wakil rakyat di DPRD Kota Tanjungpinang, tim peneliti terlebih dahulu akan membahas pembagian Daerah Pemilihan atau Dapil serta komposisi jumlah pemilih pada masing-masing Daerah Pemilihan. Data yang disajikan adalah data yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 yang lalu.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Tanjungpinang terbagi menjadi 3 Dapil dengan alokasi sebanyak 30 kursi untuk DPRD Kota Tanjungpinang. Daerah Pemilihan merupakan istilah umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan. Daerah pemilihan juga menjadi dasar dalam penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Berikut informasi terkait dengan sebaran pemilih dan alokasi kursi dimasing-masing daerah pemilihan;

Tabel 3

Alokasi dan Distribusi Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Tanjungpinang Barat	4	105	19.160	19.616	38.776	Dapil I 11 kursi
2	Tanjungpinang Kota	4	41	8.245	7.815	16.060	
3	Tanjungpinang Timur	5	130	25.043	25.066	50.109	Dapil II 11 kursi
4	Bukit Bestari	5	109	19.714	20.034	39.748	Dapil III 8 kursi
Total		18	385	72.162	72.531	144.693	30 kursi

Sumber: KPU Kota Tanjungpinang, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tanjungpinang memiliki 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur, dan Bukit Bestari. Untuk daerah pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang terbagi menjadi III (tiga) Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan I dengan alokasi 11 kursi terdiri dari Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Daerah Pemilihan II dengan alokasi 11 kursi terdiri dari Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Daerah pemilihan III dengan alokasi 8 kursi terdiri dari Kecamatan Bukit Bestari.

Kecamatan Tanjungpinang Barat terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 38.776 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 19.160 pemilih laki-laki dan 19.616 pemilih perempuan. Kecamatan Tanjungpinang Kota terdiri dari 4 (empat) Kelurahan dengan jumlah

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

pemilih sebanyak 16.060 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 8.245 pemilih laki-laki dan 7.815 pemilih perempuan.

Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 50.109 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 25.043 pemilih laki-laki dan 25.066 pemilih perempuan. Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki alokasi kursi sebanyak 11 kursi untuk DPRD Kota Tanjungpinang.

Kecamatan Bukit Bestari terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 39.748 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 19.714 pemilih laki-laki dan 20.034 pemilih perempuan. Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki alokasi kursi sebanyak 8 kursi untuk DPRD Kota Tanjungpinang. Dengan demikian maka jumlah kursi untuk DPRD Kota Tanjungpinang sebanyak 30 kursi.

Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 terdapat 12 (dua belas) Partai Politik yang ikut kontestasi di Kota Tanjungpinang. Kedua belas partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Berikut nama partai dan lambang partai yang ikut dalam kontestasi pada Pemilihan Umum tahun 2014 di Tanjungpinang.

Gambar 1

Nama dan Logo Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tanjungpinang



Sumber: KPU Kota Tanjungpinang, 2018.

3.3. Peta Politik Untuk DPRD Provinsi

Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus ini tidak terlepas dari posisi geografis dan posisi strategis Tanjungpinang yang berada di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4
Daftar Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang
Hasil Pemilu 2014

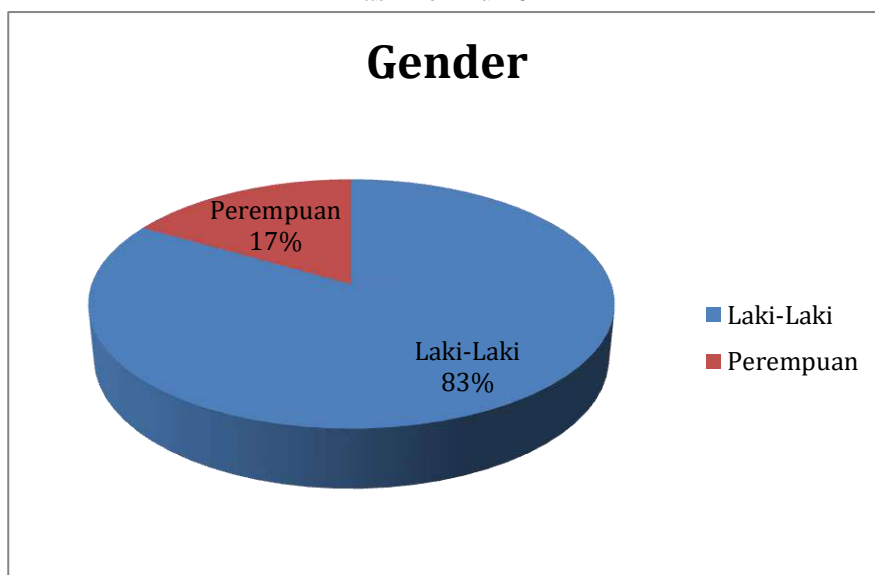
NO	NAMA	PARPOL	JENIS KELAMIN	SUARA
1	Yuniarni Pustoko Weni	PDIP	Perempuan	10.598
2	Teddy Jun Askara	Golkar	Laki-laki	6.727
3	Husnizar Hood	Demokrat	Laki-laki	5.144
4	Syarafuddin Aluan	PPP	Laki-laki	6.190
5	Rudy Chua	Hanura	Laki-laki	10.454

Sumber: Data KPU, 2014.

Dari tabel diatas diketahui bahwa alokasi kursi DPRD Provinsi dari Daerah pemilihan Kota Tanjungpinang terdapat 5 (lima) kursi. Dari ke-lima kursi yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh komposisi kursi anggota dewan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 diisi oleh partai-partai besar. Kelima partai tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1 (satu) kursi, Partai Golkar 1 (satu) kursi, Partai Demokrat 1 (satu) kursi, Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) kursi dan Partai Hati Nurani Rakyat 1 (satu) kursi.

Dari ke-lima anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili daerah pemilihan Kota Tanjungpinang, terdapat sebanyak 17% Perempuan dan 83% laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam diagram dibawah ini;

Grafik 2
Komposisi Gender Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Hasil Pemilu 2014



Sumber: Data KPU yang diolah, 2018.

3.4. Peta Politik Untuk DPRD Kota Tanjungpinang

Dalam Pemilihan Umum legislatif tahun 2014, terdapat pemilih sebanyak 144.693 jiwa. Jumlah pemilih tersebut diperebutkan untuk mengisi 30 kursi di DPRD Kota Tanjungpinang. Dari sejumlah nama yang ikut dalam kontestasi pada Pemilihan Umum tahun 2014, berikut nama-nama calon anggota legislatif yang terpilih berikut asal partai masing-masing;

Tabel 5
Daftar Calon Legeslatif Terpilih Pemilu Kota Tanjungpinang 2014

NO	NAMA	PARTAI	JK	SUARA SAH
Dapil I (Tg.pinang Kota dan Tg.pinang Barat)				
1	Hendy Amerta	PKS	Laki-Laki	801
2	Suparno	PDIP	Laki-Laki	1.412
3	Boorman Sirait	PDIP	Laki-Laki	1.245

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

NO	NAMA	PARTAI	JK	SUARA SAH
Dapil I (Tg.pinang Kota dan Tg.pinang Barat)				
4	Ade Angga	Golkar	Laki-Laki	1.655
5	Simon Awantoko	Golkar	Laki-Laki	834
6	Maiyanti	Gerindra	Perempuan	735
7	Ginta Asmara	Demokrat	Laki-Laki	1.162
8	Rosiani	PPP	Perempuan	810
9	Fengky Fesianto	Hanura	Laki-Laki	2.272
10	Ahmad Dani	Hanura	Laki-Laki	876
11	Beni	PKPI	Laki-Laki	1.400
Dapil II (Tanjungpinang Timur)				
12	Ismiyati	PKS	Perempuan	1.206
13	Muhammad Syahrial	PDIP	Laki-Laki	930
14	Rahma	PDIP	Perempuan	2.046
15	Petrus Marulak S.	PDIP	Laki-Laki	1.194
16	Ashady Selayar	Golkar	Laki-Laki	955
17	Hotasi Silitonga	Gerindra	Laki-Laki	695
18	Maskur Tilawahyu	Demokrat	Laki-Laki	700
19	Rika Adrian	PAN	Perempuan	984
20	Hasan	PPP	Laki-Laki	586
21	Said Inderi	Hanura	Laki-Laki	540
22	Agung Triyanto	PKPI	Laki-Laki	910
Dapil III (Bukit Bestari)				
23	Muhammad Arif	PKS	Laki-Laki	662
24	Agus Djurianto	PDIP	Laki-Laki	2.463
25	Mangasa Leo	PDIP	Laki-Laki	991
26	Mimi Betty W.	Golkar	Perempuan	797
27	Ilimar	Gerindra	Laki-Laki	1.235
28	Pepy Candra	Demokrat	Perempuan	852
29	Syaiful Bahri	PAN	Laki-Laki	770
30	Reni	Hanura	Perempuan	1.755

Sumber: Data diolah dari KPU Kota Tanjungpinang, 2018.

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa komposisi kursi anggota DPRD Kota Tanjungpinang sebanyak 7 (tujuh) kursi dimiliki oleh PDIP diikuti oleh Partai Golkar sebanyak 4 (empat) kursi. Urutan ketiga yaitu Partai Hanura sebanyak 4 (empat) kursi diikuti oleh Partai Demokrat sebanyak 3 kursi.

BAB IV

METODELOGI PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian terkait dengan tema “Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum 2014” ini dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini berlangsung pada bulan Maret hingga bulan Juni 2018. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan April dan Mei tahun 2018.

4.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Memilih suatu kaedah dalam penelitian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, biasanya mempertimbangkan beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran keuangan, keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu dan kesediaan responden untuk mengisi angket serta kemampuan dari tim peneliti.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana orientasi politik pemilih perempuan terhadap kandidasi perempuan dalam pemilihan umum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemilih perempuan tidak memilih kandidat perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang. Secara umum ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari jawaban responden melalui angket

penelitian dan wawancara serta data sekunder yang berasal dari penelusuran beberapa dokumen diantaranya laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Mengingat bahwa fokus kajian ini menitikberatkan pada orientasi politik pemilih perempuan terhadap kandidasi perempuan di Kota Tanjungpinang, maka populasi dan sampel adalah perempuan yang telah menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun 2014. Berdasarkan data DPT KPU Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana yang tertera di Tabel 3 bahwa jumlah total pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang sebanyak 72.162 orang. Dalam penelitian ini jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi diatas maka diperoleh sampel sebanyak 382 orang (Krejcie & Morgan, 1970).

Kawasan kajian terdiri dari 18 kelurahan sehingga jumlah sampel dibagi 18 (delapan belas) titik/point. Dengan demikian maka setiap kelurahan akan dipilih secara random sebanyak 21 (dua puluh satu) responden. Selanjutnya jumlah sampel setiap kelurahan akan dibagi pula sesuai dengan jumlah RT yang ada. Guna mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini melibatkan enumerator sebanyak 18 (delapan belas) orang dan setiap enumerator bertanggungjawab terhadap 1 (satu) kelurahan. Dengan demikian maka masing-masing enumerator mendistribusikan sebanyak 21 (dua puluh satu) angket kepada 21 (dua puluh satu) responden perkelurahan.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner/angket. Kuesioner atau angket merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari responden. Penggunaan kuesioner dapat meningkatkan ketepatan data penelitian. Kelebihan menggunakan kuesioner ialah bisa menghasilkan item-item yang konsisten dan dapat dipercayai (Cartes 1985). Di samping itu,

penggunaan kuesioner juga dapat memberikan pen-sampel-an yang lebih tepat karena ia dapat meliputi sampel yang lebih besar (Oppenheim 1983).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan seperangkat angket/kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) bagian. Bagian pertama terdiri dari identitas responden, bagian kedua terdiri dari Pengetahuan Mengenai Partai Peserta Pemilu, bagian ketiga terdiri dari Variabel Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan yang berisi 17 (tujuh belas) item pertanyaan, bagian keempat terdiri dari variabel Prioritas Program yang akan dilakukan/diperjuangkan oleh kandidasi, dan bagian kelima adalah variabel tentang Kriteria Calon Pemimpin Dalam Pemilihan Umum yang terdiri dari 17 item pertanyaan.

4.5. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data

Analisis kebolehpercayaan (Reliabilitas) dan kesahan (Validitas) instrumen menentukan kualitas instrumen kajian. Menurut Lim Chong Hin (2007), kebolehpercayaan diartikan sebagai ketekalan skor yang diterima oleh individu yang sama apabila diberikan ujian yang sama dalam masa yang berlainan. Menurut Babbie (2000) pula, sesuatu alat ukuran boleh dipercayai sekiranya bisa mengukur subjek yang sama dan mempunyai nilai yang sama jika digunakan berulang-kali. Kebolehpercayaan dilihat dari nilai *Alpha Cronbach* (Lihat Tabel 6). Kesahan instrumen pula adalah tingkat kemampuan angket mampu mengukur apa yang hendak diukur (Cronbach & Mechl 1955) yang diuji dengan menggunakan uji korelasi *product moment*.

Tabel 6

Nilai Alpha Cronbach dan Kebolehpercayaan Instrument

Nilai Alpha Cronbach	Kebolehpercayaan
Kurang dari 0,60	Lemah
0,60 – 0,80	Bisa diterima
Lebih dari 0,80	Baik

Sumber: Disesuaikan dari Sekaran (1992).

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Dalam Tabel 6 di atas, Sekaran (1992) menyatakan bahwa nilai *alpha Cronbach* lebih dari 0,80 adalah baik. Sedangkan nilai *alpha Cronbach* diantara 0,60 sampai 0,80 adalah bisa diterima. Alat ukur dianggap mempunyai kebolehpercayaan yang lemah apabila mempunyai nilai *alpha Cronbach* kurang dari 0,60.

Pilot test dalam penelitian ini telah dijalankan pada tanggal 10 April 2018 sampai 20 April 2018 yang melibatkan sebanyak 30 responden.

4.5.1 Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan.

Untuk mengetahui tingkat kecenderungan pemilih perempuan dalam pemilihan umum tahun 2014, maka tingkat kebolehpercayaan diukur dengan *alfa cronbach* sebesar 0.786 dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 17 item.

Tabel 7
Uji Reliabilitas Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,878	17

Dengan menggunakan kaedah *alfa cronbach* menunjukkan bahwa pengukuran Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan berada level kebolehpercayaan yang baik yaitu $\alpha=0,786$. Indeks ini bermakna bahwa angket yang mengukur Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan adalah sesuai digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8
Uji Validitas Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan

Pernyataan	Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan		Keterangan
	<i>r</i>	Sig.	
Saya memilih calon dalam pemilu/pileg/pilgub/pilwako yang memiliki ideologi perjuangan sama tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan	,382*	,037	Valid
Wanita memiliki lebih banyak keterbatasan dan kelemahan menjadi pemimpin berbanding laki-laki	,598**	,000	Valid
Laki-laki tampan (ganteng) memiliki daya tarik tersendiri untuk saya pilih ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako	,477**	,008	Valid
Yang paling saya kenal dengan baik akan saya pilih dalam pemilu/pileg/pilgub/pilwako tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan	,388*	,034	Valid
Saya memilih calon yang se-suku dengan saya tanpa melihat apakah ia laki-laki atau perempuan	,784**	,000	Valid
Saya memilih calon yang diusung oleh partai idola saya walaupun calon tersebut laki-laki	,782**	,000	Valid
Saya yakin dengan ajaran agama saya bahwa yang paling layak menjadi pemimpin adalah laki-laki	,692**	,000	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako yang paling taat mengamalkan agama	,544**	,002	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran dari Suami	,630**	,000	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan himbauan dari tokoh Agama	,695**	,000	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan rekomendasi dari tokoh masyarakat yang saya kagumi	,706**	,000	Valid

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Pernyataan	Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan		Keterangan
	<i>r</i>	Sig.	
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran Teman Kerja	,730**	,000	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran dari jiran/tetangga	,697**	,000	Valid
Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran Kampus/Sekolah	,643**	,000	Valid
Tidak ada jaminan jika saya memilih calon perempuan pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako bahwa ia akan memperjuangkan hak saya sebagai warga	,391*	,033	Valid
Calon yang saya pilih ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako adalah yang memiliki hubungan keluarga dengan saya	,529**	,003	Valid
Saya tidak tertarik dengan calon perempuan ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako karena sudah banyak bukti bahwa perempuan gagal menjadi pemimpin	,410*	,024	Valid

Dengan menggunakan kaedah korelasi *product moment*, Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa hasil uji validitas terhadap Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan secara keseluruhan menunjukkan indeks yang kuat. Terdapat item memiliki tanda 1 bintang dan 2 bintang. Semua item adalah valid.

4.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Prioritas Program Pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat kebolehpercayaan terhadap variabel prioritas pembangunan, maka dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini;

Tabel 9
Uji Reliabilitas Prioritas Program Pembangunan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,989	13

Dengan menggunakan kaedah *alfa cronbach* menunjukkan bahwa pengukuran Prioritas Program Pembangunan berada level kebolehpercayaan yang sangat baik yaitu $\alpha=0,989$. Indeks ini bermakna bahwa angket yang mengukur Prioritas Program Pembangunan adalah sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10
Uji Validitas Prioritas Program Pembangunan

Pernyataan	Prioritas Program Pembangunan		Keterangan
	<i>r</i>	Sig.	
Membangun Infrastruktur (jalan, jembatan, dsb)	,902**	,000	Valid
Membuka lapangan pekerjaan	,960**	,000	Valid
Menurunkan biaya hidup	,868**	,000	Valid
Memberantas korupsi	,948**	,000	Valid
Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi	,927**	,000	Valid
Tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	,965**	,000	Valid
Menurunkan angka kriminalitas	,930**	,000	Valid
Menyediakan perumahan yang murah	,933**	,000	Valid
Memperbaiki pengelolaan sampah	,945**	,000	Valid
Menyediakan fasilitas keagamaan	,971**	,000	Valid
Meningkatkan program pemberdayaan fakir & miskin	,961**	,000	Valid
Cepat tanggap terhadap bencana alam (asap, banjir, longsor, dsb)	,968**	,000	Valid
Memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik	,941**	,000	Valid

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Dengan menggunakan kaedah korelasi *product moment*, Tabel 10 diatas menunjukkan uji validitas Prioritas Program Pembangunan secara keseluruhan menunjukkan indeks yang kuat dan semua item adalah valid.

4.5.3 Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Kriteria Calon Pemimpin

Untuk mengetahui tingkat kebolehpercayaan terhadap variabel kriteria calon pemimpin, maka dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini;

Tabel 11
Uji Reliabilitas Kriteria Calon Pemimpin

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,985	17

Dengan menggunakan kaedah *alfa cronbach*, maka tabel 11 diatas menunjukkan bahwa pengukuran Kriteria Calon Pemimpin berada level kebolehpercayaan yang sangat baik yaitu $\alpha=0,985$. Indeks ini bermakna bahwa angket yang mengukur Kriteria Calon Pemimpin adalah sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini. Berikut uji validitas untuk masing-masing item pertanyaan yang diajukan kepada responden;

Tabel 12
Uji Validitas Kriteria Calon Pemimpin

Pernyataan	Kriteria Calon Pemimpin		Keterangan
	<i>r</i>	Sig.	
Memiliki Kemampuan Memimpin dan profesional	,906**	,000	Valid
Bersih dari Korupsi	,931**	,000	Valid
Mencintai dan Peduli Rakyat Miskin	,873**	,000	Valid

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Pernyataan	Kriteria Calon Pemimpin		Keterangan
	<i>r</i>	Sig.	
Moncontohkan kesederhanaan Hidup	,885**	,000	Valid
Taat Beragama (memiliki ciri-ciri orang sholeh)	,896**	,000	Valid
Memiliki Prestasi Yang patut dibanggakan	,880**	,000	Valid
Sangat Mengetahui kebutuhan rakyat Kepulauan Riau	,933**	,000	Valid
Tegas dan Berani Menegakkan Hukum	,937**	,000	Valid
Peduli dengan pengembangan Budaya Melayu	,936**	,000	Valid
Mampu merangkul semua pihak untuk mempercepat pembangunan	,885**	,000	Valid
Memiliki Kharisma dan Wibawa Sebagai Pemimpin	,922**	,000	Valid
Memiliki Pengalaman Sebagai Pemimpin	,730**	,000	Valid
Tidak terlibat skandal yang mencemarkan nama baik	,964**	,000	Valid
Sangat Peduli dengan aspek pendidikan	,954**	,000	Valid
Memiliki sifat amanah (tidak khianat)	,949**	,000	Valid
Melakukan pemerataan pembangunan	,851**	,000	Valid
Mampu Meningkatkan pendapatan asli daerah	,942**	,000	Valid

Dengan menggunakan kaedah korelasi *product moment*, maka Tabel 12 diatas menunjukkan uji validitas Kriteria Calon Pemimpin secara keseluruhan menunjukkan indeks yang kuat dan semua item adalah valid.

4.6. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan simpulan yang akurat, maka tim peneliti menggunakan analisis data secara statistik. Data yang dianalisis secara statistik selanjutnya di deskriptifkan setelah diolah menggunakan fungsi *pivot table Microsoft Excel* untuk menghasilkan frekuensi, persentase dan tabel silang antar variable dalam kuisioner. Data-data tersebut kemudian

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

divisualisasikan dengan software Quantum GIS (QGIS) versi 2.18 pada peta batas kelurahan Tanjungpinang untuk mendukung analisa geospasial. Batas kelurahan menggunakan *template shape file* (SHP) kelurahan yang bersumber dari data Potensi Desa (PODES) Biro Pusat Statistik (BPS) 2014.

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS

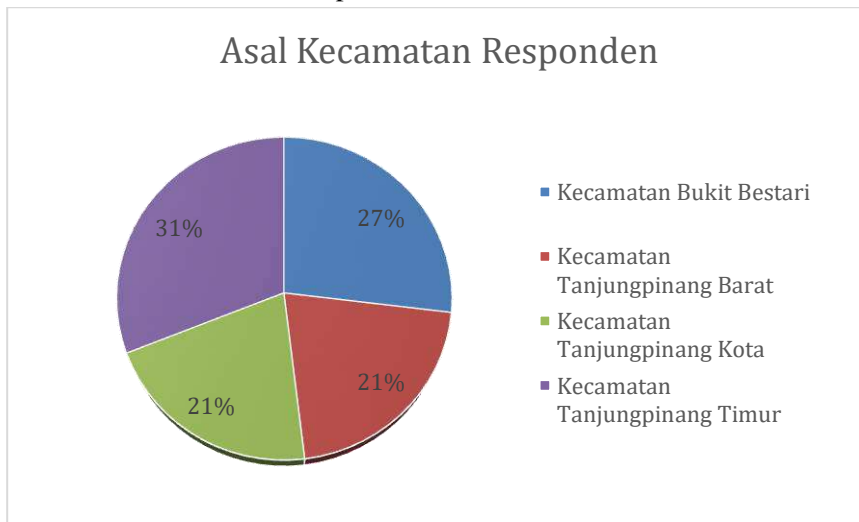
5.1. Karakteristik Responden

Responden dalam kajian dengan tema Orientasi Politik Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum mengambil lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang dalam kasus Pemilihan Umum Tahun 2014 berjumlah 416 orang. Responden terpilih adalah ibu-ibu atau perempuan yang berdomisili di Tanjungpinang dan telah menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum tahun 2014. Masing-masing responden diwawancara dengan tatap muka langsung untuk memastikan bahwa responden benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan.

5.1.1 Domisili Responden Berdasarkan Lokasi Kecamatan

Dari 416 responden yang mengisi angket dan diinput dengan aplikasi google form, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan pivot tabel Microsoft Excel. Berikut karakteristik responden berdasarkan domisili masing-masing responden dilihat dari administrasi Kecamatan.

Grafik 3
Domisili Responden Berdasarkan Kecamatan



Sumber: Data diolah, 2018.

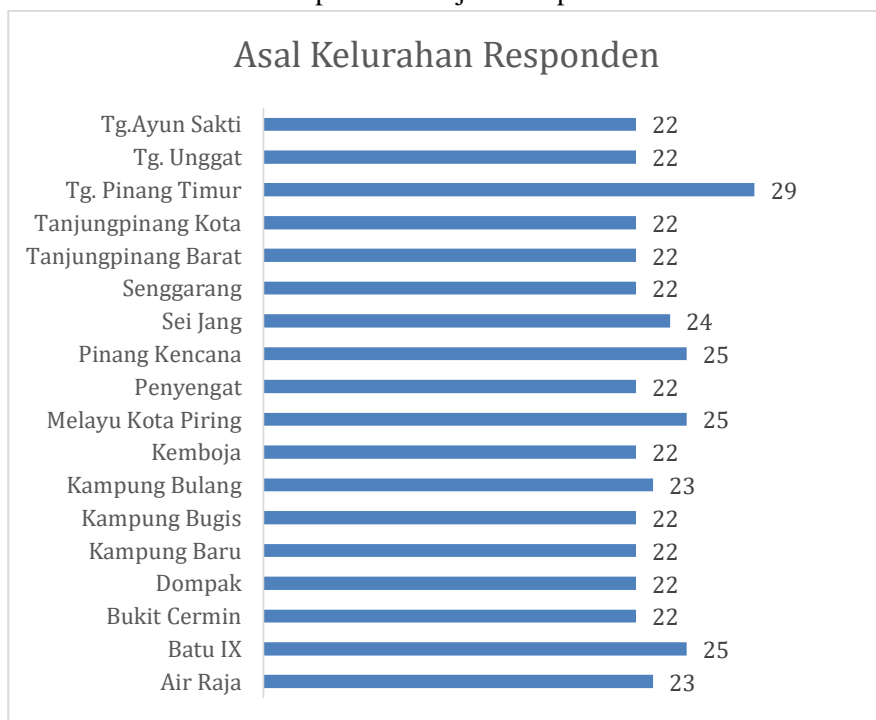
Dari bagan 3 diatas terlihat bahwa distribusi responden merata di 4 Kecamatan yang ada di Tanjungpinang. Sebanyak 27% responden berdomisili di Kecamatan Bukit Bestari, 21% berdomisili di Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Kota serta 31% berdomisili di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

5.1.2 Domisili Responden Berdasarkan Kelurahan

Informasi terkait dengan domisili responden tergambar pada Grafik 5 dibawah ini. Dari grafik tersebut dapat digambarkan jumlah dan asal masing-masing responden berdasarkan Kelurahan. Jumlah minimum responden sesuai dengan metodologi yang diterapkan adalah sebanyak 382 orang, sehingga jika dibagi atas 18 (delapan belas) Kelurahan,

maka jumlah responden minimum per-Kelurahan sebanyak 22 orang.

Grafik 4
Komposisi Pekerjaan Responden



Sumber: Data diolah, 2018.

Dari grafis 5 diatas terlihat bahwa responden terbanyak berasal dari Kelurahan Tanjungpinang Timur sebanyak 29 orang disusul responden yang berdomisili di Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Melayu Kota Piring dan Kelurahan Batu IX masing-masing sebanyak 25 responden. Jumlah responden terbanyak selanjutnya yaitu sebanyak 24 responden yaitu di Kelurahan Sei Jang. Responden terbanyak berikutnya yaitu sebanyak 23 orang berada di Kelurahan Air

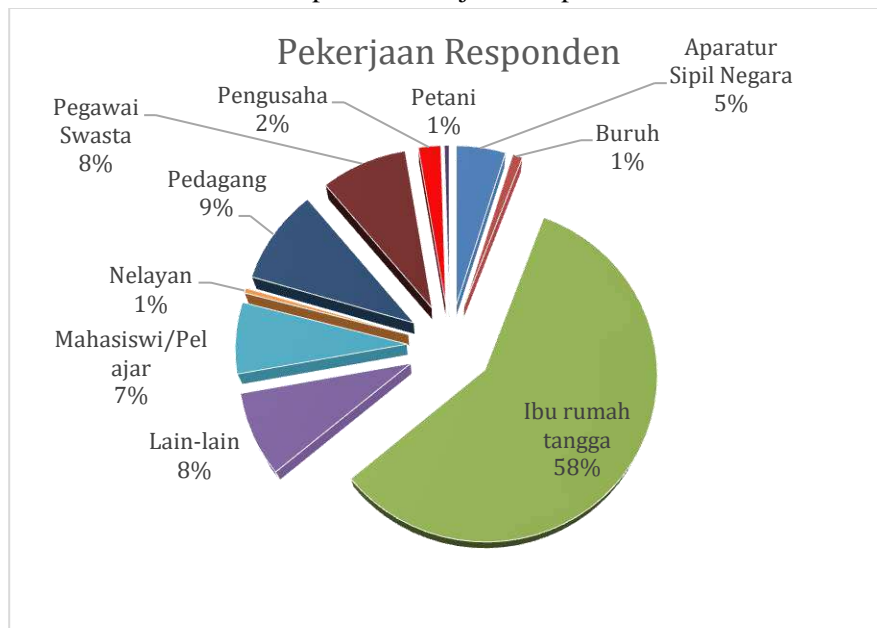
Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Raja dan Kelurahan Kampung Bulang. Sedangkan sisanya yaitu masing-masing 22 responden berada di 11 (sebelas) kelurahan lainnya.

5.1.3 Pekerjaan Responden

Meskipun ada anggapan bahwa perempuan melaksanakan urusan domestik yang berakhiran “UR” yaitu dapur, sumur dan kasur, namun kenyataannya dalam penelitian ini peneliti menemukan distribusi pekerjaan responden yang cukup bervariasi. Berikut bagan yang menunjukkan distribusi sebaran pekerjaan responden.

Grafik 5
Komposisi Pekerjaan Responden



Sumber: Data diolah, 2018.

Dari bagan 4 diatas dapat diketahui bahwa komposisi pekerjaan responden cukup bervariasi. Pekerjaan mayoritas

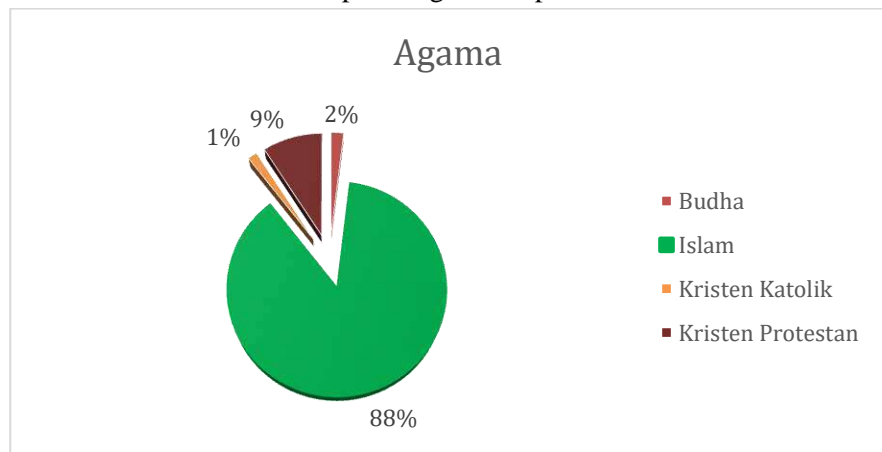
Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

responden adalah ibu rumah tangga sebesar 58% diikuti profesi pedagang dan pegawai swasta masing-masing 9% dan 8%. Masih sedikit profesi responden yang menuntut jiwa “challenge”.

5.1.4 Agama Responden

Dari hasil survei diperoleh bahwa agama responden didominasi oleh agama Islam sebesar 88%. Keberadaan agama Islam yang mayoritas dipeluk oleh responden tidak terlepas dari sejarah Kota Tanjungpinang yang menjadi salah satu pusat kebudayaan melayu. Budaya melayu identik dengan budaya Islam. Berikut bagan yang menunjukkan distribusi agama responden dalam penelitian ini.

Grafik 6
Komposisi agama responden



Sumber: Data diolah, 2018.

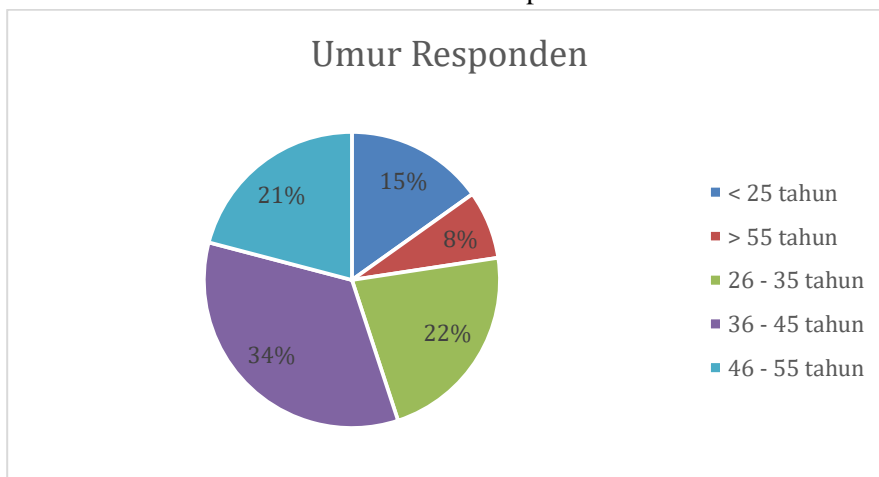
Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden beragama Islam sebanyak 88%. Responden berikutnya adalah responden yang memeluk agama Kristen Protestan sebanyak 9%, responden yang memeluk agama

Budha sebanyak 2 % dan responden yang memeluk agama Kristen Katolik sebanyak 1%.

5.1.5 Distribusi Umur Responden

Distribusi responden saat ini paling banyak didominasi oleh kisaran umur antara 36 hingga 45 tahun sebesar 34% diikuti oleh responden dengan usia antara 26 hingga 35 tahun sebesar 22% dan usia antara 46 hingga 55 tahun sebesar 21%. Sedangkan untuk usia responden kurang dari 25 tahun sebesar 15% dan usia diatas 55 tahun sebesar 1%. Lebih lengkap informasi terkait dengan distribusi pekerjaan responden dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

Grafik 7
Distribusi Umur Responden



Sumber: Data diolah, 2018.

Dari data diatas dapat dipastikan bahwa seluruh responden (mulai umur kurang dari 25 Tahun hingga umur diatas 55 tahun) semuanya memiliki hak pilih pada pemilihan umum tahun 2014 yang lalu. Dengan demikian maka syarat utama menjadi responden telah terpenuhi dan berhak

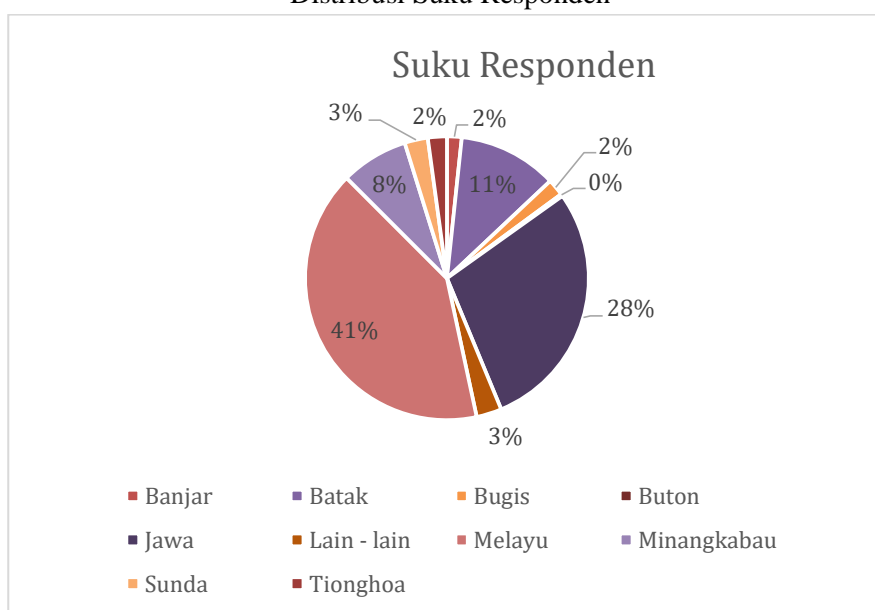
Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

memberikan jawaban atas item-item pertanyaan yang diajukan oleh enumerator.

5.1.6 Distribusi Suku Responden

Informasi responden berikutnya adalah terkait suku. Distribusi suku responden dapat dilihat dari diagram dibawah ini.

Grafik 8
Distribusi Suku Responden



Sumber: Data diolah, 2018.

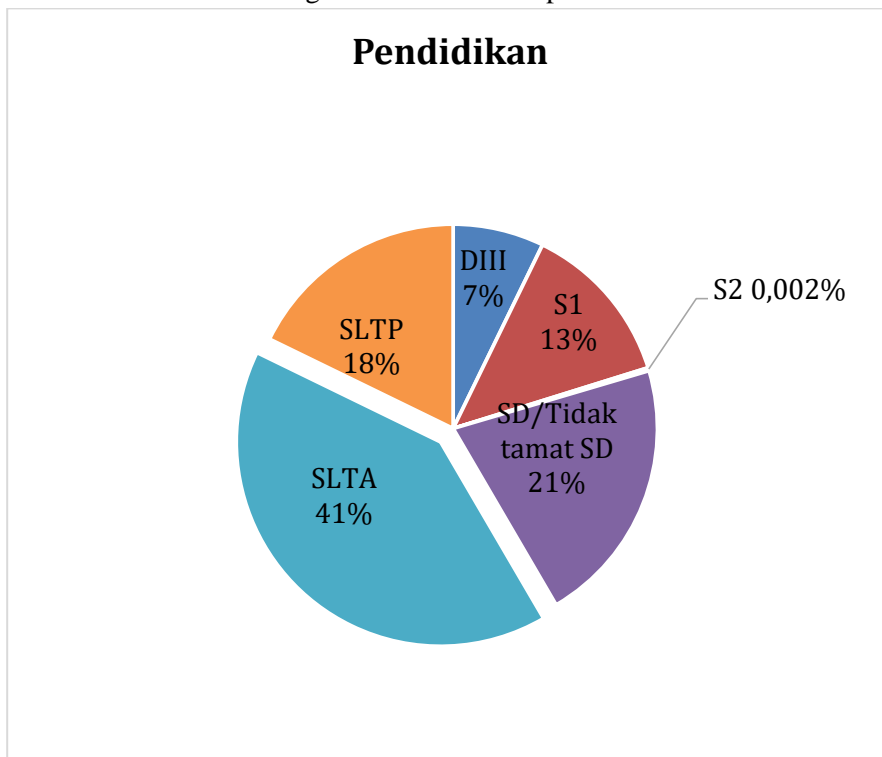
Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa sebesar 41% responden berafiliasi dengan suku Melayu diikuti responden yang berafiliasi dengan suku Jawa sebesar 28%. Afiliasi suku terbanyak ketiga yaitu suku Batak sebesar 11% dan Minangkabau sebesar 8%.

5.1.7 Tingkat Pendidikan Responden

Bagan 8 dibawah ini memberikan informasi terkait dengan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan responden didominasi tamatan SLTA sebanyak 41% responden diikuti tamat SD/tidak tamat SD sebanyak 21%, SLTP sebanyak 18%, S1 13%, serta DIII 7%. Responden dengan latar belakang Magister hanya sedikit terwakili dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 0,002% atau hanya 1 orang.

Grafik 9

Tingkat Pendidikan Responden

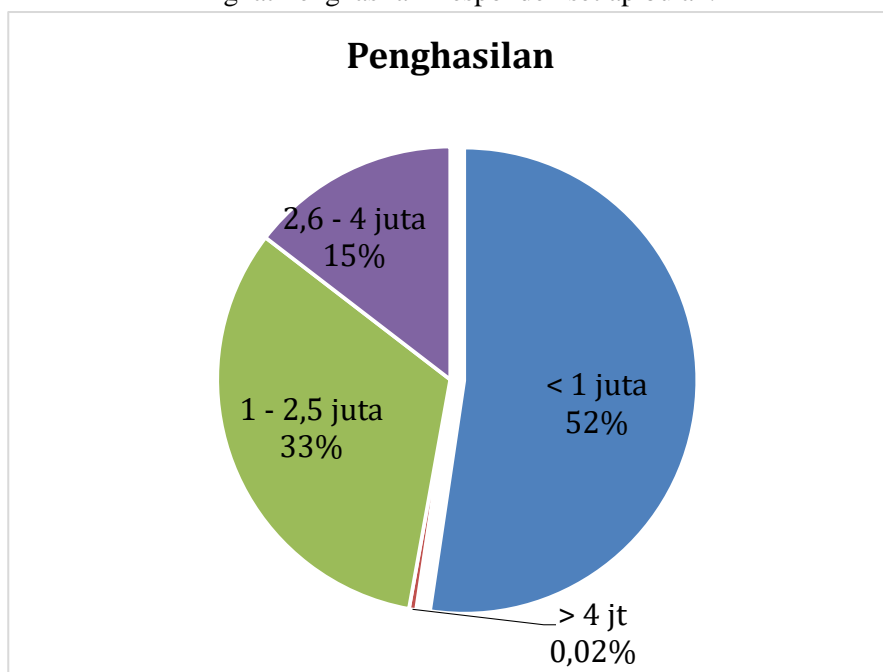


Sumber: Data diolah, 2018.

5.1.8 Tingkat Penghasilan Responden

Informasi responden berikutnya adalah yang terkait dengan pendapatan atau penghasilan. Tingkat penghasilan atau pendapatan responden dapat dilihat dari bagan dibawah ini.

Grafik 10
Tingkat Penghasilan Responden setiap bulan.



Sumber: Data diolah, 2018.

Dari bagan 9 diatas terlihat bahwa mayoritas penghasilan responden yang kurang dari 1 Juta Rupiah per bulan sebanyak 52% responden. Tingkat penghasilan terbesar kedua responden adalah dengan penghasilan antara 1 juta sampai dengan 2,5 juta Rupiah per bulan yaitu sebanyak 33%

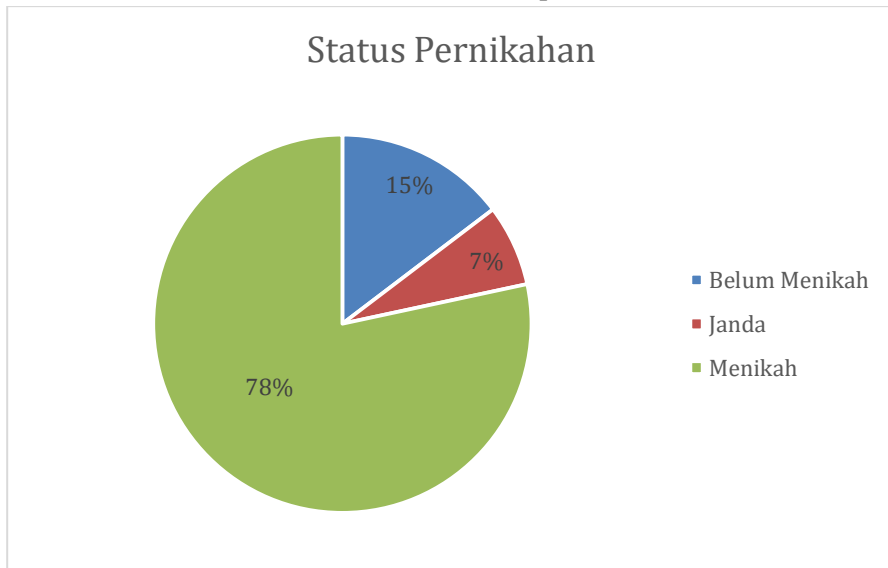
responden. Tingkat penghasilan terbanyak ketiga yaitu responden dengan penghasilan antara 2,6 juta hingga 4 juta rupiah per bulannya sebanyak 15%, dan tingkat penghasilan responden yang diatas 4 juta perbulan sebanyak 0,02% responden.

5.1.9 Status Pernikahan Responden

Status pernikahan responden adalah informasi yang didapat tim peneliti berikutnya. Dibawah ini adalah bagan yang menjelaskan status pernikahan responden. Dari bagan dibawah ini terlihat bahwa sebanyak 78% responden memiliki hubungan suami-istri atau sudah menikah. Sedangkan sebanyak 15% responden belum menikah dan sisanya adalah janda sebanyak 7%. Berikut bagan lengkap dari informasi terkait dengan status pernikahan responden.

Grafik 11

Status Perkawinan Responden

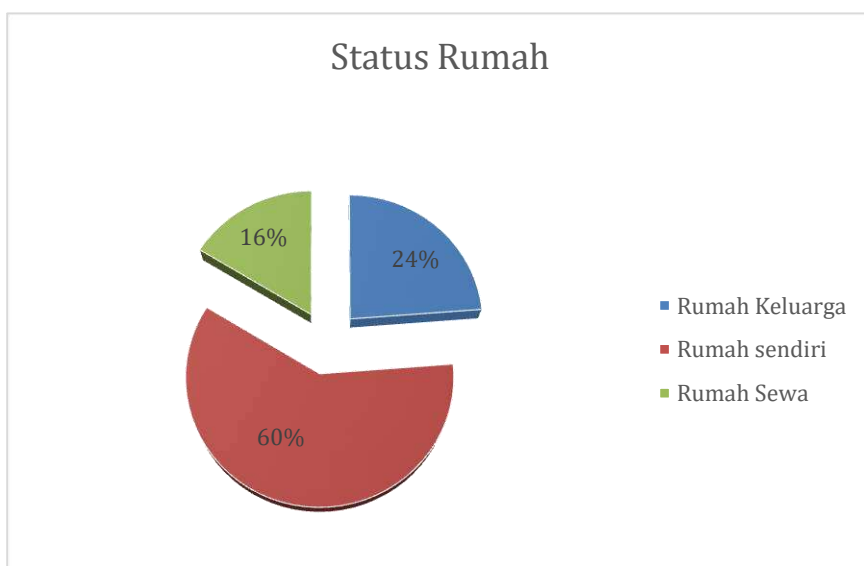


Sumber: Data diolah, 2018.

5.1.10 Status Kepemilikan Rumah Responden

Informasi berikutnya adalah terkait dengan status kepemilikan rumah responden. Berikut bagan yang menjelaskan status kepemilikan rumah responden.

Grafik 12
Status Kepemilikan Rumah Responden



Sumber: Data diolah, 2018.

Dari bagan 12 di atas terlihat bahwa Status Kepemilikan Rumah Responden mayoritas merupakan milik sendiri (60%), sebanyak 24% masih menumpang dengan keluarga dan selebihnya sebanyak 16% masih menyewa rumah.

5.2. Pertanyaan Mengenai Sikap Pemilih Perempuan Dalam Pemilu

5.2.1 Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Caleg Perempuan

Dalam setiap melakukan pemilihan, apalagi pemilihan umum, pengetahuan terhadap calon yang akan dipilih sangatlah penting. Dengan mengetahui calon yang

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

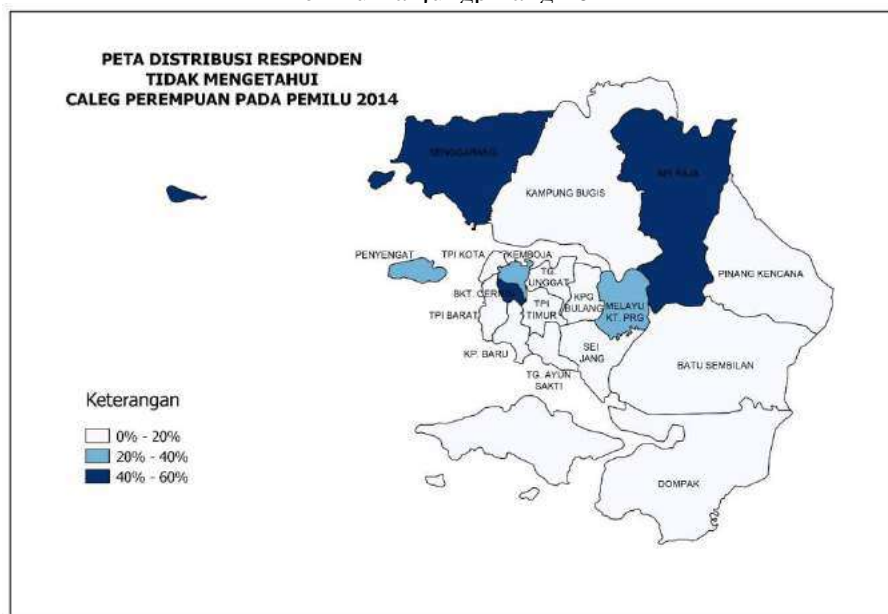
akan dipilih, pemilih tidak akan kecewa dengan pilihannya. Tabel 13 dan Gambar 2 menggambarkan tingkat pengetahuan responden terhadap keberadaan calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum.

Tabel 13
Pengetahuan Responden Terkait Ada Tidaknya Caleg Perempuan Pada
PEMILU 2014 di Tanjungpinang

NO	KELURAHAN	TIDAK TAHU	TAHU	TOTAL
1	Air Raja	52.17%	47.83%	100.00%
2	Batu IX	4.00%	96.00%	100.00%
3	Bukit Cermin	59.09%	40.91%	100.00%
4	Dompok	4.55%	95.45%	100.00%
5	Kampung Baru	0.00%	100.00%	100.00%
6	Kampung Bugis	4.55%	95.45%	100.00%
7	Kampung Bulang	8.70%	91.30%	100.00%
8	Kemboja	22.73%	77.27%	100.00%
9	Melayu Kota Piring	20.00%	80.00%	100.00%
10	Penyengat	22.73%	77.27%	100.00%
11	Pinang Kencana	16.00%	84.00%	100.00%
12	Sei Jang	0.00%	100.00%	100.00%
13	Senggarang	59.09%	40.91%	100.00%
14	Tanjungpinang Barat	4.55%	95.45%	100.00%
15	Tanjungpinang Kota	0.00%	100.00%	100.00%
16	Tg. Pinang Timur	3.45%	96.55%	100.00%
17	Tg. Unggat	0.00%	100.00%	100.00%
18	Tg. Ayun Sakti	4.55%	95.45%	100.00%
Grand Total		15.63%	84.38%	100.00%

Sumber: Data Olah, 2018.

Gambar 2
Peta Ketidaktahuan Pemilih Perempuan Terhadap Caleg Perempuan Pada Pemilu Tanjungpinang 2014



Sumber: Diolah, 2018

Dari tabel 13 di atas terlihat bahwa mayoritas responden (84,38%) mengetahui ada atau tidaknya calon anggota legislatif perempuan pada pemilu tahun 2014. Tingkat pengetahuan tertinggi responden berada di Kelurahan Kampung Baru, Sei Jang, Tanjungpinang Kota, dan di Kelurahan Tanjung Unggat. Sedangkan untuk tingkat pengetahuan responden terhadap adanya calon anggota legislatif terendah yaitu berada di Kelurahan Bukit Cermin dan Kelurahan Senggarang masing-masing sebesar 40.91% dan Kelurahan Air Raja sebesar 47.83%.

Jika dilihat dari faktor geografis (Gambar 2), maka responden yang tinggal di Kelurahan Bukit Cermin dan

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Kelurahan Air Raja menjadi anomali jika tingkat pengetahuannya terhadap calon rendah. Dikatakan anomali mengingat Kelurahan Air Raja dan Kelurahan Bukit Cermin berada di daerah perkotaan jika dibandingkan dengan Kelurahan Senggarang.

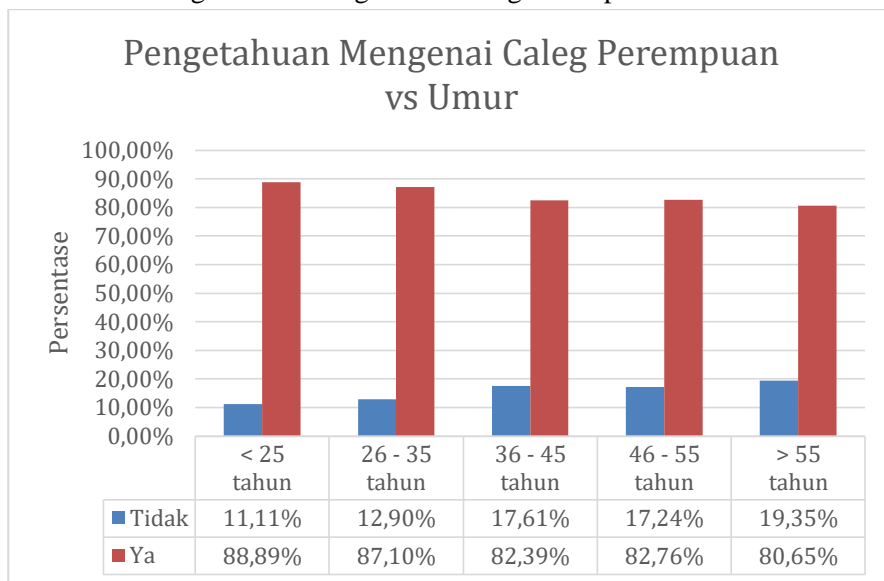
Selain faktor geografis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon yang akan dipilihnya. Adapun beberapa faktor lain selain faktor geografis yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih antara lain adalah faktor usia, faktor kesukaan, faktor pendidikan, faktor pendapatan, faktor status pernikahan, faktor status kepemilikan rumah, dan faktor status sosial.

1) Faktor Usia

Usia mempengaruhi tingkat pengetahuan responden terhadap calon anggota legislatif. Responden dengan tingkat usia kurang dari 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan terhadap calon anggota legislatif yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan responden dengan tingkat usia di atas 36 tahun. Berikut infografis yang menunjukkan tingkat pengetahuan terhadap calon anggota legislatif jika dilihat dari usia.

Grafik 13

Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Umur



Sumber: Data Olahan, 2018.

Dari grafik 11 di atas terlihat bahwa usia responden yang kurang dari umur 25 tahun memiliki tingkat pengetahuan terhadap calon anggota legislatif paling tinggi yaitu sebesar 88,89%. Untuk responden dengan tingkat usia antara 26 sampai dengan 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan 87,10%. Sedangkan untuk tingkat usia antara 36 sampai dengan 55 tahun memiliki tingkat pengetahuan sebesar 82,76%. Usia di atas 55 tahun memiliki tingkat pengetahuan terhadap calon anggota legislatif perempuan paling rendah yaitu sebesar 80,65%.

Dari tabel di atas maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa “tinggi rendahnya tingkat pengetahuan responden terhadap caleg perempuan ditentukan oleh tinggi rendahnya usia. Semakin tinggi tingkat usia responden maka

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

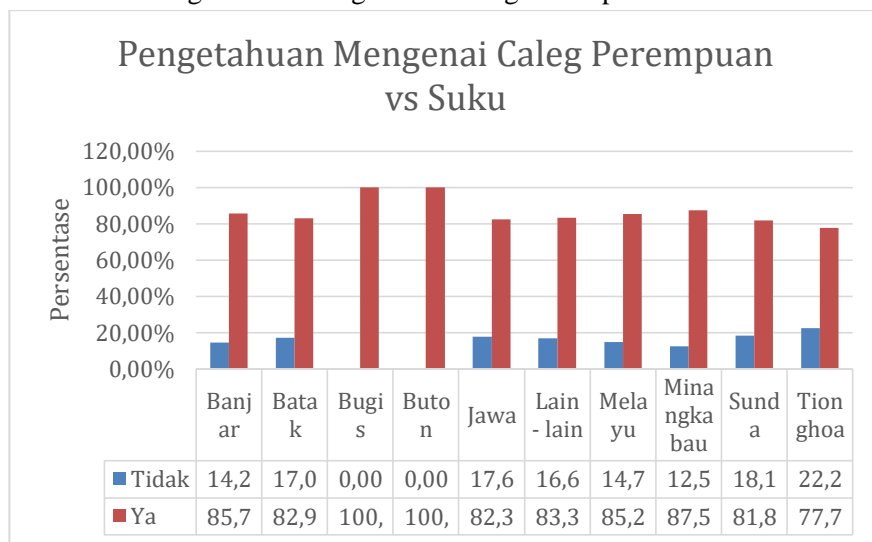
semakin rendah tingkat pengetahuan responden”. Kesimpulan sementara ini didasari dari minat serta kemampuan responden dalam menggunakan sosial media, membaca berita serta melakukan diskusi politik dengan rekan sejawat maupun dengan pihak-pihak lainnya.

2) Suku

Disamping geografis dan umum, faktor berikutnya yaitu suku. Dari 9 suku lebih yang ada dan tinggal serta memiliki hak pilih di Tanjungpinang, suku Bugis dan suku Buton memiliki tingkat pengetahuan terhadap Caleg perempuan paling tinggi. Sedangkan suku yang paling rendah dalam pengetahuan terhadap calon anggota legislatif adalah suku Tiong Hoa yaitu sebesar 77,78%. Informasi selengkapnya dapat dilihat dari grafik berikut;

Grafik 14

Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Suku



Sumber: Data Olahan, 2018.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

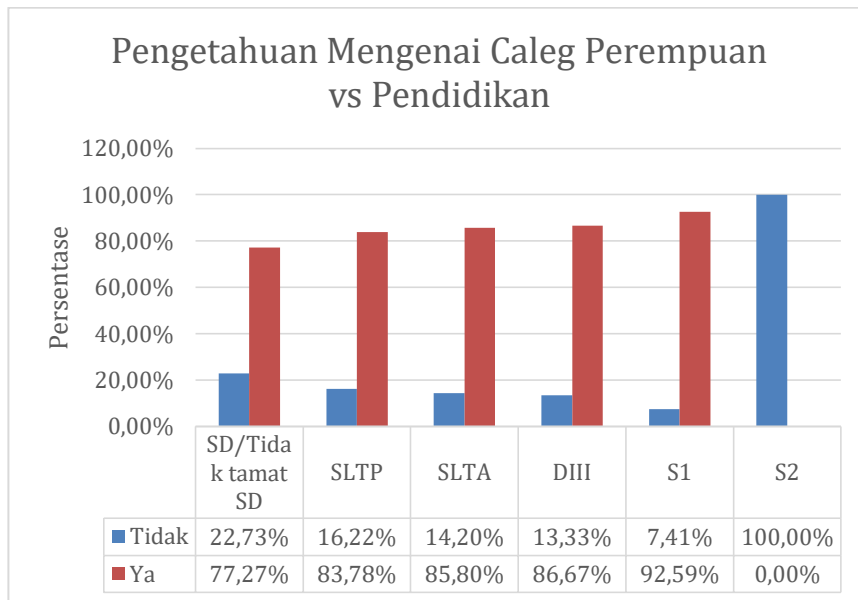
Dari Grafik 12 di atas dapat diketahui bahwa suku dengan tingkat pengetahuan tertinggi yaitu Bugis dan Buton. Keseluruhan responden yang bersuku Bugis dan Buton mengetahui keberadaan caleg perempuan pada pemilu 2014. Responden dengan suku Minang dan Banjar memiliki tingkat pengetahuan caleg perempuan kedua yaitu sebesar 87,50% dan 85,71%. Responden dengan tingkat pengetahuan terendah dimiliki oleh responden dengan suku Tiong Hoa yaitu sebesar 77,78%.

Dari informasi tersebut di atas, tim peneliti menyimpulkan sementara bahwa “rendahnya warga Tiong Hoa dalam memahami caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2014 disebabkan oleh minimnya minat etnis/suku tersebut dalam dunia politik”. Minimnya minat tersebut etnis Tiong Hoa tersebut disebabkan tingginya minat warga Tiong Hoa dalam berwirausaha dibandingkan dengan berpolitik.

3) Pendidikan

Pendidikan memiliki andil dalam meningkatkan pengetahuan responden terhadap keberadaan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi angket diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih maka akan meningkatkan pengetahuan terhadap caleg. Berikut info grafik yang menjelaskan tingkat pengetahuan responden terhadap caleg perempuan dilihat dari tingkat pendidikan.

Grafik 15
Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Data Olahan, 2018.

Dari grafik 13 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden berkorelasi dengan tingkat pengetahuan caleg dalam pemilu tahun 2014. Responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak tamat SD memiliki tingkat pengetahuan terhadap Caleg paling rendah yaitu sebesar 77,27%, kecuali responden dengan kualifikasi pendidikan Magister atau S2 yang malah menunjukkan sebaliknya. Akan tetapi, dikarenakan responden berpendidikan S2 hanya berjumlah satu orang, maka hal tersebut belum layak dianggap mewakili pemilih perempuan dengan kualifikasi magister.

Dari data grafik dan analisa diatas maka peneliti menyimpulkan sementara bahwa “tingkat pengetahuan responden terhadap caleg ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih maka akan

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

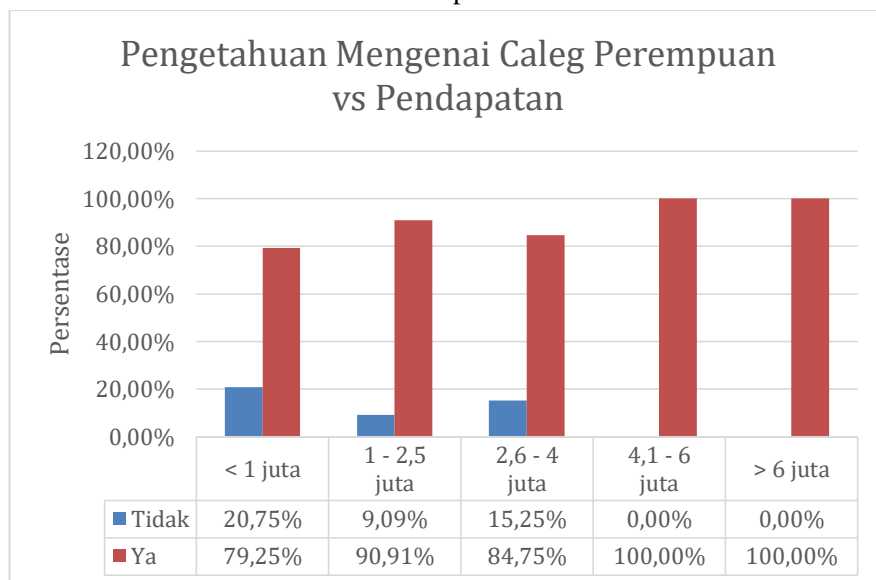
semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap caleg”. Simpulan ini dilatarbelakangi oleh argumen bahwa tingginya tingkat pendidikan akan semakin meningkatkan rasa “keingintahuan” dalam mencari informasi terhadap objek (caleg) yang akan dipilih.

4) Pendapatan

Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden terhadap caleg. Hal ini dapat dilihat dari info grafik dibawah ini;

Grafik 16

Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Pendapatan



Sumber: Data Olahan, 2018.

Berdasarkan grafik 14 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan terendah (1 Juta) memiliki tingkat pengetahuan sebesar 79,25%. Sedangkan tingkat pendapatan

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

diatas 4 juta memiliki tingkat pengetahuan tertinggi sebesar 100%.

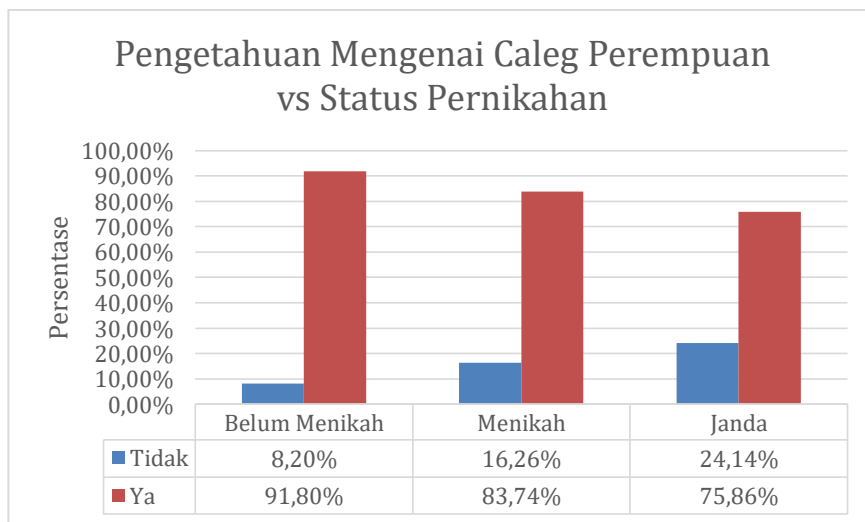
Dari grafik 4 dan analisa diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa “semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang terhadap calon pilihannya”. Simpulan ini didukung oleh argumen bahwa untuk mendapatkan informasi perlu biaya. Semakin besar cadangan biaya yang dimiliki oleh responden maka akan meningkatkan upaya seseorang dalam memenuhi keingintahuannya.

5) Status Pernikahan

Status pernikahan memberikan pengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden terhadap caleg. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini;

Grafik 17

Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Pernikahan



Sumber: Data Olahan, 2018.

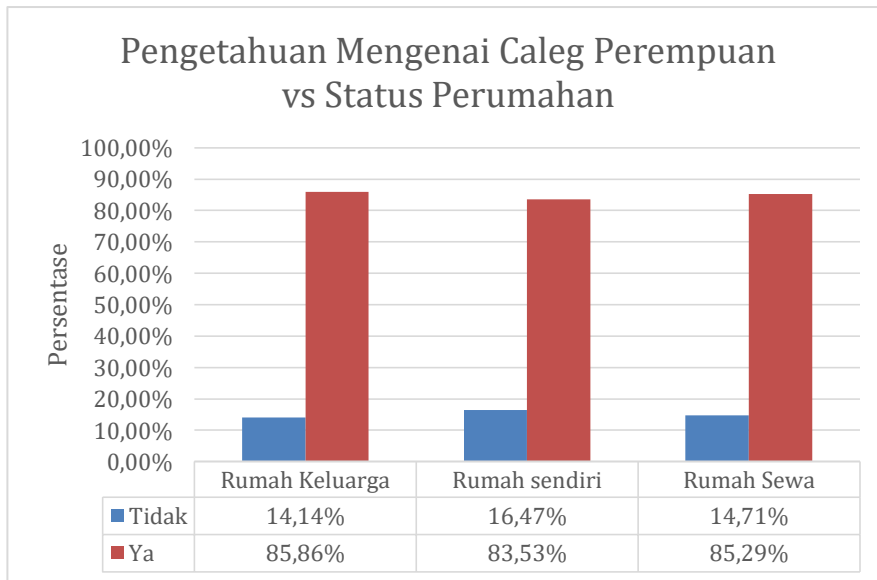
Dari grafik 15 di atas dapat diketahui bahwa status pernikahan responden yang belum menikah menempati tingkat pengetahuan terhadap caleg tertinggi yaitu sebesar 91,80%. Peringkat tertinggi kedua adalah responden dengan status pernikahan sudah menikah yaitu sebesar 83,74%. Sedangkan responden dengan status pernikahan janda memiliki tingkat pengetahuan terendah terhadap caleg yaitu sebesar 75,86%.

Berdasarkan grafik 15 dan analisa di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa “status pernikahan responden memberikan pengaruh terhadap pengetahuan seseorang terhadap calon anggota legislatif”. Responden yang belum pernah menikah memiliki tingkat pengetahuan terhadap caleg paling tinggi dan responden dengan status pernikahan janda memiliki tingkat pengetahuan terendah terhadap caleg. Hal ini didasari pada asumsi bahwa ketika seseorang belum memiliki tanggungjawab mengurus rumah tangga maka ia memiliki banyak waktu untuk mencari tahu keberadaan calon atau kandidat yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum. Sedangkan bagi responden yang sudah atau pernah menikah akan lebih mendahulukan mengurus rumah tangganya.

6) Status kepemilikan rumah

Status kepemilikan rumah ternyata tidak begitu mempengaruhi tingkat pengetahuan perempuan terhadap caleg perempuan sebagaimana terlihat pada Grafik 16 dibawah ini.

Grafik 18
Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Perumahan



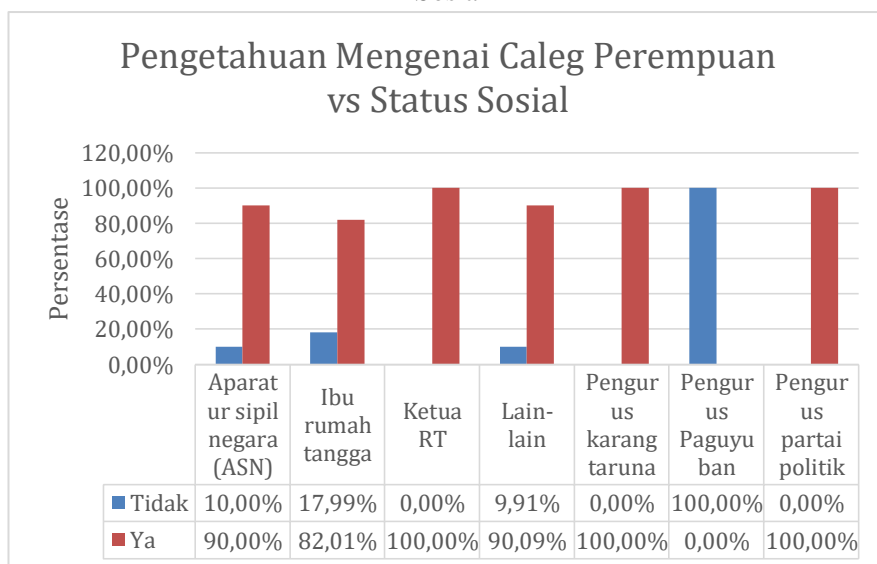
Sumber: Data Olahan, 2018.

Dari grafik 16 diatas terlihat bahwa tingkat ketidaktahuan antara perempuan yang tinggal di rumah sendiri, tinggal di rumah keluarga dan tinggal di rumah sewa, mempunyai persentase yang hampir seragam.

7) Status Sosial

Grafik 17 dibawah ini menunjukkan tingkat persentase pengetahuan pemilih perempuan terhadap caleg perempuan.

Grafik 19
 Persentase Pengetahuan Warga Pada Caleg Perempuan Berdasarkan Status Sosial



Sumber: Data Olahan, 2018.

Dari grafik 17 di atas terlihat bahwa pemilih perempuan dengan status sosial ibu rumah tangga mempunyai ketidaktahuan yang tinggi dibandingkan dengan pemilih dengan latar belakang status sosial yang lain yaitu sebesar 17,99%, kecuali pemilih dengan latar belakang pengurus paguyuban yang dalam survei ini mempunyai tingkat ketidaktahuan 100%. Akan tetapi tingkat ketidaktahuan pengurus paguyuban dalam survei ini belum dapat mewakili populasi pengurus paguyuban seluruhnya dikarenakan data pengurus paguyuban dalam survei ini hanya sebesar satu orang.

5.2.2 Efektivitas Media Informasi dalam Pemilu Tahun 2014

Hasil selanjutnya adalah terhadap efektivitas media penyampaian Pemilu. Hal ini tergambar dalam Tabel 14 dan Gambar 3. Dari Tabel 14 terlihat bahwa empat media merupakan sarana efektif dalam penyampaian berita pemilu, yaitu berita TV/radio (45,61%), Spanduk/Baliho (19,30%), Medsos (17,54%) dan dialog langsung (8,77%). Akan tetapi secara spasial (Gambar 3) maka dominasi terlihat pada berita TV/Radio dan baliho untuk hampir semua kelurahan. Kecuali Kemboja dan Senggarang dengan pilihan media yang berimbang dan Penyengat dengan karakteristik tersendiri yaitu informasi dari teman/keluarga/tetangga.

5.2.3 Sikap Pemilih Perempuan Terhadap Politik Uang

Dari segi politik uang, sebanyak 74.76% responden dengan tegas menolak politik uang (Tabel 15). Akan tetapi, ada beberapa kelurahan yang perlu diwaspadai dari pelanggaran pemilu akibat politik uang, yaitu: Kampung Bulang, Melayu Kota Piring, dan Tanjungpinang Timur yang sebagian kecil akan memilih calon yang memberi uang terbanyak. Tanjungpinang Timur dan Melayu Kota Piring akan memilih calon yang memberi uang. Sedangkan hampir semua kelurahan sebagian responden mengatakan akan menerima uang/barang walaupun tetap akan memilih sesuai hati nurani. Gambar 4 menyatakan dominasi pilihan sikap responden per-kelurahan.

Tabel 14 Data Efektivitas Media Informasi Calon Anggota Legislatif pada PEMILU di Kota

Kelurahan	Tanjungpinang										Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Air Raja	1.75 %	45.61 %	8.77 %	17.54 %	0.00 %	0.00 %	3.51 %	3.51 %	19.30 %	0.00 %	100.00 %
Batu IX	4.55 %	20.45 %	2.27 %	6.82 %	3.41 %	0.00 %	11.36 %	4.55 %	37.50 %	9.09 %	100.00 %
Bukit Cermin	7.50 %	40.00 %	0.00 %	7.50 %	10.00 %	0.00 %	5.00 %	7.50 %	15.00 %	7.50 %	100.00 %
Dompok	16.67 %	33.33 %	0.00 %	16.67 %	10.26 %	0.00 %	0.00 %	3.85 %	19.23 %	0.00 %	100.00 %
Kampung Baru	10.34 %	13.79 %	0.00 %	0.00 %	3.45 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	44.83 %	27.59 %	100.00 %
Kampung Bugis	15.69 %	10.78 %	6.86 %	9.80 %	8.82 %	1.96 %	7.84 %	8.82 %	22.55 %	6.86 %	100.00 %
Kampung Bulang	16.00 %	25.33 %	1.33 %	10.67 %	12.00 %	1.33 %	2.67 %	16.00 %	12.00 %	2.67 %	100.00 %
Kemboja	0.00	5.00	0.00	12.50	27.50	0.00	7.50	0.00	27.50	20.00	100.00

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Kelurahan	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Melayu Kota Piring	13.16 %	21.93 %	4.39 %	12.28 %	6.14 %	0.00 %	5.26 %	12.28 %	19.30 %	5.26 %	100.00 %
Penyengat	0.00 %	4.00 %	0.00 %	16.00 %	76.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.00 %	100.00 %
Pinang Kencana	11.11 %	6.35 %	1.59 %	12.70 %	15.87 %	0.00 %	1.59 %	6.35 %	30.16 %	14.29 %	100.00 %
Sei Jang	15.00 %	28.33 %	1.67 %	21.67 %	3.33 %	0.00 %	0.00 %	3.33 %	26.67 %	0.00 %	100.00 %
Senggarang	12.50 %	8.93 %	0.00 %	0.00 %	7.14 %	7.14 %	35.71 %	0.00 %	17.86 %	10.71 %	100.00 %
Tg. pinang Barat	0.00 %	66.67 %	6.06 %	0.00 %	6.06 %	0.00 %	3.03 %	0.00 %	18.18 %	0.00 %	100.00 %
Tg. pinang Kota	9.62 %	28.85 %	0.00 %	9.62 %	1.92 %	0.00 %	0.00 %	11.54 %	36.54 %	1.92 %	100.00 %
Tg. Pinang Timur	6.74 %	16.85 %	4.49 %	16.29 %	7.87 %	0.56 %	7.87 %	7.30 %	23.60 %	8.43 %	100.00 %

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Kelurahan	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Total
Tg. Unggat	0.00 %	36.59 %	0.00 %	9.76 %	17.07 %	0.00 %	0.00 %	7.32 %	29.27 %	0.00 %	100.00 %
Tg. Ayun Sakti	0.00 %	9.09 %	4.55 %	27.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	9.09 %	43.18 %	6.82 %	100.00 %
Grand Total	1.75 %	45.61 %	8.77 %	17.54 %	0.00 %	0.00 %	3.51 %	3.51 %	19.30 %	0.00 %	100.00 %

Keterangan: Diolah, 2018

A= Berita Koran

D= Medsos

G= Lain - lain

J= Stiker/Kalender

B= Berita
TV/Radio

E= Keluarga/Teman/Tetangga

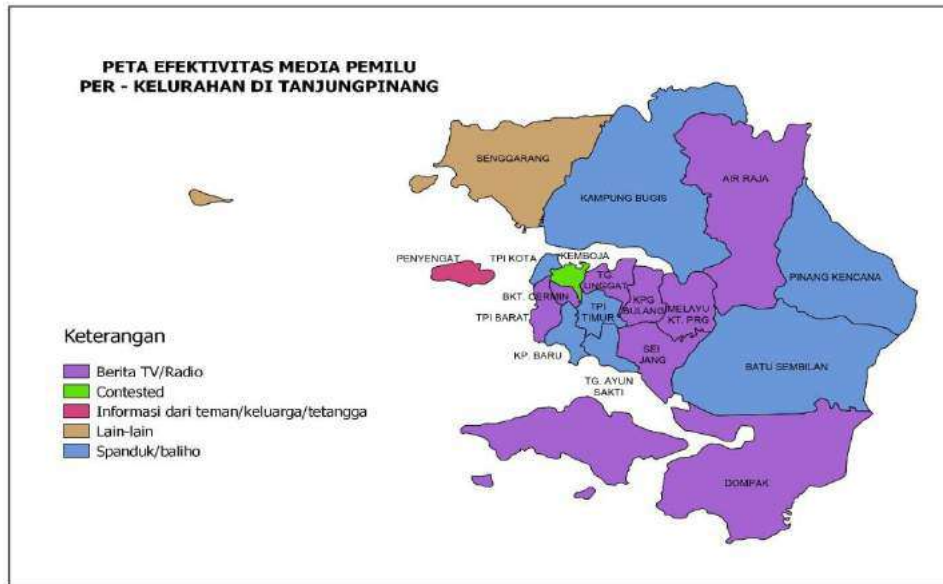
H= Media online

C= Dialog
Langsung

F= Kedai Kopi

I= Spanduk/Baliho

Gambar 3
Peta Efektivitas Media Pemilu Per-Kelurahan di Tanjungpinang



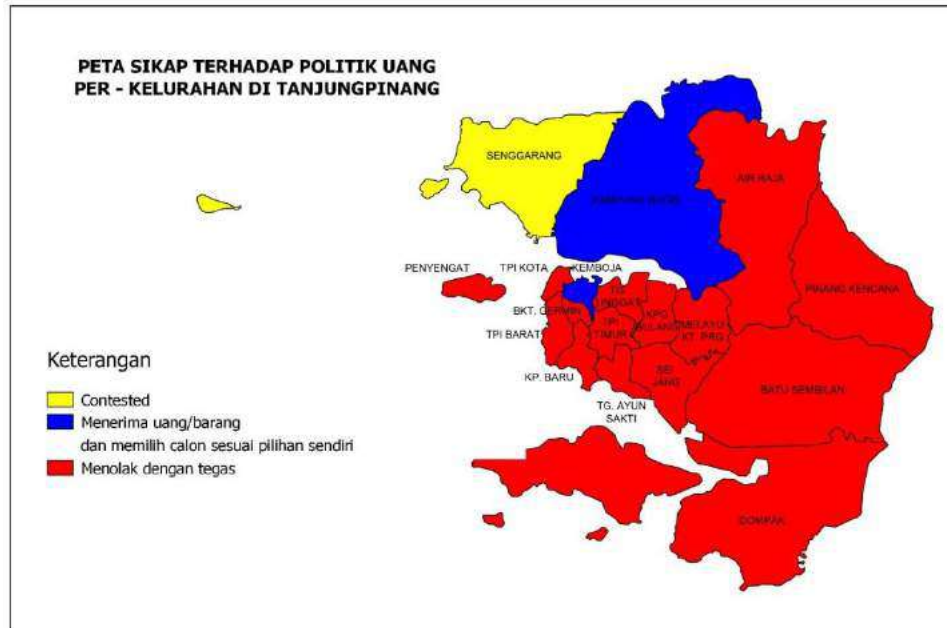
Sumber: Diolah, 2018

Tabel 15
Sikap Terhadap Politik Uang pada PEMILU 2014 di Kota
Tanjungpinang

Kelurahan	Menerima dan memilih calon yang memberi lebih banyak uang/barang	Menerima dan memilih calon yang memberi uang/barang	Menerima uang/barang dan memilih calon sesuai pilihan sendiri	Menolak dengan tegas	Total
Air Raja	0.00%	0.00%	13.04%	86.96%	100.00%
Batu IX	0.00%	0.00%	24.00%	76.00%	100.00%
Bukit Cermin	0.00%	0.00%	22.73%	77.27%	100.00%
Dompok	0.00%	4.55%	36.36%	59.09%	100.00%
Kampung Baru	0.00%	0.00%	4.55%	95.45%	100.00%
Kampung Bugis	0.00%	0.00%	59.09%	40.91%	100.00%
Kampung Bulang	4.35%	0.00%	4.35%	91.30%	100.00%
Kemboja	0.00%	0.00%	54.55%	45.45%	100.00%
Melayu Kota Piring	4.00%	20.00%	16.00%	60.00%	100.00%
Penyengat	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Pinang Kencana	0.00%	4.00%	24.00%	72.00%	100.00%
Sei Jang	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Senggarang	0.00%	9.09%	45.45%	45.45%	100.00%
Tanjungpinang Barat	0.00%	4.55%	9.09%	86.36%	100.00%
Tanjungpinang Kota	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Tg. Pinang Timur	3.45%	41.38%	0.00%	55.17%	100.00%
Tg. Unggat	0.00%	0.00%	36.36%	63.64%	100.00%
Tg. Ayun Sakti	0.00%	0.00%	4.55%	95.45%	100.00%
Grand Total	0.72%	5.29%	19.23%	74.76%	100.00%

Sumber: Diolah, 2018

Gambar 4
Peta Sikap Pemilih Perempuan Per- Kelurahan Terhadap Politik Uang



5.2.4 Partai Yang Di Pilih Pada Pemilu 2014

Tabel 16 berisi statistik pilihan partai responden perempuan pada Pemilu Tanjungpinang 2014. Terlihat bahwa PDIP mendominasi dengan 45,67%, disusul Golkar sebesar 13,22% dan Gerindra 10,34%. Dominasi masing masing partai di wilayah kelurahan Kota Tanjungpinang tergambar dalam Gambar 5 dimana PDIP mendominasi hampir seluruh kelurahan di Tanjungpinang kecuali Kelurahan Tanjungpinang Kota yang didominasi Golkar dan Sei Jang yang didominasi oleh Gerindra.

5.2.5 Partai Yang Disukai Saat Ini

Tabel 17 berisi statistik partai yang disukai saat survei ini dilakukan (Mei 2018). Tampak bahwa PDIP tetap mendominasi pilihan pemilih perempuan dengan 25,70% suara, disusul Golkar sebesar 13,84%, Gerindra 7,88% dan Nasdem 5,56%. Akan tetapi juara dari kedisukaan pemilih perempuan saat survei ini dijalankan jatuh pada belum menentukan pilihan yaitu sebesar 32,44%.

Gambar 6 menunjukkan dominasi kedisukaan partai saat ini dimana wilayah PDIP berkurang menjadi Kelurahan Kemboja, Kampung Bugis, Kampung Baru, Tanjung Unggat, Tanjungpinang Timur dan Tanjung Ayun Sakti. Manakala Golkar menambah wilayah yang disukai menjadi Tanjungpinang Kota dan Pinang Kencana. Selain itu, Gerindra kehilangan dominasi kedisukaan di Kelurahan Sei Jang, digantikan oleh belum menentukan pilihan. Belum menentukan pilihan juga mendominasi wilayah selain dominasi PDIP dan Golkar.

5.2.6 Partai Yang Akan Dipilih Pada Pemilu 2019

Data partai yang kemungkinan akan dipilih oleh pemilih perempuan tersaji pada Tabel 18. Walaupun

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

menunjukkan indikasi penurunan kedisukaan, konsistensi terlihat pada pemilih PDIP dengan suara 24,76% suara. Gambar 7 menunjukkan dominasi PDIP pada beberapa kelurahan seperti Kampung Bugis, Pinang Kencana, Batu IX, Tanjungpinang Kota, Kemboja, Tanjung Unggat, dan Kampung Baru. Kelurahan lain didominasi oleh belum menentukan pilihan sebesar 50%.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Tabel 16 Partai yang Dipilih pada PEMILU 2014 di Kota Tanjungpinang

Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Air Raja	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	65.22 %	21.74 %	0.00 %	13.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Batu IX	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	12.00 %	20.00 %	16.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Bukit Cermi	4.55 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	45.45 %	9.09 %	9.09 %	18.18 %	0.00 %	0.00 %	9.09 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Dompok	4.55 %	0.00 %	9.09 %	0.00 %	36.36 %	4.55 %	9.09 %	9.09 %	0.00 %	0.00 %	9.09 %	0.00 %	18.18 %	0.00 %	100.00 %
Kampung Baru	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	90.91 %	0.00 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Kampung Bugis	4.55 %	0.00 %	4.55 %	4.55 %	59.09 %	9.09 %	13.64 %	4.55 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Kp. Bulang	17.39 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	52.17 %	4.35 %	21.74 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.35 %	0.00 %	100.00 %
Kemboja	9.09 %	0.00 %	9.09 %	0.00 %	40.91 %	4.55 %	9.09 %	13.64 %	4.55 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	100.00 %
Kota Piring	0.00 %	12.00 %	8.00 %	0.00 %	28.00 %	8.00 %	20.00 %	12.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.00 %	4.00 %	4.00 %	100.00 %
Penyengat	0.00 %	0.00 %	22.73 %	0.00 %	40.91 %	0.00 %	0.00 %	18.18 %	0.00 %	0.00 %	13.64 %	4.55 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Pinang Kencana	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	36.00 %	24.00 %	4.00 %	24.00 %	4.00 %	0.00 %	8.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Sei Jang	4.17 %	0.00 %	12.50 %	4.17 %	12.50 %	0.00 %	33.33 %	12.50 %	4.17 %	0.00 %	4.17 %	0.00 %	8.33 %	4.17 %	100.00 %

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Senggarang	0.00 %	18.18 %	0.00 %	0.00 %	63.64 %	0.00 %	13.64 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.55 %	100.00 %
Tg.pinang Barat	13.64 %	18.18 %	0.00 %	0.00 %	54.55 %	0.00 %	13.64 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Tg.pinang Kota	0.00 %	0.00 %	4.55 %	0.00 %	27.27 %	4.55 %	4.55 %	50.00 %	4.55 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.55 %	100.00 %
Tpi. Timur	0.00 %	3.45 %	6.90 %	0.00 %	44.83 %	10.34 %	3.45 %	10.34 %	0.00 %	0.00 %	10.34 %	6.90 %	3.45 %	0.00 %	100.00 %
Tg. Unggat	18.18 %	0.00 %	22.73 %	0.00 %	31.82 %	4.55 %	0.00 %	18.18 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	4.55 %	100.00 %
Tg. Ayun Sakti	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	45.45 %	0.00 %	9.09 %	13.64 %	0.00 %	4.55 %	4.55 %	0.00 %	22.73 %	0.00 %	100.00 %
Grand Total	4.09 %	2.88 %	5.77 %	0.48 %	45.67 %	6.73 %	10.34 %	13.22 %	0.96 %	0.24 %	3.85 %	0.96 %	3.61 %	1.20 %	100.00 %

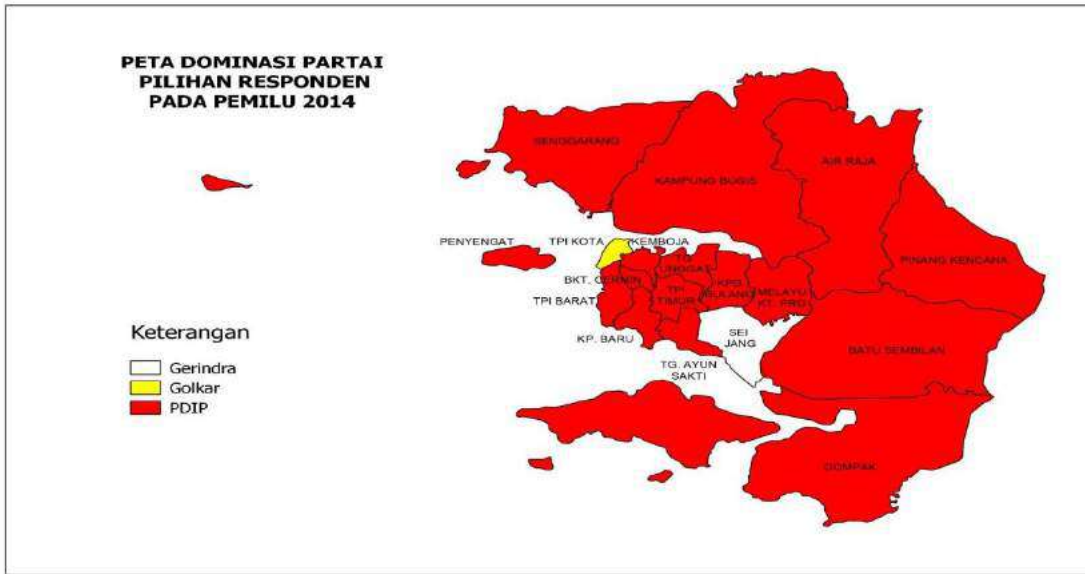
Keterangan:

1 = Golput	5 = PDIP	9 = Hanura	13 = Nasdem
2 = Memilih semua	6 = Demokrat	10 = PKPI	14 = PPP
3 = PAN	7 = Gerindra	11 = PKS	
4 = PBB	8 = Golkar	12 = PKB	

“Golput” berarti tidak menggunakan hak pilih pada saat berada dalam bilik suara

“Memilih semua” berarti merusak suara dengan cara memilih beberapa kandidat

Gambar 5
Peta Dominasi Partai Pilihan Pemilih Perempuan pada PEMILU 2014



Sumber: Diolah, 2018

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Tabel 17 Partai yang Disukai Saat Ini

Kelurahan	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Total
Air Raja	86.81%	0.00%	0.00%	0.00%	4.86%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Batu IX	3.16%	0.00%	0.00%	0.00%	42.41%	16.46%	13.29%	0.00%	17.09%	0.00%	7.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Bukit Cermin	57.36%	0.78%	0.00%	0.00%	11.63%	9.30%	0.00%	0.00%	13.18%	0.00%	3.88%	0.00%	3.88%	0.00%	0.00%	100.00%
Dompok	38.07%	7.11%	0.00%	0.00%	13.20%	0.00%	7.11%	0.00%	20.30%	0.00%	0.00%	0.00%	7.11%	7.11%	0.00%	100.00%
Kp. Baru	5.23%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	0.00%	0.00%	0.00%	15.70%	0.00%	5.81%	0.00%	8.72%	0.00%	0.00%	100.00%
Kp. Bugis	6.67%	4.44%	0.00%	0.00%	42.96%	14.07%	19.26%	0.00%	8.89%	3.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kp. Bulang	38.97%	0.00%	0.00%	0.00%	20.59%	0.00%	21.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.12%	0.00%	0.00%	100.00%
Kemboja	3.25%	12.34%	0.00%	0.00%	38.96%	0.00%	20.13%	0.00%	22.08%	0.00%	0.00%	0.00%	3.25%	0.00%	0.00%	100.00%
Melayu Kota Piring	49.30%	10.56%	0.00%	0.00%	12.68%	1.41%	5.63%	0.00%	0.00%	5.63%	5.63%	0.00%	5.63%	0.00%	3.52%	100.00%
Penyengat	54.67%	0.00%	0.00%	0.00%	17.33%	4.67%	0.00%	0.00%	14.00%	0.00%	4.67%	4.67%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Pg. Kencana	11.05%	12.21%	0.00%	0.00%	15.70%	3.49%	12.79%	0.00%	20.93%	2.91%	0.00%	0.00%	15.12%	5.81%	0.00%	100.00%
Sei Jang	48.30%	0.00%	0.00%	4.76%	6.12%	0.00%	16.33%	0.00%	10.20%	4.76%	4.76%	0.00%	4.76%	0.00%	0.00%	100.00%
Senggarang	62.58%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	5.16%	7.74%	0.00%	4.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Tpi. Barat	73.19%	0.00%	0.00%	0.00%	5.07%	0.00%	3.62%	0.00%	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%	5.07%	0.00%	0.00%	100.00%
Tpi. Kota	15.26%	0.00%	4.74%	0.00%	28.42%	0.00%	4.21%	0.00%	38.95%	0.00%	0.00%	0.00%	4.74%	0.00%	3.68%	100.00%
Tpi Timur	14.05%	5.79%	0.00%	0.00%	28.93%	5.79%	5.79%	4.13%	12.40%	0.00%	12.40%	6.61%	4.13%	0.00%	0.00%	100.00%
Tg. Unggat	21.74%	8.70%	0.00%	0.00%	30.43%	4.35%	0.00%	4.35%	8.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.74%	0.00%	100.00%
Tg. Ayu Sakti	4.35%	0.00%	0.00%	0.00%	60.87%	1.74%	6.09%	0.00%	6.09%	0.00%	0.00%	0.00%	20.87%	0.00%	0.00%	100.00%
Grand Total	32.44%	3.57%	0.33%	0.26%	25.70%	3.53%	7.88%	0.44%	13.84%	0.92%	2.36%	0.55%	5.56%	2.17%	0.44%	100.00%

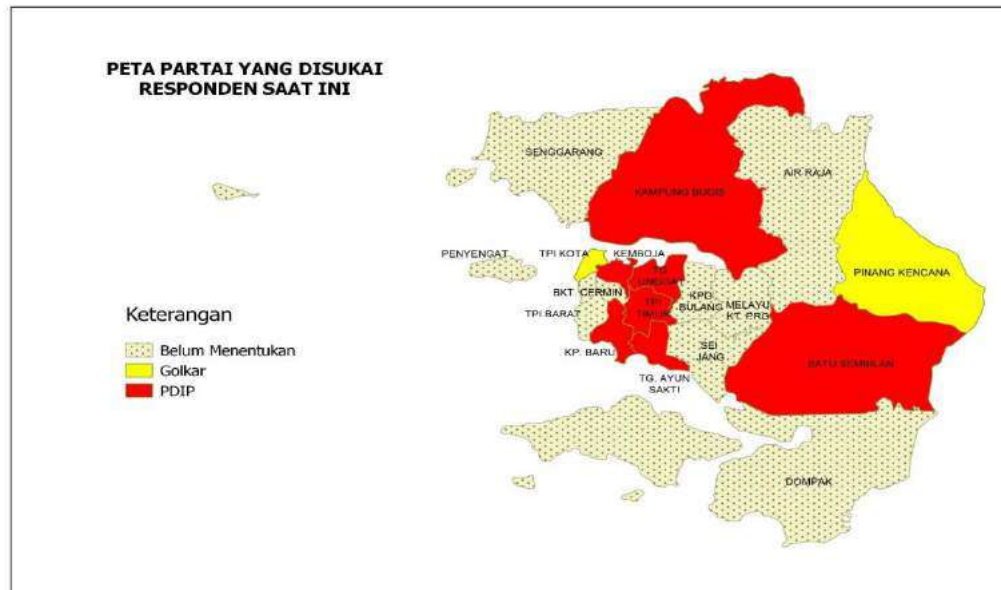
Sumber: Diolah, 2018

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Keterangan:

A= Belum Menentukan	D= PBB	G= Gerindra	J= Hanura	M= Nasdem
B= PAN	E= PDIP	H= Garuda	K= PKS	N= Perindo
C= Bekarya	F= Demokrat	I= Golkar	L = PKB	O = PPP

Gambar 6
Peta Partai yang Disukai Pemilih Perempuan Saat Ini



Sumber: Diolah, 2018

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Tabel 18 Partai yang Akan Dipilih pada PEMILU 2019

Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
Air Raja	82.61%	0.00%	0.00%	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%	4.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Batu IX	16.00%	0.00%	0.00%	48.00%	8.00%	12.00%	0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Bukit Cermin	77.27%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Dompok	72.73%	4.55%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kampung Baru	27.27%	0.00%	0.00%	68.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kp. Bugis	4.55%	4.55%	0.00%	63.64%	9.09%	13.64%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kp. Bulang	52.17%	0.00%	0.00%	26.09%	0.00%	21.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Kemboja	9.09%	9.09%	0.00%	36.36%	0.00%	9.09%	0.00%	31.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Melayu Kota Piring	68.00%	8.00%	0.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	4.00%	100.00%
Penyengat	54.55%	0.00%	0.00%	18.18%	4.55%	0.00%	0.00%	13.64%	0.00%	0.00%	4.55%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Png Kencana	20.00%	0.00%	0.00%	24.00%	4.00%	8.00%	0.00%	16.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%	12.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Sei Jang	87.50%	0.00%	0.00%	4.17%	0.00%	4.17%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Senggarang	72.73%	0.00%	0.00%	18.18%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Tg. Barat	81.82%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	4.55%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Tg. Kota	22.73%	0.00%	4.55%	31.82%	0.00%	13.64%	0.00%	22.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	100.00%
Tg. Timur	51.72%	0.00%	0.00%	27.59%	0.00%	3.45%	0.00%	3.45%	0.00%	0.00%	3.45%	6.90%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Tg. Unggat	18.18%	9.09%	0.00%	31.82%	4.55%	0.00%	4.55%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	18.18%	4.55%	0.00%	100.00%
Tg. Ayun Sakti	81.82%	0.00%	0.00%	13.64%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

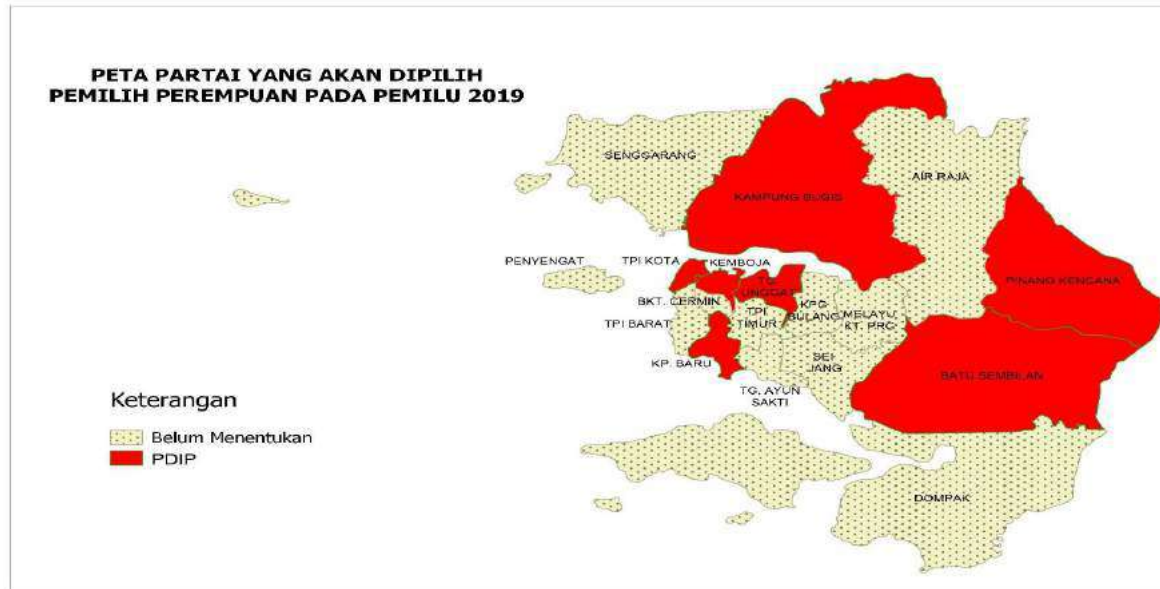
Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Grand Total	50.00%	2.16%	0.24%	24.76%	1.68%	5.53%	0.24%	7.69%	0.48%	0.24%	1.20%	0.72%	2.40%	1.68%	0.72%	0.24%	100.00%
-------------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Keterangan

1 = Belum menentukan	4 = PDIP	7 = Garuda	10 = PKPI	13 = Nasdem	16 = PSI
2 = PAN	5 = Demokrat	8 = Golkar	11 = PKS	14 = Perindo	
3 = Berkarya	6 = Gerindra	9 = Hanura	12 = PKB	15 = PPP	

Gambar 7
Peta Partai yang Kemungkinan Dipilih Pemilih Perempuan pada PEMILU 2019



Sumber: Diolah, 2018.

5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Partai Oleh Pemilih Perempuan

Tabel 17 menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan partai oleh pemilihan perempuan. Tampak bahwa faktor platform/visi dan misi menempati urutan pertama faktor keterpilihan partai (19,90%), disusul oleh faktor bebas korupsi (17,27%). Faktor ketokohan dalam partai dan ideologi partai menempati urutan ketiga dan keempat sebesar 16,97% dan 16,01%.

Sebaran spasial faktor pemilihan partai terdeskripsikan dalam Gambar 8. Terlihat bahwa di Kelurahan Dompok, Batu IX dan Senggarang faktor tokoh dalam partai mendominasi latar belakang pemilihan partai. Manakala di Pinang Kencana, Kemboja, Bukit Cermin dan Air Raja, platform/visi dan misi partai melatarbelakangi pilihan warga perempuan. Kampung Bugis, Tanjungpinang Kota dan Kampung Bulang menjadikan ketua umum partai sebagai dominasi alasan pemilihan partai. Bagi sebagian besar pemilih perempuan Kampung Baru dan Tanjung Ayun Sakti calon anggota legislatif mendasari pemilihan partai. Satu hal menarik di Kelurahan Penyengat, dengan keterpisahan secara geografis dari Kelurahan yang lain menjadikan ideologi partai sebagai faktor utama pemilihan partai oleh pemilih perempuan. Dua Kelurahan yang tidak mempunyai dominasi faktor penentu pilihan yaitu Melayu Kota Piring dan Tanjungpinang Barat.

Untuk mendetailkan analisa faktor pemilihan partai pada pemilih perempuan, tim peneliti melakukan tabulasi silang antara faktor faktor pemilihan terhadap aspek aspek demografi pemilih sebagaimana yang terlihat dalam Grafik 20 – 28.

Grafik 20 Faktor Pemilihan Partai vs Kelurahan

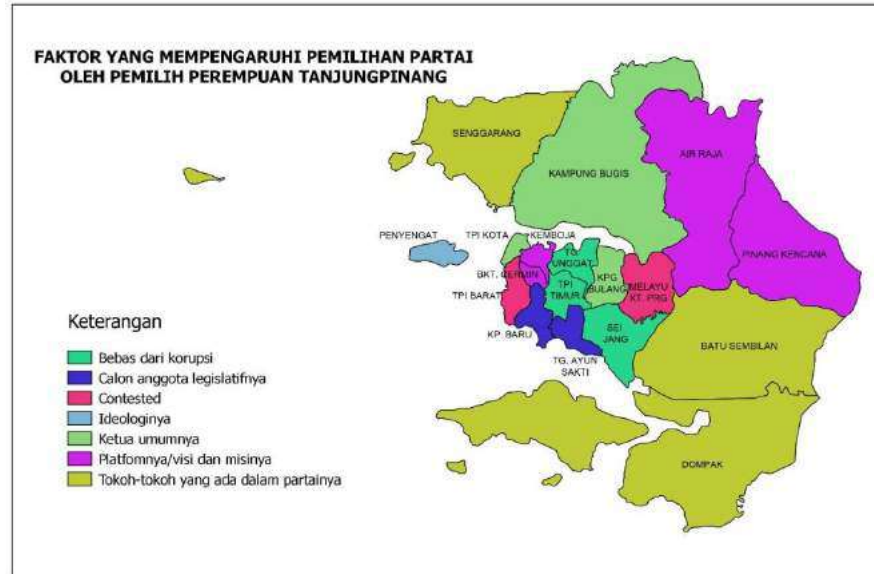
Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	Total
Air Raja	33.33%	0.00%	0.00%	12.50%	4.17%	41.67%	8.33%	100.00%
Batu IX	4.17%	10.42%	6.25%	16.67%	14.58%	14.58%	33.33%	100.00%
Bukit Cermin	0.00%	26.09%	8.70%	8.70%	4.35%	47.83%	4.35%	100.00%
Dompok	24.24%	0.00%	0.00%	21.21%	18.18%	0.00%	36.36%	100.00%
Kampung Baru	33.33%	41.67%	0.00%	0.00%	8.33%	4.17%	12.50%	100.00%
Kampung Bugis	23.53%	14.71%	0.00%	0.00%	35.29%	17.65%	8.82%	100.00%
Kampung Bulang	0.00%	19.05%	2.38%	16.67%	40.48%	11.90%	9.52%	100.00%
Kemboja	35.71%	0.00%	0.00%	14.29%	0.00%	42.86%	7.14%	100.00%
Melayu Kota Piring	6.25%	6.25%	0.00%	18.75%	6.25%	31.25%	31.25%	100.00%
Penyengat	0.00%	16.67%	0.00%	47.22%	2.78%	0.00%	33.33%	100.00%
Pinang Kencana	22.22%	11.11%	2.22%	11.11%	6.67%	40.00%	6.67%	100.00%
Sei Jang	34.48%	10.34%	1.72%	24.14%	6.90%	6.90%	15.52%	100.00%
Senggarang	29.73%	2.70%	2.70%	8.11%	5.41%	18.92%	32.43%	100.00%
Tanjungpinang Barat	29.79%	29.79%	6.38%	21.28%	0.00%	8.51%	4.26%	100.00%
Tanjungpinang Kota	4.29%	30.00%	0.00%	0.00%	35.71%	12.86%	17.14%	100.00%
Tg. Pinang Timur	24.30%	14.95%	1.87%	23.36%	8.41%	19.63%	7.48%	100.00%
Tg. Unggat	44.74%	2.63%	2.63%	15.79%	26.32%	2.63%	5.26%	100.00%
Tg. Ayun Sakti	15.15%	42.42%	0.00%	21.21%	6.06%	6.06%	9.09%	100.00%
Grand Total	17.27%	14.03%	2.22%	16.01%	13.61%	19.90%	16.97%	100.00%

Keterangan

1 = Bebas dari korupsi	5 = Ketua umumnya
2 = Calon anggota legislatifnya	6 = Platfomnya/visi dan misinya
3 = Figur/ketampanan/kecantikan tokoh-tokohnya	7 = Tokoh-tokoh yang ada dalam Partainya
4 = Ideologinya	

Gambar 8

Peta Dominasi Faktor Keterpilihan Partai di Kelurahan Kota Tanjungpinang

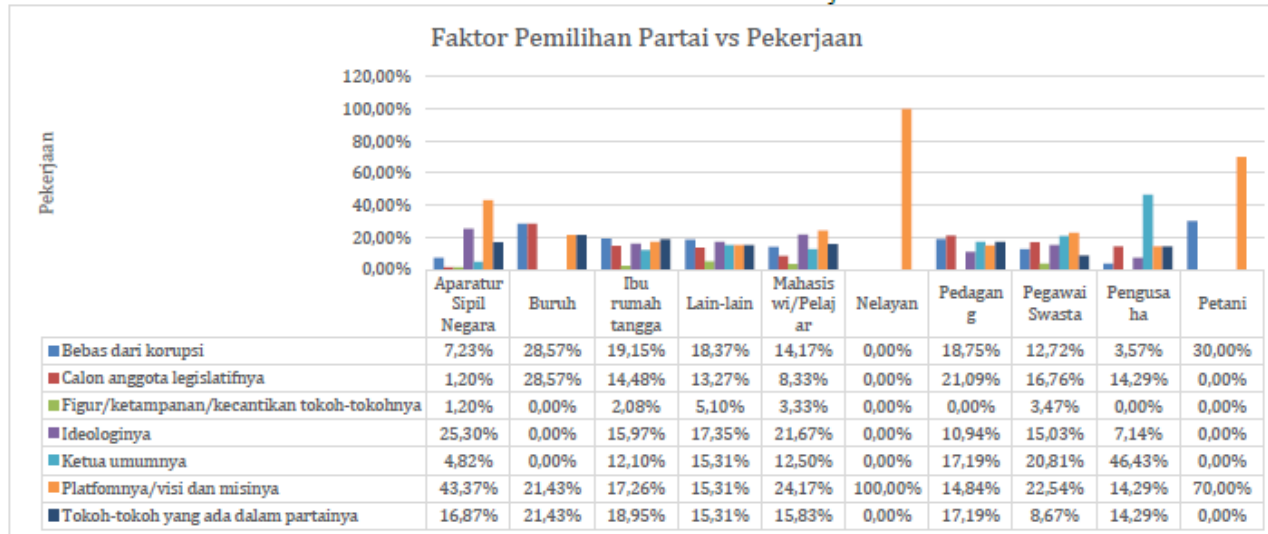


Sumber: Diolah, 2018

5.3.1 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pekerjaan

Dari perbandingan pekerjaan dengan faktor pemilihan partai (Grafik 21), terlihat bahwa faktor bebas korupsi sangat dipentingkan bagi golongan pekerja informal/kasar seperti buruh, petani dan ibu rumah tangga. Berbanding terbalik dengan itu bagi pengusaha dan ASN, faktor bebas korupsi merupakan faktor yang kurang menentukan dalam pertimbangan mereka memilih partai. Faktor calon legislatif juga merupakan faktor yang penting bagi buruh, dan ibu rumah tangga. Ideologi dan visi misi merupakan faktor yang penting bagi ASN dan mahasiswa dan nelayan dalam menentukan pilihan partai, sedangkan bagi pengusaha justru ketua umum lah faktor yang paling menentukan. Tokoh dalam partai merupakan faktor yang moderat bagi seluruh latar belakang pekerjaan.

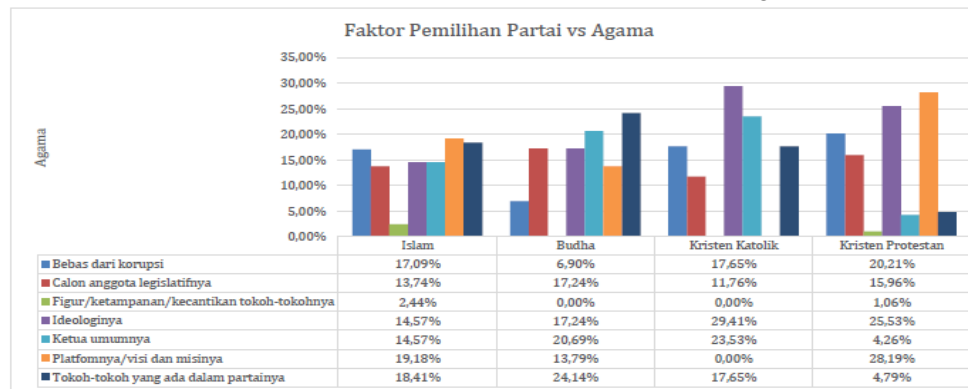
Grafik 21
Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pekerjaan



5.3.2 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Agama

Bagi pemeluk Agama Islam dan Kristek Protestan, platform/visi dan misi partai merupakan hal terpenting dalam pemilihan partai. Manakala bagi Agama Kristen Katolik, ideologi partai dan bagi pemeluk Agama Budha, tokoh tokoh dalam partai merupakan faktor terpenting. Bagi semua agama figur ketampanan/kecantikan merupakan faktor terlemah dalam pemilihan partai. Faktor bebas korupsi sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan partai bagi semua agama, kecuali bagi pemilih beragama Budha.

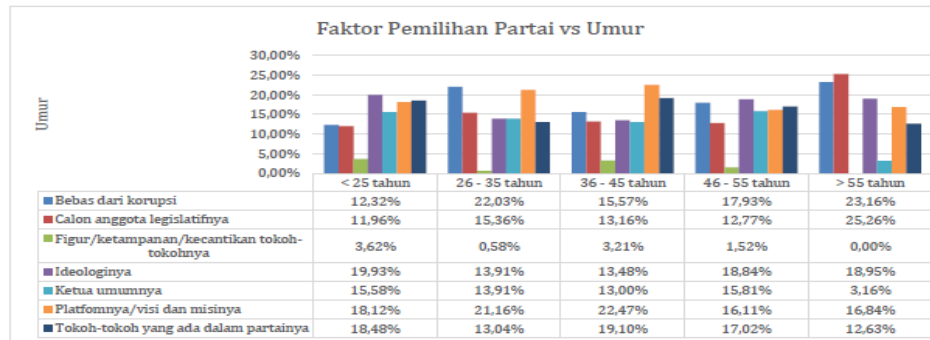
Grafik 22 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Agama



5.3.3 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Umur

Dari segi umur, usia dibawah 25 tahun menjadikan ideologi, platform dan tokoh partai sebagai faktor penentu pilihan. Bebas korupsi dan platform bagi usia 26 – 35 tahun, serta caleg partainya. Bagi usia 36 – 45 tahun, platform dan tokoh partai merupakan hal yang penting, sedangkan bagi usia 46 – 55 tahun hampir semua faktor terdistribusi merata. Untuk golongan diatas 55 tahun bebas korupsi dan caleg partai merupakan hal penting. Di semua golongan usia faktor ketampanan/kecantikan bukanlah hal yang penting (Grafik 23).

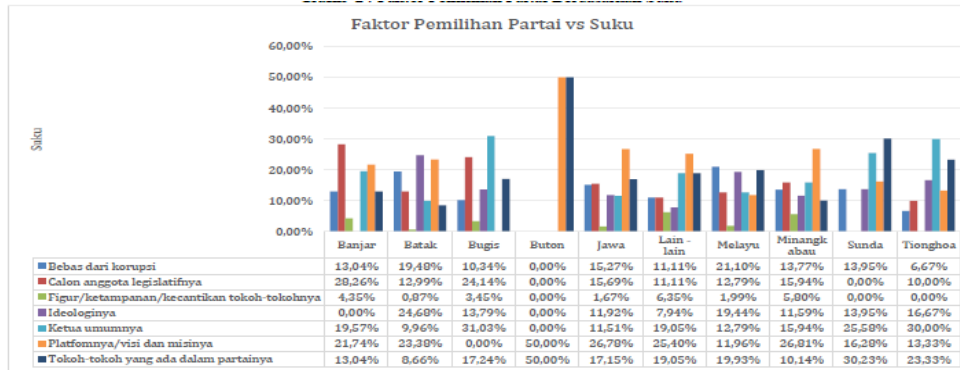
Grafik 23 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Umur



5.3.4 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Suku

Grafik 24 menggambarkan faktor pemilihan partai berbanding suku. Bebas korupsi dipilih oleh Suku Melayu sebagai faktor terpenting pemilihan partai, sedangkan caleg partai merupakan faktor penting bagi Suku Banjar. Bagi suku Bugis, Sunda dan Tionghoa, ketua umum merupakan faktor terpenting pemilihan partai. Platform/visi dan misi menjadi faktor terpenting bagi Suku Buton, Jawa, dan Minangkabau. Sedangkan bagi Suku Batak, ideologi merupakan hal terpenting.

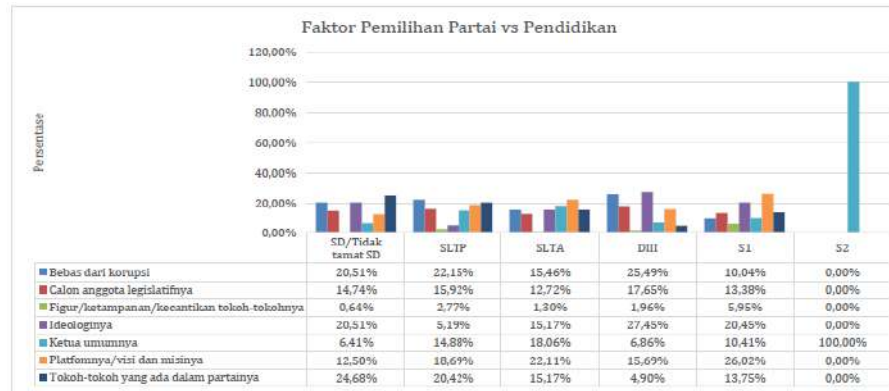
Grafik 24 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Suku



5.3.5 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendidikan

Dari segi pendidikan, bebas korupsi dan tokoh partai dipilih oleh responden berlatar belakang SD/tidak tamat SD serta SLTP. Bagi responden berlatar belakang SLTA, ketua umum dan platform merupakan hal yang penting bagi pemilihan partai. Ideologi dan bebas korupsi merupakan hal yang penting bagi lulusan D III, sedangkan bagi S1 platform dan ideologi. Perlu digaris bawahi bahwa bagi lulusan pendidikan tinggi (S1 dan S2) faktor bebas korupsi bukanlah hal terpenting (Grafik 25).

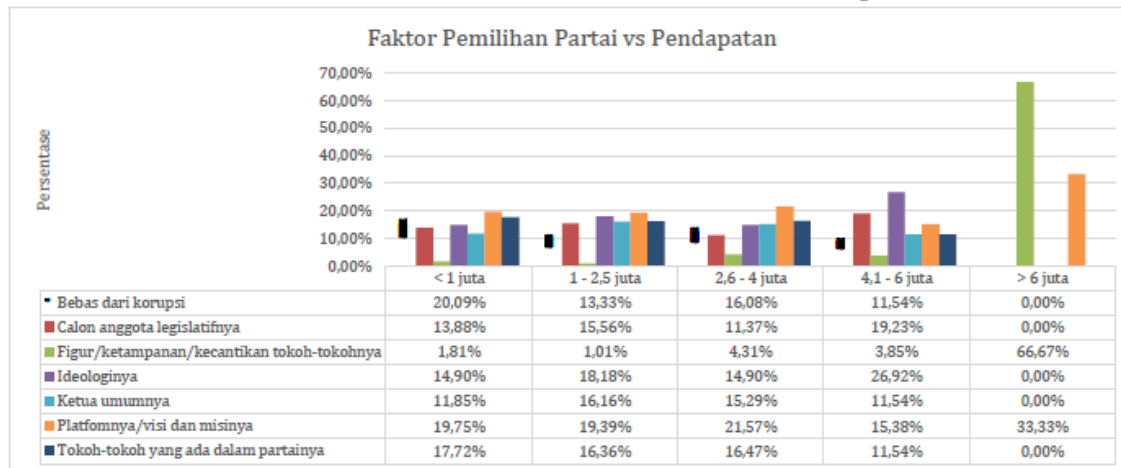
Grafik 25 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendidikan



5.3.6 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendapatan

Dari segi pendapatan, semakin kecil pendapatan responden semakin mereka menjadikan bebas korupsi sebagai hal yang penting. Berbanding terbalik dengan pendapatan terbesar (> 6 jt) yang menjadikan figur/ketampanan/kecantikan sebagai hal terpenting. Faktor lain terdistribusi merata (Grafik 26).

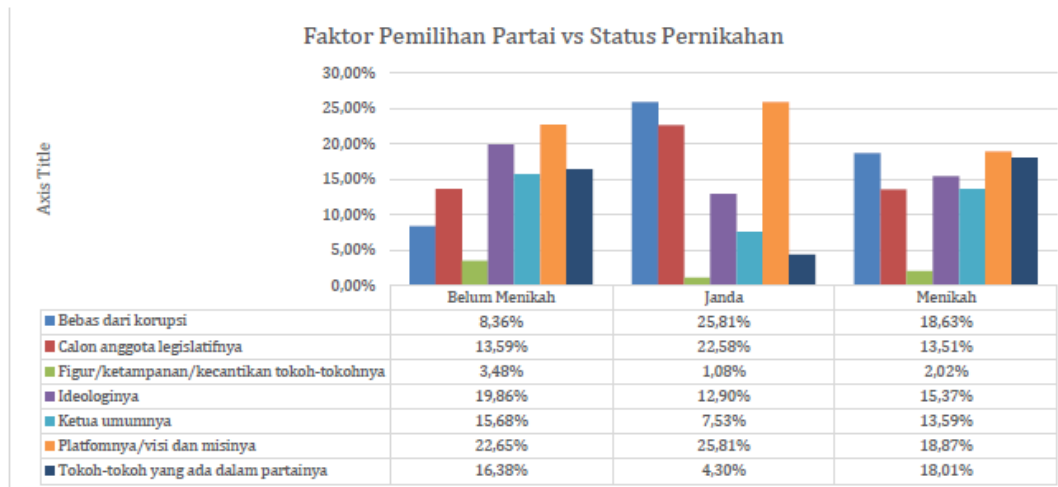
Grafik 22 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pendapatan



5.3.7 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Pernikahan

Dari segi status pernikahan, platform partai adalah pilihan terpenting bagi responden yang belum menikah, ditambah faktor bebas korupsi bagi janda. Sedangkan bagi yang berstatus menikah faktor-faktor terdistribusi merata (Grafik 27).

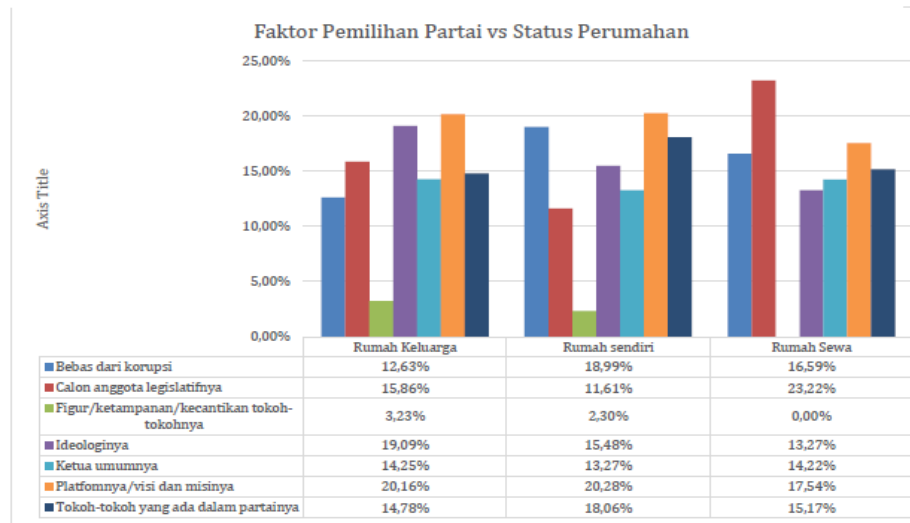
Grafik 23 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Pernikahan



5.3.8 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Perumahan

Dari segi perumahan, platform partai merupakan faktor terpenting bagi responden yang aman secara tempat tinggal sedangkan bagi mereka yang masih menyewa rumah caleg partai merupakan hal terpenting (Grafik 28).

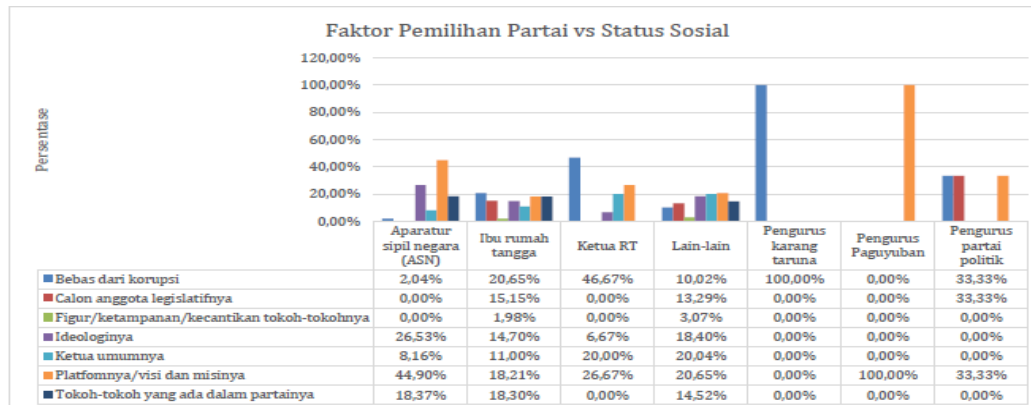
Grafik 24 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Perumahan



5.3.9 Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Sosial

Berdasarkan status sosial, bebas korupsi merupakan faktor terpenting bagi ibu rumah tangga, ketua RT, pengurus karang taruna, dan pengurus parpol. Hal itu berbanding terbalik dengan status sosial ASN dan pengurus paguyuban yang menganggap faktor bebas korupsi merupakan hal yang kurang penting dalam memilih partai berbanding faktor platform (Grafik 29).

Grafik 25
Faktor Pemilihan Partai Berdasarkan Status Sosial



5.4. Kegiatan Sosialisasi Partai Yang Disukai Pemilih Perempuan

Bagian terakhir dari analisa pertanyaan seputar pemilu adalah kegiatan sosialisasi partai yang paling disukai oleh responden (Tabel 16). Secara umum empat kegiatan sosialisasi partai mendapat sambutan hangat dari responden yaitu: bazar sembako murah, kegiatan keagamaan, pengobatan massal serta pentas seni dan budaya. Gambar 8 menjelaskan dominasi kegiatan yang disukai dimasing-masing kelurahan.

Dari Gambar 9 terlihat bahwa secara umum kebanyakan pemilih perempuan di Tanjungpinang menyukai kegiatan bazar sembako murah. Kelurahan Tanjungpinang Kota, Bukit Cermin dan Tanjung Unggat menyukai kegiatan keagamaan sedangkan Tanjungpinang Timur menyukai peringatan hari besar keagamaan. Khusus Dompok dan Penyengat menyukai pentas seni dan budaya.

Tabel 16 Kegiatan Sosialisasi Partai yang Disukai Perempuan

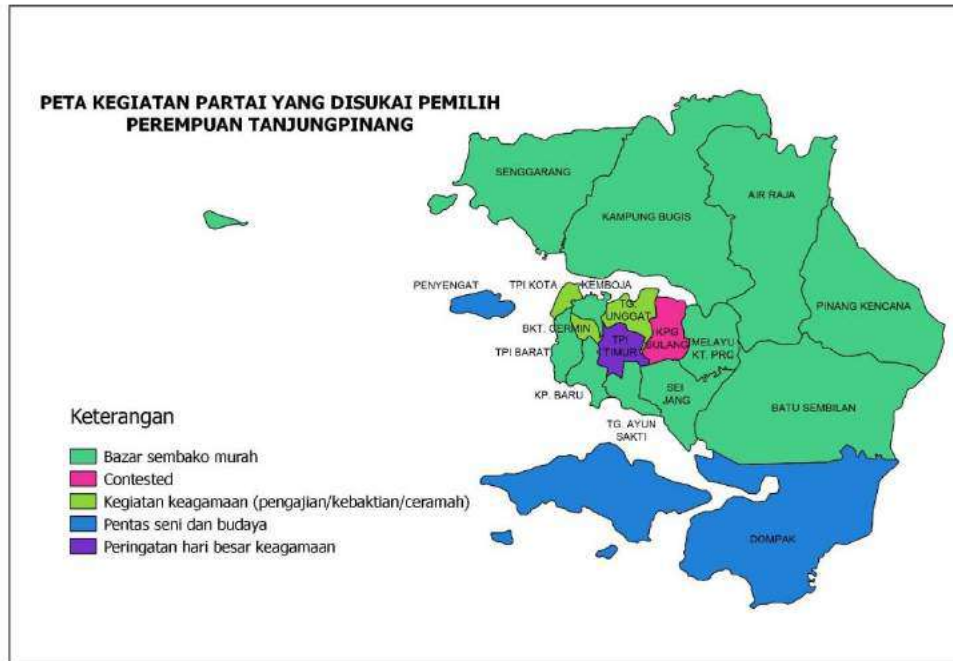
Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Air Raja	27.81%	22.46%	4.81%	0.00%	9.09%	10.16%	21.93%	0.00%	3.74%	100.00%
Batu IX	21.97%	9.64%	11.21%	4.04%	18.39%	14.57%	14.35%	0.00%	5.83%	100.00%
Bukit Cermin	18.50%	35.26%	11.56%	0.00%	12.14%	0.00%	8.09%	2.89%	11.56%	100.00%
Dompok	10.61%	23.33%	0.00%	12.73%	4.24%	24.24%	6.36%	0.00%	18.48%	100.00%
Kampung Baru	26.46%	20.83%	19.58%	2.08%	23.96%	6.04%	1.04%	0.00%	0.00%	100.00%
Kampung Bugis	17.00%	7.10%	11.22%	13.86%	15.51%	11.06%	3.96%	9.74%	10.56%	100.00%
Kampung Bulang	14.57%	14.95%	10.05%	8.54%	10.05%	10.68%	14.95%	5.90%	10.30%	100.00%
Kemboja	22.97%	17.73%	15.70%	5.23%	14.83%	6.98%	4.94%	1.45%	10.17%	100.00%
Melayu Kota Piring	44.24%	18.18%	9.70%	4.24%	8.48%	5.45%	1.21%	0.00%	8.48%	100.00%
Penyengat	12.68%	10.14%	10.14%	0.00%	0.00%	37.32%	0.00%	0.00%	29.71%	100.00%
Pinang Kencana	29.34%	23.97%	2.07%	0.00%	23.55%	5.79%	15.29%	0.00%	0.00%	100.00%
Sei Jang	25.45%	6.29%	12.57%	12.28%	6.29%	23.95%	7.19%	0.00%	5.99%	100.00%
Senggarang	28.54%	9.28%	7.42%	1.62%	20.42%	9.05%	0.00%	12.53%	11.14%	100.00%
Tanjungpinang Barat	24.82%	19.50%	2.48%	21.99%	9.22%	11.70%	4.96%	0.00%	5.32%	100.00%
Tanjungpinang Kota	9.34%	22.53%	0.00%	13.19%	4.95%	20.33%	20.88%	0.00%	8.79%	100.00%
Tg. Pinang Timur	17.23%	12.15%	9.04%	3.95%	11.30%	10.45%	18.93%	0.00%	16.95%	100.00%
Tg. Unggat	10.26%	53.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.90%	0.00%	0.00%	100.00%
Tg. Ayun Sakti	25.67%	3.74%	15.51%	9.09%	24.06%	11.23%	0.00%	0.00%	10.70%	100.00%
Grand Total	20.58%	16.69%	9.30%	6.77%	12.71%	12.19%	9.61%	2.79%	9.36%	100.00%

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Keterangan

1	Bazar sembako murah
2	Kegiatan keagamaan (pengajian/kebaktian/ceramah)
3	Lomba memasak
4	Panggung hiburan/konser musik
5	Pengobatan massal
6	Pentas seni dan budaya
7	Peringatan hari besar keagamaan
8	Pernikahan massal
9	Pertandingan olahraga

Gambar 9 Kegiatan Partai Politik yang Disukai oleh Pemilih Perempuan



5.5. Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan

Berdasarkan uji statistika deskriptif atas trend kecenderungan pemilih perempuan. Visualisasi dan uji spasial tidak diperlukan karena pola jawaban responden secara spasial cenderung homogen. Dari Grafik 29 didapati bahwa bagi pemilih perempuan kesamaan ideologi adalah hal utama dalam memilih calon tanpa membedakan jenis kelamin. Responden juga menyatakan faktor ketaatan beragama adalah hal terpenting kedua setelah kesamaan ideologi. Selain itu para pemilih perempuan cenderung akan memilih calon yang mereka kenal dengan baik tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Pemilih juga berpendapat bahwa tidak ada jaminan memilih calon perempuan akan membuat mereka memiliki wakil rakyat yang membela perempuan.

Mayoritas responden juga menyuarakan beberapa hal mengenai trend kecenderungan pemilih perempuan diantaranya: Saran kampus tidak diperlukan dalam pemilihan calon, ketampanan lelaki bukanlah hal yang penting dalam pemilihan calon, faktor kesukaan dan himbauan tokoh agama tidak menjadi batasan mereka dalam memilih calon legislatif.

Menutup analisa di sub bab ini, para responden menyatakan tidak setuju apabila dikatakan calon perempuan lebih banyak mempunyai keterbatasan dan kelemahan berbanding calon laki-laki. Kesemua hal diatas menegaskan bahwa pemilih perempuan bersifat adil dan rasional.

5.6. Analisa Prioritas Pembangunan

Secara umum ada empat prioritas pembangunan yang diharapkan oleh pemilih perempuan. Hal itu terlihat dari Grafik 30 berupa titik titik puncak dari grafik tersebut. Visualisasi spasial tidak dilakukan karena pola grafik yang cenderung sama untuk masing masing kelurahan, sehingga variasi spasial tidak akan berbeda terlalu jauh.

Keempat prioritas pembangunan tersebut adalah:

- 1) Membuka lapangan pekerjaan,
- 2) Tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin,
- 3) Memperbaiki pengelolaan sampah, dan
- 4) Memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik.

Perlu digaris bawahi adanya harapan pemilih perempuan untuk memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik. Hal ini mengingat sejarah Tanjungpinang yang belum pernah mengalami konflik SARA dalam skala yang besar. Sehingga, harapan tersebut menjadi pertanyaan yang layak ditelusuri, apakah hal tersebut walaupun belum pernah terjadi tetapi saat ini dirasakan masyarakat? Dimanakah titik-titik kerawanan konflik tersebut? Hal ini memerlukan penelitian tersendiri diluar penelitian ini.

5.7. Analisa Kriteria Calon Pemimpin

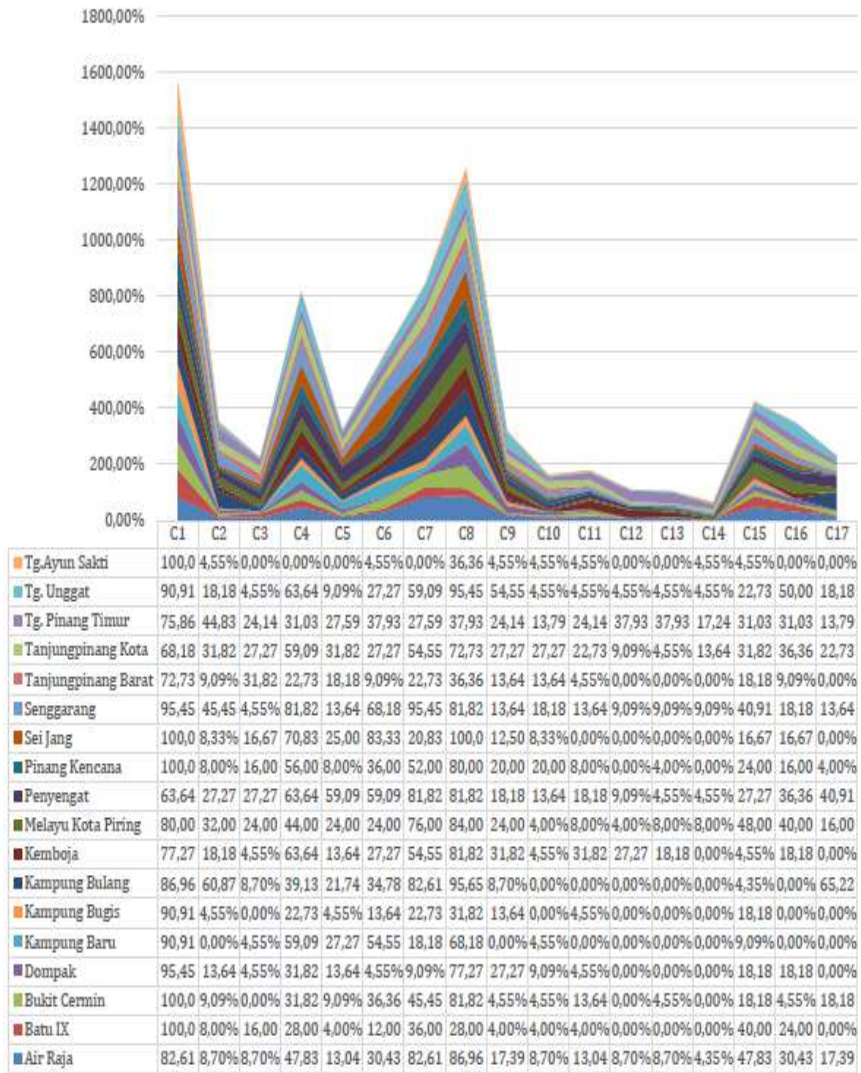
Grafik 30 menggambarkan harapan pemilih perempuan terhadap calon pemimpin. Beberapa point yang menjadi harapan mereka adalah:

- 1) Memiliki kemampuan memimpin dan professional,
- 2) Mencintai dan peduli rakyat miskin,
- 3) Taat beragama,
- 4) Tegas dan berani menegakkan hukum,
- 5) Mampu merangkul semua pihak untuk mempercepat pembangunan,
- 6) Memiliki sifat amanah, dan
- 7) Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan adanya ketujuh point kriteria calon pemimpin ideal bagi pemilih perempuan di Tanjungpinang tersebut, bukan berarti point-point lain dari 17 parameter pemimpin yang telah ditetapkan dalam penelitian ini menjadi kurang penting. Point-point yang lain tetap penting sebagaimana terlihat dari ukuran nilai mereka pada Grafik 31. Hanya saja, ketujuh point di paragraph pertama sub bab ini merupakan point prioritas harapan pemilih perempuan.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Grafik 26 Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan
Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan

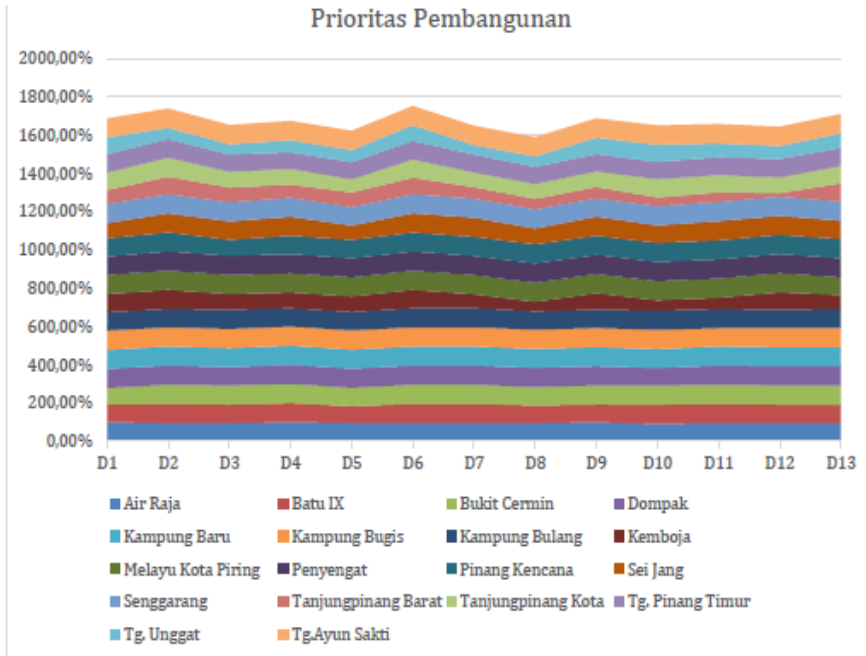


Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Keterangan:

No.	Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan
C1	Saya memilih calon dalam pemilu/pileg/pilgub/pilwako yang memiliki ideologi perjuangan sama tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan
C2	Wanita memiliki lebih banyak keterbatasan dan kelemahan menjadi pemimpin berbanding laki-laki
C3	Laki-laki tampan (ganteng) memiliki daya tarik tersendiri untuk saya pilih ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako
C4	Yang paling saya kenal dengan baik akan saya pilih dalam pemilu/pileg/pilgub/pilwako tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan
C5	Saya memilih calon yang se-suku dengan saya tanpa melihat apakah ia laki-laki atau perempuan
C6	Saya memilih calon yang diusung oleh partai idola saya walaupun calon tersebut laki-laki
C7	Saya yakin dengan ajaran agama saya bahwa yang paling layak menjadi pemimpin adalah laki-laki
C8	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako yang paling taat mengamalkan agama
C9	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran dari Suami
C10	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan himbauan dari tokoh agama
C11	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan rekomendasi dari tokoh masyarakat yang saya kagumi
C12	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran teman kerja
C13	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran dari jiran/tetangga
C14	Saya memilih calon pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako berdasarkan saran kampus/sekolah
C15	Tidak ada jaminan jika saya memilih calon perempuan pada pemilu/pileg/pilgub/pilwako bahwa ia akan memperjuangkan hak saya sebagai warga
C16	Calon yang saya pilih ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako adalah yang memiliki hubungan keluarga dengan saya
C17	Saya tidak tertarik dengan calon perempuan ketika pemilu/pileg/pilgub/pilwako karena sudah banyak bukti bahwa perempuan gagal menjadi pemimpin

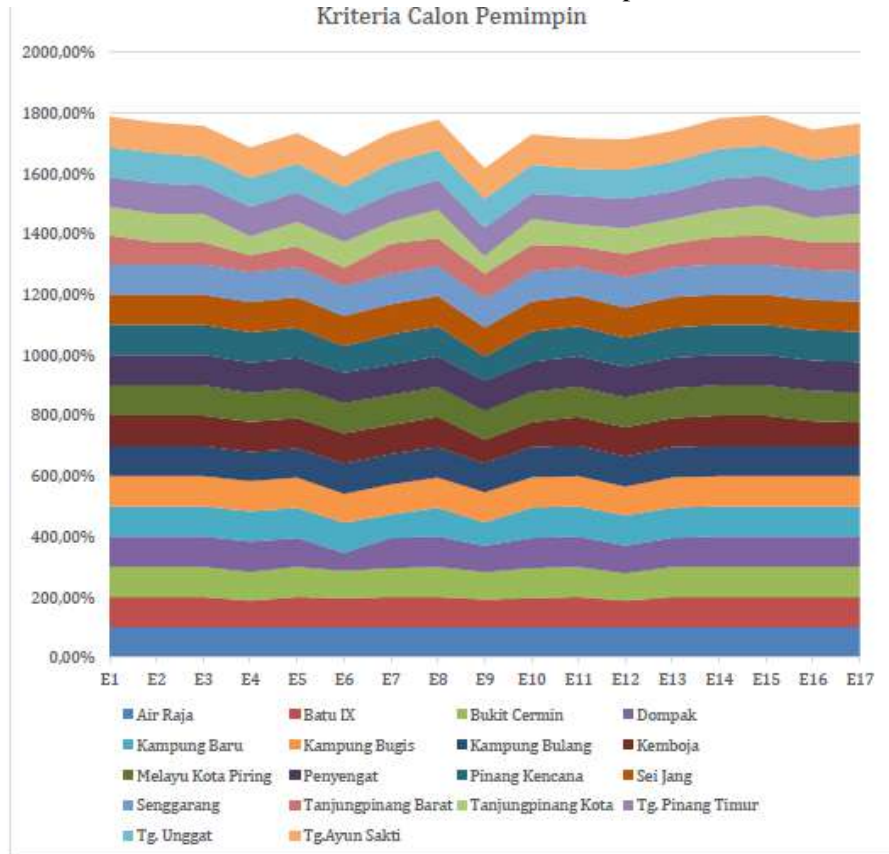
Grafik 27 Prioritas Pembangunan
Prioritas Pembangunan



Keterangan:

No.	Prioritas Program Pembangunan Walikota/Wakil Walikota Yang Akan Datang
D1	Membangun infrastruktur (jalan, jembatan, dsb)
D2	Membuka lapangan pekerjaan
D3	Menurunkan biaya hidup
D4	Memberantas korupsi
D5	Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi
D6	Tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
D7	Menurunkan angka kriminalitas
D8	Menyediakan perumahan yang murah
D9	Memperbaiki pengelolaan sampah
D10	Menyediakan fasilitas keagamaan
D11	Meningkatkan program pemberdayaan fakir & miskin
D12	Cepat tanggap terhadap bencana alam (asap, banjir, longsor, dsb)
D13	Memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik

Grafik 28 Kriteria Calon Pemimpin
Kriteria Calon Pemimpin



Keterangan :

No.	Kriteria Calon Pemimpin Pada Pemilu/Pileg/Pilgub/Pilwako
E1	Memiliki kemampuan memimpin dan profesional
E2	Bersih dari korupsi
E3	Mencintai dan peduli rakyat miskin
E4	Mencontohkan kesederhanaan hidup
E5	Taat beragama (memiliki ciri-ciri orang shaleh)
E6	Memiliki prestasi yang patut dibanggakan
E7	Sangat mengetahui kebutuhan rakyat Kepulauan Riau
E8	Tegas dan berani menegakkan hukum
E9	Peduli dengan pengembangan budaya Melayu
E10	Mampu merangkul semua pihak untuk mempercepat pembangunan
E11	Memiliki kharisma dan wibawa sebagai pemimpin
E12	Memiliki pengalaman sebagai pemimpin
E13	Tidak terlibat skandal yang mencemarkan nama baik
E14	Sangat peduli dengan aspek pendidikan
E15	Memiliki sifat amanah (tidak khianat)
E16	Melakukan pemerataan pembangunan
E17	Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah

5.8. Pembahasan

5.8.1 Ketidaktahuan Terhadap Caleg Perempuan Ditinjau dari Demografi

Dari beberapa hasil temuan dalam penelitian terkait dengan “Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum”, ditemukan beberapa hal diantaranya adalah bahwa “tingkat pengetahuan pemilih” ditentukan oleh beberapa

aspek diantaranya adalah aspek demografi. Tempat tinggal atau domisili pemilih turut memberikan kontribusi terhadap tingkat pengetahuan terhadap calon. Semakin “kota” domisili pemilih maka akan semakin meningkatkan tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon. Dalam konteks pendekatan sosiologi sering disebut sebagai aliran pemikiran Colombia. Teori ini menyatakan bahwa perilaku mayoritas pemilih sangat dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosial-ekonomi, agama dan kawasan tempat tinggal pemilih. Antara ilmuwan yang mengembangkan teori ini adalah Lipset (1960). Hasil kajian ini mendukung pendapat Lipset dalam kelompok aliran Colombia bahwa kawasan tempat tinggal pemilih turut mempengaruhi pengetahuan dan persepsi pemilih. Dapatan kajian menarik adalah kelurahan yang didaerah kota seperti Bukit Cermin (59.09%) dan Air Raja (52.17%) tingkat pengetahuannya rendah seperti mana daerah pinggiran seperti Senggarang (59.09%). Frekuensi ketidaktahuan di tiga wilayah ini cukup signifikan. Kondisi ini berlawanan dengan asumsi dengan pernyataan diatas bahwa “semakin kota” domisili pemilih maka akan semakin meningkatkan tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon”.

Menjawab permasalahan ini, maka tim peneliti menelusuri demografi penduduk di kedua wilayah Bukit Cermin dan Air Raja, dan ternyata mayoritas responden di daerah tersebut adalah ibu rumah tangga, dengan komposisi 54,55% dan 39,13% masing masing untuk Bukit Cermin dan Air Raja, dan di kedua kelurahan tersebut, ibu rumah tangga merupakan komponen terbesar responden. Di lain pihak, komposisi pemilih perempuan dengan latar belakang ibu rumah tangga di Senggarang berjumlah 22,73%. Yang mana, di Senggarang, ibu rumah tangga bukan merupakan komponen utama penyusun responden. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita di daerah perkotaan

komponen ibu rumah tangga merupakan komponen utama faktor ketidaktahuan pemilih perempuan, sedangkan di daerah pinggiran seperti Senggarang, faktor isolasi geografislah yang merupakan penyumbang utama ketidaktahuan.

Disamping aspek geografis, aspek usia juga berkontribusi terhadap tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon. Kematangan umur pemilih turut mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Semakin tinggi usia pemilih, maka semakin tinggi tingkat ketidaktahuannya terhadap calon. Sebaliknya semakin muda usia pemilih maka tingkat pengetahuan terhadap calon akan semakin tinggi. Kondisi umur pemilih mempengaruhi rasa ingin tau siapa caleg yang akan dipilih, dari partai mana, bagaimana *track record*-nya, pernahkah ia terlibat kasus (korupsi, kriminal, narkoba dan sebagainya). Bagaimana pemilih merespon dan bersikap terhadap cara kampanye caleg, menilai karakter caleg juga dipengaruhi oleh umur pemilih.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa responden dengan tingkat usia kurang dari 35 tahun memiliki tingkat pengetahuan terhadap calon anggota legislatif yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan responden dengan tingkat usia diatas 36 tahun. Pemilih pemula memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi berbanding pemilih yang sudah berumur (tua). Pemilih pemula yang masih muda memiliki kemampuan berfikir cerdas sebab mereka tidak mau lagi ditipu oleh para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurut Bismar Arianto (2011) bahwa sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai

konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan “kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji”.

Pemilih perempuan akan berfikir bagaimana mungkin para caleg akan memikirkan nasib mereka jika sesama caleg saja terjadi konflik. Kapan mereka akan memikirkan rakyat, sedangkan perilaku mereka menunjukkan orang-orang yang ambisius dan serakah dengan jabatan dan kekuasaan.

Selanjutnya jika ditinjau dari faktor suku, terlihat bahwa Suku Bugis dan Buton memiliki angka ketidaktahuan yang sangat rendah dan sangat kontras jika dibandingkan dengan Suku Tionghoa yang mempunyai tingkat ketidaktahuan yang tinggi. Penulis berpendapat bahwa Suku bugis dan buton merupakan residen di provinsi Kepri yang jumlahnya sebesar 2.22%. Jumlah yang tidak terlalu besar bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka untuk lebih “melek” secara politik. Sementara itu, untuk kondisi terbalik yang terjadi pada masyarakat Etnis Tionghoa yang jumlahnya hanya 7,7% merupakan satu fenomena yang tidak terlalu baru karena memang etnis ini lebih punya kecenderungan untuk fokus pada perniagaan dan minim sekali yang punya perhatian (melek) terhadap politik.

Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan yang kuat dengan kesadaran politik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat ke-tahuan dari mereka yang level pendidikannya menengah ke atas (SMA hingga S1) terhadap keberadaan caleg perempuan sangat tinggi. sementara untuk sampel S2

yang hanya terdiri dari 1 orang dan ternyata tidak mengetahui, tidak bisa memenuhi syarat untuk digeneralisasikan dan perlu diuji lagi dengan jumlah sample yang lebih lebar.

Tingkat pendapatan/ekonomi juga juga menunjukkan relasi yang penting dengan ke-tahuan masyarakat terhadap caleg perempuan dalam penelitian ini. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan penghasilan di atas 4 juta rupiah memiliki ke-tahuan 100% terhadap caleg perempuan. Argumentasi rasional dari temuan ini adalah bahwa kalangan dengan pendapatan tinggi cenderung punya akses yang luas terhadap informasi politik yang ditunjang oleh kemampuan finansial mereka untuk mengakses lewat media yang lebih variatif -disamping televisi dan surat kabar- seperti internet atau media online lewat gadget/atau smartphone. Disamping itu, kalangan dengan penghasilan tinggi biasanya punya segmentasi pergaulan pada kalangan yang memiliki wawasan termasuk politik. Hal ini pernah ditulis oleh Rokkan & Lipset (1967) yang menyatakan bahwa status sosial-ekonomi juga merupakan faktor dominan dalam menentukan tingkah laku pemilih. Ini bermakna kondisi ekonomi pemilih digunakan oleh pemilih sebagai landasan untuk menentukan pilihan ketika mencoblos.

Menutup sub bab pembahasan ini, akan dipaparkan faktor ketidaktahuan pemilih perempuan terhadap caleg perempuan dari segi status sosial. Dibandingkan dengan beberapa status sosial lainnya, ibu rumah tangga menunjukkan angka ketidaktahuan yang relatif lebih tinggi yakni sebesar 17,99% namun tidak dapat dikatakan signifikan. Artinya, memang terdapat kecenderungan bagi ibu rumah tangga tidak punya perhatian terhadap informasi politik yang spesifik seperti caleg perempuan. Mereka tidak sepenuhnya abai perhatiannya terhadap politik tetapi kadang tidak sampai

pada hal spesifik, akan tetapi tetap masih banyak yang juga mengetahui. Biasanya mereka yang terpapar informasi adalah mereka yang tergabung dalam kegiatan majelis taklim ataupun kader posyandu. Beberapa aspek demografi seperti agama, status pernikahan dan perumahan tidak didetailkan di bagian analisa ketidaktahuan pemilih perempuan terhadap caleg perempuan karena temuan ketiga faktor tersebut bersifat seragam tanpa adanya fluktuasi nilai yang terlalu mencolok.

5.8.2 Efektivitas Media Info Pemilu

Jika ditinjau dari hasil temuan di Sub Bab 5.1 Gambar 3, dimana hampir mayoritas responden perempuan di Tanjungpinang memilih TV/Radio serta Baliho/Spanduk sebagai media efektif penyampaian pesan pemilu. Media memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan informasi pemilu dan siapa caleg yang akan dipilih kepada masyarakat. Menurut Siti Aminah (2008), terdapat tiga pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh kepentingan khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis". Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal. Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor tersebut. Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers. Sementara para

jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi. Masih dalam catatan saya tentang politik media, jurnalis menilai suara jurnalistik, paling tidak, sama besarnya dengan para pembaca dalam jumlah besar, dan para jurnalis ini sama sekali tidak ingin membantu politisi untuk menerbitkan berita mereka kepada publik. Jika jurnalis selalu saja menyampaikan berita yang dikehendaki politisi, atau hanya melaporkan berita politik yang sesuai dengan keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan menjadi profesi yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi menjadi sebuah profesi.

Akan tetapi hal ada temuan menarik tentang media info pemilu di Kelurahan Pulau Penyengat yang didominasi oleh informasi yang bersumber dari teman/keluarga/saudara. Hal yang perlu menjadi amatan terkait Pulau Penyengat adalah "Social Setting" masyarakatnya. Pulau ini nyarisnya menjadi villa untuk beristirahat bagi masyarakatnya, dimana kebanyakan aktivitas harian berlangsung di luar pulau. Frekuensi mobilitas masyarakat ke luar pulau pada siang hari sangat tinggi baik untuk pergi bekerja, berbelanja keperluan harian, pergi sekolah/kuliah yang membuat mereka harus menyebrang ke kota. Artinya, sangat sedikit peluang bagi masyarakat penyengat untuk berada di rumah bersantai sambil menonton TV. Informasi lebih mungkin di dapatkan dari pembicaraan dari Teman/Keluarga/Saudara yang tidak jarang juga mendapat informasi ketika mereka berada di kota.

5.8.3 Politik Uang

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia (Ibrahim Z. Fahmy Badoh & Abdullah Dahlan, 2010). Terkait dengan adanya praktik Politik Uang atau money politic, daerah yang “terbelakang” memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dan rentan terhadap politik uang. Kelurahan Kampung Bugis serta Kelurahan Kamboja adalah dua Kelurahan yang rentan terhadap terjadinya praktek Politik Uang. Pemilih di kedua Kelurahan ini lebih “permissig” terhadap politik uang sebagaimana terlihat dalam Gambar 4. Mengapa pemilih perempuan Kampung Bugis dan Kamboja cenderung menerima uang?. Pemilih cenderung menerima uang apabila mereka berada dalam keadaan miskin (tekanan ekonomi), adanya keperluan yang mendesak atau menganggap musim pemilu adalah waktu yang sesuai untuk mendapatkan sesuatu dari caleg yang selalu ditunggu setiap lima tahun sekali.

Menurut Radityo Rizki Hutomo (2015), beban biaya yang harus dikeluarkan untuk terjun dalam dunia politik tidaklah sedikit, ada banyak hal yang menjadi beban biaya pengeluaran mulai awal sampai akhir masa kampanye, mulai dari biaya atribut-atribut pencetakan kaos, pamflet, spanduk, reklame, iklan di televisi dan beberapa media cetak hingga biaya -biaya yang harus dikeluarkan untuk tim sukses dan beberapa pengeluaran lainnya yang lebih banyak adalah jika calon legislatif tersebut memilih jalur serangan fajar sebagai strategi pamungkas menjelang beberapa jam sebelum

pencoblosan dilaksanakan juga memakan biaya yang sangat besar. Sehingga tidak jarang untuk menjadi wakil rakyat saja mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan harus mencari jalan keluar untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan ketika sedang berkampanye, dan tentu jalan-jalan yang digunakan tidak berjauhan dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Hal ini yang semakin memicu meningkatnya tindak pidana korupsi. Sebenarnya proses politik uang bukan hanya aktor politiknya saja yang salah tapi masyarakat yang menjadi sasaran politik uang dalam serangan fajar ketika pemilu juga menjadi faktor yang juga mengondisikan keyakinan aktor politik praktis untuk terus mempercayakan uangnya kepada konstituennya. Andai saja politikus pragmatis itu dibuat jera oleh konsituen yang mendapatkan serangan fajar dengan tidak memilih calon legislatif yang memberikannya uang maka tentu praktik politik uang serangan fajar dalam pemilu tidak akan terjadi karena sudah tidak ada lagi yang akan berani mempercayakan uangnya untuk diberikan ke konstituen yang dianggapnya berpotensi untuk berkhianat. Karena praktik politik uang dalam wujud serangan fajar itu tidak memberikan pendewasaan politik bagi masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara geografis, wilayah Kamboja terletak di area pusat kota. Lebih penting dari itu, kawasan ini merupakan area padat penduduk. Dua kondisi strategis ini membuat kamboja menjadi daerah yang potensial terpapar secara intens bagi kampanye politik baik termasuk dengan politik uang. Dualisme perilaku politik dari masyarakat kota antara rasionalitas dan pragmatime. Mereka bisa saja adalah pemilih rasional, akan tetapi kalau ada yang menawarkan uang mereka tetap terima walaupun belum tentu mengubah pilihan pribadi yang sudah mereka pertimbangkan. Kondisi sebaliknya berlaku pada Kampung Bugis. Kawasan

pinggiran kota seperti ini sering jadi sasaran politik uang karena pemilih relatif mudah dipengaruhi pilihannya, apalagi jika tim sukses menggaet tokoh masyarakat lokal sebagai tim pemenang.

5.8.4 Preferensi Partai

Gambar 5, 6, dan 7 menggambarkan preferensi pemilih perempuan terhadap partai pada Pemilu 2014, kondisi saat ini, dan kecendrungan di Pemilu 2019. Sebagaimana terlihat pada Gambar 5, PDIP mendominasi di 16 kelurahan dibanding Golkar dan Gerindra di satu kelurahan pada Pemilu 2014. Gambar 6 menunjukkan preferensi terhadap PDI menurun menjadi 7 kelurahan, sedangkan Golkar 2 kelurahan, dan Gerindra kehilangan daerah preferensi pada kondisi saat ini. Sisanya belum menentukan pilihan. Hal yang menarik ditemukan pada Gambar 7, dimana hanya pemilih PDIP yang telah menetapkan pilihan di tujuh kelurahan. Sisanya didominasi oleh pemilih yang belum menentukan pilihan. Menyikapi hal ini perlu dilakukan suatu penelitian tersendiri untuk menjawab faktor faktor penentu preferensi pilihan partai pemilih perempuan beserta analisa spasial versus demografi daerah tersebut. Hanya saja untuk penelitian kali ini bisa disimpulkan bahwa dominasi partai pilihan perempuan adalah PDIP dan merekapun termasuk pemilih yang loyal.

Temuan yang menarik dalam kajian ini adalah tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Mengapa pemilih bingung dalam memilih partai?. Apakah ini indikasi bahwa pemilih semakin apatis dan tidak percaya terhadap partai politik?. Ghazali Mayudin (1999) menyatakan bahwa perubahan dalam identifikasi partai terjadi disebabkan oleh faktor pribadi dan faktor sosial seperti perkawinan, pekerjaan dan perpindahan tempat tinggal.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Selain itu, wujud faktor-faktor lain seperti perubahan besar dalam masyarakat dan aturan baru dari partai turut mengubah kesetiaan individu terhadap partai. Kesetiaan terhadap suatu partai dipengaruhi oleh faktor prestasi partai. Sekiranya sebuah partai memerintah dalam keadaan ekonomi yang baik, maka individu akan setia kepada partai tersebut. Sebaliknya, jika partai ini gagal memerintah dan prestasi ekonomi tidak memuaskan, mereka tidak akan mendukung partai tersebut. Ikatan kesetiaan terhadap sesuatu partai adalah suatu yang susah karena ia melibatkan persoalan emosi yang bisa menyebabkan seseorang itu memilih partai lain atau tidak hadir dalam pemilu. Aspek kepentingan pemilih merupakan faktor penting dalam menentukan dan mempertahankan identitas partai. Apabila kepentingan mereka diyakini dapat terpenuhi oleh partai tertentu, maka pemilih akan memilih partai tersebut tanpa mempertimbangkan calon dan isu yang dikampanyekan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemilih tidak memberikan dukungan dan kesetiaan kepada sebuah partai kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Kesuksesan sebuah partai memenuhi persyaratan yang diberikan pemilih dalam berbagai bentuk baik jangka pendek maupun jangka panjang merupakan dasar kepada dukungan dan kesetiaan pemilih kepada partai politik.

5.8.5 Faktor yang mempengaruhi pemilihan partai oleh pemilih perempuan

Apabila dibandingkan faktor pemilihan partai dengan demografi maka beberapa point demografi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Faktor faktor tersebut adalah tempat tinggal (kelurahan domisili), pekerjaan, agama, dan umur. Faktor faktor demografi lain seperti status sosial, pendidikan, pendapatan, status pernikahan dan perumahan tidak

menunjukkan fluktuasi nilai yang signifikan sehingga cukup dijelaskan dibagian hasil (sub bab 5.1.1-5.1.10).

Mengacu kepada data survai tempat tinggal, Sei Jang, TPI Timur dan Tanjung Unggat termasuk wilayah yang menolak dengan tegas politik uang. Sikap anti politik uang yang ditunjukkan oleh masyarakat sejalan dengan perilaku memilih mereka yang menstandarkan aspek bebas korupsi menjadi faktor terpenting dalam pertimbangan memilih. Artinya, kondisi ini juga konsisten dengan karakteristik masyarakat “center” yang cenderung terdidik, lebih kritis dan terbuka dalam menerima edukasi politik, sehingga sangat potensial menjadi pemilih yang rasional.

Lain halnya dengan Batu IX, Dompok dan Senggarang yang menjadikan tokoh dalam partai sebagai faktor penentu pemilihan partai. Secara geografis, Senggarang dan Dompok adalah wilayah yang jauh dari pusat kota. Secara umum, kawasan pinggiran kota memiliki masyarakat yang memiliki corak interaksi sosial yang masih mementingkan ketokohan. Karakteristik sosial yang melekat di masyarakat ini tentu mempengaruhi perilaku politik mereka dalam memilih, terlebih jika faktor ketokohan tersebut juga didukung oleh keterpautan wilayah (berasal dari daerahnya).

Manakala di Kampung Bugis, TPI Kota dan Kampung Bulang, faktor ketua umum sebagai faktor terpenting dalam pemilihan partai. Sikap kritis dan keluasan wawasan selaknya menjadi karakteristik masyarakat di wilayah center. Aspek inilah yang teridentifikasi dalam masyarakat kawasan Kampung Bugis dan Kampung Bulang sebagai wilayah yang relatif dekat dengan center. Kekritisannya dan wawasan politik menjadi faktor yang menggiring sikap politik mereka untuk menjadi sangat selektif dalam menentukan pilihan. Faktor ketua umum partai dipandang sebagai indikator dari kelayakan dan kekuatan pengaruh dari calon. Perspektif ini sebenarnya

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

cenderung yang tidak menguntungkan bagi caleg perempuan mengingat bahwa perempuan yang menjabat ketua partai di Kepulauan Riau hampir tidak ada mengingat masih rendahnya jumlah keterlibatan atau partisipasi politik perempuan di dalam kepartaian.

Sejalan dengan Kamboja dan Bukit Cermin yang menjadikan platform/visi dan misi sebagai faktor terpenting. Sikap kritis masyarakat pusat kota menjadi pemicu berkembangnya perilaku pemilih rasional. Seleksi masyarakat terhadap calon yang akan mereka dukung dengan berdasarkan pada platform/visi dan misi adalah bentuk kekritisian.

Masyarakat Pulau Penyengat memiliki sisi etnik yang sangat khas. Karakter masyarakat Melayu yang filosofis cukup mewarnai karakter masyarakat Penyengat. Situs-situs budaya yang ada di penyengat menunjukkan sisi religiusitas masyarakat sehingga sangat memungkinkan hal ini mempengaruhi pilihan politik mereka pada aspek yang bersifat ideologis terutama yang bernafaskan religi. Artinya, sosok yang religious dari partai yang beraliran religi lebih mungkin untuk dapat meraup banyak konstituen di wilayah ini.

Dalam parameter pekerjaan, ASN dan Pengusaha tidak menjadikan faktor bebas korupsi sebagai faktor yang penting dalam pemilihan partai, beranding terbalik dengan IRT dan buruh. Tidak dominannya kecedrungan ASN dan Pengusaha terhadap faktor bebas korupsi dalam memilih adalah temuan yang menarik dalam penelitian ini. Terlebih lagi dikotradiksikan dengan kecendrungan yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Jika kita berpatokan pada fenomena umum, ibu rumah tangga bisa dikatakan sebagai kelompok yang paling duluan merespon perubahan harga kebutuhan pokok sebagai kosekwensi dari gejolak ekonomi. Persoalannya adalah, gejolak harga sering

kali diasosiasikan oleh para ibu rumah tangga dengan maraknya korupsi. Artinya kontradiksi ini pada dasarnya tidaklah ekstrim, akan tetapi respon ibu rumah tangga lebih menonjol hanya karena mereka biasanya lebih reaktif terhadap hal-hal yang berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama berkaitan dengan peningkatan harga kebutuhan hidup tersebut.

Dalam parameter agama, ditemukan bahwa bebas korupsi bukan faktor yang penting bagi penganut Budha. Pada dasarnya, ajaran agama bukanlah faktor penjelas untuk kasus ini. Bukanlah esensi ajaran agama budha yang membuat penganutnya tidak mementingkan faktor anti korupsi sebagai pertimbangan dalam memilih. Untuk konteks Tanjungpinang ataupun Kepri dalam konteks yang lebih luas, hampir seluruh penganut agama Budha adalah dari etnis Tionghoa. Temuan data penelitian ini sebenarnya berkaitan dengan etnis Tionghoa dan kecenderungan perilaku politiknya. Sebagaimana temuan yang ditunjukkan oleh Grafik 14, bahwa etnis ini paling tinggi ketidaktahuannya terhadap caleg perempuan. Artinya adalah, penganut Budha yang terlihat tidak mementingkan faktor anti korupsi merupakan efek dari penganut dari Etnis tionghoanya yang memang memiliki kecenderungan apatis atau tidak melek politik dan bukan karena efek dari esensi keyakinan agama Budha itu sendiri.

Hasil penelitian ini (Grafik 13) menemukan kondisi bahwa kelompok umur >55 tahun paling rendah pengetahuannya terhadap caleg perempuan. Kelompok usia lanjut, merupakan segmentasi pemilih yang paling terbatas potensinya untuk terpapar informasi politik karena media yang mereka akses terbatas karena gagap dalam penggunaan teknologi mutakhir seperti internet dan berbasis smart phone yang saat ini merupakan media yang masif digunakan untuk sosialisasi politik. Masalah lain, mobilitas mereka di segmen

usia tersebut juga sudah terbatas karena pada umumnya pada rentang usia pensiun, lebih banyak waktu dihabiskan di rumah atau di lingkungan yang terbatas dibandingkan dengan saat masih di usia produktif bekerja.

5.8.6 Trend Kecenderungan Pemilih Perempuan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih perempuan dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya adalah keadaan politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini sangat menentukan perilaku pemilih perempuan dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif tersebut. Apapun perilaku yang dilakukan oleh manusia bukanlah terjadi dengan sendirinya tetapi ada faktor yang menggerakkan baik faktor dari luar maupun faktor dalam diri pemilih. Sistem nilai dan kepercayaan pemilih, tingkat pengalaman, pendidikan, tingkat ekonomi serta status sosial dari setiap pemilih perempuan merupakan antara banyak faktor yang menggerakkan perilaku pemilih. Teori perilaku pemilih yang akan dibahas dalam Bab ini terdiri dari tiga aliran pemikiran yang berbeda, yaitu pendekatan sosiologi, identifikasi partai dan pilihan rasional. Teori ini sudah sangat populer dan banyak digunakan oleh para peneliti dan akademisi.

Berdasarkan uji statistika deskriptif atas trend kecenderungan pemilih perempuan. Visualisasi dan uji spasial tidak diperlukan karena pola jawaban responden secara spasial cenderung homogen. Hasil kajian menunjukkan bahwa bagi pemilih perempuan kesamaan ideologi adalah hal utama dalam memilih calon tanpa membedakan jenis kelamin (Grafik 29). Perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : orientasi agama, faktor kelas sosial dan kelompok sosial lainnya, faktor kepemimpinan dan ketokohan, faktor identifikasi, orientasi isu, orientasi

kandidat, kaitan dengan peristiwa (Nursal Adman 2004). Pendapat Nursal Adman (2004) diperkuat oleh hasil kajian yang membuktikan bahwa kesamaan ideologi, keyakinan, cara pandang dan nilai sosial dominan mempengaruhi pemilih perempuan dalam menentukan pilihan. Pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh faktor ketaatan beragama adalah hal terpenting kedua setelah kesamaan ideologi. Dalam konteks pendekatan sosiologikal, Lazarsfeld *et al.* (1944) menyatakan bahwa perilaku mayoritas pemilih sangat dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosio-ekonomi, agama dan kawasan tempat tinggal pemilih. Semakin taat seorang calon legislatif, maka akan semakin tinggi pula jumlah pemilih perempuan yang akan memilihnya ketika pemilu legislatif.

Faktor agama, etnik dan status sosial-ekonomi juga merupakan faktor dominan dalam menentukan tingkah laku pemilih. Ini bermakna hubungan sosial digunakan oleh pemilih sebagai landasan untuk mendapatkan nasehat dan mengatasi keraguan dalam memutuskan pilihan ketika mencoblos. Perkembangan aliran pemikiran sosiologikal ini diteruskan lagi Rokkan & Lipset (1967). Pendapat mereka menyatakan bahwa lokasi tempat tinggal, jenis pekerjaan dan keyakinan agama turut mempengaruhi tingkah laku politik masyarakat.

Selain itu para pemilih perempuan cenderung akan memilih calon yang mereka kenal dengan baik tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Pemilih juga berpendapat bahwa tidak ada jaminan memilih calon perempuan akan membuat mereka memiliki wakil rakyat yang membela perempuan. Faktor Etnis tidak mempengaruhi perilaku pemilih perempuan. Adanya rasa kedaerahan tidak mempengaruhi dukungan seseorang terhadap caleg. Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih.

Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum

Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik, karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya.

Teori yang menyatakan bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh kemampuan pemilih dalam melakukan identifikasi partai (Campbell *et al.* 1960), tidak berlaku dalam hasil kajian ini. Walaupun calon legislatif yang dipilih berasal dari partai politik tertentu, namun ternyata pilihan pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang lebih dipengaruhi oleh kedekatan hubungan ideologi, emosional dan ikatan agama. Walaupun identifikasi partai membentuk kesetiaan, tetapi bukan berarti bahwa individu yang teridentifikasi dirinya dalam partai tertentu tidak dapat mengubah ikatan kesetiaan kepada partai lain. Dalam arti kata, individu tersebut bisa berubah pikiran untuk mengalihkan pilihannya dari calon yang diusung oleh satu partai dan pindah ke caleg partai lainnya.

Perilaku pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang juga bisa jelaskan kacamata ekonomi seperti teori pilihan rasional. Ilmuan yang mengembangkan pendekatan ini adalah Verba, Nie & Kim (1978). Mereka berpendapat bahwa pilihan rasional ditimbang berdasarkan analisis mengenai biaya dan keuntungan. Rasionalitas bermaksud pemilih bertindak berdasarkan kepada kepentingan pribadi demi mencapai tujuan tersendiri. Kepentingan dan objektif ini hanya bisa direalisasikan melalui pemilu. Namun disisi lain, jika caleg yang dipilih tidak mendatangkan manfaat atau keuntungan kepada pemilih, maka ada kemungkinan mereka tidak memilih caleg tersebut. Faktor rasional dalam pemilihan adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh pemilih di mana pemilih perlu menilai kebijakan dan program yang dibuat oleh calon legislatif.

Menurut Firmanzah (2007) membagi tipologi pemilih ke dalam empat kategori yaitu:

1. Pemilih Rasional. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan dari partai mana. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan. Sifat pemilih rasional, kelihatannya menjadi ciri perilaku pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang.
2. Pemilih Kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan seorang caleg dalam menuntaskan permasalahan daerah. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang calon cukup tinggi dan tidak semudah pemilih rasional untuk berpaling ke calon lain. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai dengan kebijakan yang akan dibuat. Pemilih jenis ini harus diurus sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang calon, pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja anggota DPRD,
3. Pemilih tradisional. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan keperibadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang calon. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

4. **Pemilih Skeptis.** Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi terhadap seorang calon legislatif. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja. Dalam aspek tertentu, pemilih jenis ini lebih menonjolkan sikap pragmatisme, misalnya karena politik uang. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang agak halus agar tidak dikesankan membeli suara seperti bantuan sembako, pembangunan rumah ibadah dan sebagainya.

Mayoritas responden juga menyuarakan beberapa hal mengenai trend kecenderungan pemilih perempuan diantaranya: Saran kampus tidak diperlukan dalam pemilihan calon, ketampanan lelaki bukanlah hal yang penting dalam pemilihan calon, faktor kesukaan dan himbauan tokoh agama tidak menjadi batasan mereka dalam memilih calon legislatif.

Menutup analisa di sub bab ini, para responden menyatakan tidak setuju apabila dikatakan calon perempuan lebih banyak mempunyai keterbatasan dan kelemahan berbanding calon laki-laki. Kesemua hal diatas menegaskan bahwa pemilih perempuan bersifat adil dan rasional.

5.8.7 Analisa Prioritas Pembangunan

Secara umum ada empat prioritas pembangunan yang diharapkan oleh pemilih perempuan. Hal itu terlihat dari Grafik 30 berupa titik titik puncak dari grafik tersebut. Visualisasi spasial tidak dilakukan karena pola grafik yang cenderung sama untuk masing masing kelurahan, sehingga variasi spasial tidak akan berbeda terlalu jauh.

Terdapat 4 prioritas yang dianggap mendesak untuk segera diwujudkan oleh pemimpin terpilih. Keempat prioritas pembangunan tersebut adalah:

1. Membuka lapangan pekerjaan,
2. Tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin,
3. Memperbaiki pengelolaan sampah,
4. Memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik.

Pembangunan merupakan proses perubahan secara bertahap menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.

Sungguh satu hal yang sangat wajar jika pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang telah mengemukakan apa yang mereka perlukan dari pemerintah Kota melalui anggota legislatif yaitu, membuka lapangan pekerjaan, tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan Memperbaiki pengelolaan sampah, dan Memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik.

Pembangunan berkelanjutan daerah dilaksanakan dengan cara menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya

alam. Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan indeks pembangunan manusia termasuk aspek ketaatan beragama. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyat. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Melalui hasil kajian ini diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/gubernur/bupati secara langsung adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih mereka berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan partisipatif berarti melibatkan semua stakeholders pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Pendekatan bawah-atas dan atas-bawah dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana pembangunan diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui kajian ini sudah bisa diketahui apa yang menjadi prioritas program pembangunan yang harus disegerakan.

Perlu digaris bawahi adanya harapan pemilih perempuan untuk memperbaiki hubungan antar entik masyarakat yang terlibat konflik. Hal ini mengingat sejarah Tanjungpinang yang belum pernah mengalami konflik SARA dalam skala yang besar. Sehingga, harapan tersebut menjadi pertanyaan yang layak ditelusuri, apakah hal tersebut walaupun belum pernah terjadi tetapi saat ini dirasakan masyarakat? Dimanakah titik-titik kerawanan konflik tersebut? Hal ini memerlukan penelitian tersendiri diluar penelitian ini.

5.8.8 Analisa Kriteria Calon Pemimpin

Grafik 31 menggambarkan harapan pemilih perempuan terhadap calon pemimpin. Beberapa point yang menjadi harapan mereka adalah: 1. Memiliki kemampuan memimpin dan profesional, 2. Mencintai dan peduli rakyat miskin, 3. Taat beragama, 4. Tegak dan berani menegakkan hukum, 5. Mampu merangkul semua pihak untuk mempercepat

pembangunan, 6. Memiliki sifat amanah, dan 7. Mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Inilah tipe ideal yang diinginkan oleh pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang. Pertanyaannya adalah apakah ada calon pemimpin yang memiliki ciri dan karakter yang diinginkan pemilih?.

Dalam Kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun (2008) menulis bahwa syarat untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa adalah diperlukan pemimpin yang profesional dan amanah. Eksistensi seorang pemimpin merupakan kebutuhan mendesak dalam sebuah komunitas, hal ini tergambar dalam sebuah sabda Rasulullah saw: *“Apabila tiga orang dalam perjalanan hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin”* (HR. Abu Daud). Namun, bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi memiliki syarat dan karakter yang layak sebagai pemimpin.

Memiliki kemampuan memimpin dan profesional, mencintai dan peduli rakyat miskin, Taat beragama, Tegas dan berani menegakkan hukum merupakan sifat ideal yang dipilih oleh responden kajian. Dengan kelebihan tersebut seorang pemimpin akan tampil mempesona orang yang dipimpinya, sehingga dengan sendirinya mereka akan mengikuti segala yang diinginkannya. Terlebih di era dengan krisis multidimensi, tuntutan akan karakter pemimpin tersebut menjadi semakin urgen pula. Apalagi seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat kelak.

Karakter utama yang dimiliki oleh Rasulullah ialah yang dikenal sebagai sifat wajib bagi Rasul yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (cerdas) (Sakdiah: 2016). Dengan karakter utama tersebut membuat Rasul disenangi oleh semua orang yang berinteraksi dengannya. Sifat *shiddiq* (jujur) menjadikan Rasul seorang pemimpin yang mampu menciptakan *good*

government dan *clean government*. Bermula dari kejujurannya dalam keseluruhan hidupnya menjadikan Rasul mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Bahkan sejak muda beliau digelari *Al Amin*. Sifat *amanah* (terpercaya) menjadikan pemerintahan Rasul memiliki akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi. Diantara cara Rasul menjaga kepercayaan publik ialah dengan *tabligh* (menyampaikan), yaitu transparansi. Semua itu didasari oleh *fathanah* (cerdas). Mengenai karakter Rasulullah saw dalam kepemimpinannya, sejarah mencatat Rasulullah saw memimpin dengan keluasan ilmu yang bersumber langsung dari pemilik ilmu, Allah swt, beliau memiliki *sense of crisis* sehingga mampu memahami permasalahan yang tengah dialami oleh rakyatnya, sumber masalah dan *problem solving*nya. Keluasan ilmu menjadikan Rasul saw seorang pemimpin yang visioner, sedangkan karakter visioner sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan untuk memandang jauh ke depan. Lihat saja saat Rasul saw berdakwah ke Thaif dan sambutan penduduk tidak seperti yang diharapkan, justru luka sebab lemparan batu yang beliau terima. Namun yang keluar dari mulutnya adalah doa dan pengharapan kelak Allah akan menjadikan anak-keturunan penduduk Thaif beriman di masa mendatang. (Al Mubârafûri: 2008)

Keluasan pengetahuan Rasulullah saw, cinta dan sayang kepada umat juga terlihat dari tingginya akhlak Rasulullah saw. Dimana masing-masing peran memerlukan kecakapan dan kematangan berpikir. Beliau menjadi pengajar, ayah, sahabat, hakim dan pemimpin sekaligus, dan semuanya dijalankan dengan baik dan mengesankan. Seturut dengan itu, efektivitas dalam komunikasi pun menjadikan beliau seorang pemimpin yang fleksibel, sesuai dengan lawan bicaranya, sehingga informasi dapat diterima dengan sempurna. Dan yang menjadi poin pembeda adalah komunikasi dibangun

tidak hanya terbatas pada ruang verbal, tetapi juga teladan berupa perbuatan, dan inilah yang lebih dominan. Tidak satu pun perintah yang diinstruksikan kepada umat, melainkan telah beliau kerjakan terlebih dahulu.

Dengan adanya ketujuh point kriteria calon pemimpin ideal bagi pemilih perempuan di Tanjungpinang tersebut, bukan berarti point-point lain dari 17 parameter pemimpin yang telah ditetapkan dalam penelitian ini menjadi kurang penting. Point-point yang lain tetap penting sebagaimana terlihat dari ukuran nilai mereka pada Grafik 31. Hanya saja, ketujuh point di paragraph pertama sub bab ini merupakan point prioritas harapan pemilih perempuan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab V sebelumnya, tim peneliti membuat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor yang mempengaruhi pemilih perempuan dalam memilih partai politik adalah sepadan dengan platform/visi dan misi partai, elit partai politik bebas korupsi, ketokohan elit partai dan ideologi partai.
- 2) Faktor utama yang mempengaruhi pemilih perempuan memilih calon legislatif adalah memiliki kesamaan ideologi (tanpa membedakan jenis kelamin), ketaatan beragama calon, mengenal dengan dengan baik. Pemilih perempuan di Kota Tanjungpinang berpendapat bahwa tidak ada jaminan memilih calon perempuan akan membuat mereka memiliki wakil rakyat yang membela perempuan.
- 3) Prioritas pembangunan yang diperlukan oleh pemilih perempuan adalah membuka lapangan pekerjaan, tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, memperbaiki pengelolaan sampah dan memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik.
- 4) Kriteria pemimpin yang diinginkan oleh pemilih perempuan adalah memiliki kemampuan memimpin dan profesional, mencintai dan peduli rakyat miskin, taat beragama, tegas dan berani menegakkan hukum, mampu merangkul semua pihak untuk mempercepat

pembangunan, memiliki sifat amanah, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

- 5) Mayoritas pemilih perempuan dengan tegas menolak politik uang dan sebagian kecil mengatakan akan menerima uang/barang walaupun tetap akan memilih sesuai hati nurani.

6.2. Saran

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan kajian, tim peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Elit dan pengurus partai politik harus bersungguh-sungguh agar bersih dari korupsi, karena pemilih perempuan tidak suka memilih partai yang elit/pengurusnya terlibat perilaku korupsi.
- 2) Kesamaan Jenis kelamin tidak menjadi jaminan bahwa calon legislatif perempuan akan dipilih oleh pemilih perempuan, namun lebih dipengaruhi oleh kesamaan ideologi, ketaatan beragama dan dikenal oleh pemilih. Calon legislatif perempuan perlu berkorban waktu, diri dan harta agar bisa dekat dengan pemilih dan hal ini bukan dilakukan menjelang masa kampanye tetapi jauh sebelum pemilu legislatif.
- 3) Harus disegerakan program pembangunan yang dapat membuka lapangan pekerjaan, peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, memperbaiki pengelolaan sampah dan memperbaiki hubungan antar etnik masyarakat yang terlibat konflik. Kota Tanjungpinang terdiri dari berbagai etnik, maka diperlukan program yang dapat mengantisipasi terjadi konflik antar etnik.
- 4) Setiap partai yang akan mendaftarkan calon legislatif perlu memastikan setiap calon yang didaftarkan ke KPU Kota Tanjungpinang memiliki kemampuan memimpin dan profesional, mencintai dan peduli rakyat miskin, taat beragama, tegas dan berani menegakkan hukum dan memiliki sifat amanah. Calon legislatif bukan semata-mata karena memiliki banyak modal dan terkenal tetapi memiliki sifat dan karakter yang baik dan menjunjung nilai dan budaya masyarakat melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel.A. 1990. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Bismar Arianto. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1(1):51-60
- Budiman, A. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- El Sadaawi, Nawal. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Affan. 1999. *Perkembangan Budaya Politik Melalui Pemilu*. CIDES. Jakarta.
- Ghazali Mayudin. 1999. Demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Dlm. Ghazali Mayudin, Jamaie Hamil, Sity Daud & Zaini Othman (pnyt). *Demokrasi, kepemimpinan dan keselamatan dalam politik Malaysia*. Bangi: Penerbit UKM.
- Ibrahim Z. Fahmy Badoh & Abdullah Dahlan. 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ICW.
- Lips, Hilary M., 1993, *Sex & Gender an Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publising Company
- Lipset, S.M. 1963. *Political man: social basis of politics*. New York: Anchor Books.
- Mar'at, 1992. *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta: Gramedia Media Sarana.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Radityo Rizki Hutomo. 2015. *Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesuaian Program Kandidat,*

- Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4(1):50 – 60
- Rokkan, S. & Lipset, S.M. 1967. *Cleavage structures, party system, and voter alignments*. New York: Free Press.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Siti Aminah. 2008. Politik Media, Demokrasi Dan Media Politik. *Journal Fisip Unair*. Vol. 1:1-10
- Sjamsuddin, Nazarudin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia
- Tan, Mery.G. 1992. *Wanita dan Partisipasi Politiknya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal/Skripsi/dll

- Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of sex Typing. *Psychological Review*.
- Cice Verawati. 2009. *Perilaku Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara*. Sulawesi Utara.
- Maya R. (dkk.), (2004). “Apa yang diharapkan Perempuan Pemilih?”, *Jurnal Perempuan* 34.
- Mediastutie, Mega. 2006. *Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*. Skripsi. FISIP Unila.
- Puspasari, Tri setya. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*.
- Rahmaturrizqi. 2014. *Gender Dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik*.
- International Foundation for Electoral Systems, 2014, *Kesetaraan Gender dan Penyelenggara Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*.

- Biro Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2017, *Kota Tanjungpinang dalam Angka 2017*, hal 28.
- Cates, W.M., 1985. *A Practical Guide to Educational Research*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E., 1955, *Construct Validity in Psychological Tests*. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281-302. <http://dx.doi.org/10.1037/h0040957>
- Fotheringham, A., Brunson, C. and Charlton, M., 2010, *Geographically weighted regression*, Chichester, Wiley.
- Gaffar, J. M, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, hal 36
- Hillman, B, 2017, *Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience*. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4: 38–49. doi: [10.1002/app5.160](https://doi.org/10.1002/app5.160).
- KPU, *DPT A6 dan DPK*, <https://data.kpu.go.id/dptA6.php>, diakses 24 Feb 2018.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607-610.
- Kurzman, Charles (Ed.) *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 68-69
- Muhammad, Husein *Tafsir Gender*, hal. 106-107.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan* Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah, 2001, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam* Jakarta: El-Kahfi
- Surbakti, Ramlan 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam (Jakarta: Depag RI, 2001), hal. 41-42.

Yandri, P., 2017, *The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from Local Election in Suburban Indonesia*, Indonesian Journal of Geography, 49(1), page 57-64.

BIODATA TIM PENULIS



Dr. Adji Suradji Muhammad, M.Si merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji dan juga sekaligus penanggungjawab pada Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan UMRAH dengan keahlian Ilmu Politik, Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Rodi Wahyudi, Ph.D adalah Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan Keahlian: Instrumentasi kajian pemilu/pemilukada, analisis data statistik kuantitatif (SPSS).



Orientasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Umum



Gusrizal, M.Sc, Co-Founder Sinergi Multi Performa (CV) dengan Keahlian khusus Analisa Data Statistik dan Geospasial.

Pery Rahendara Sucipta, ahli dalam bidang kajian Gender di Pusat Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Maritim Raja Ali Haji.

